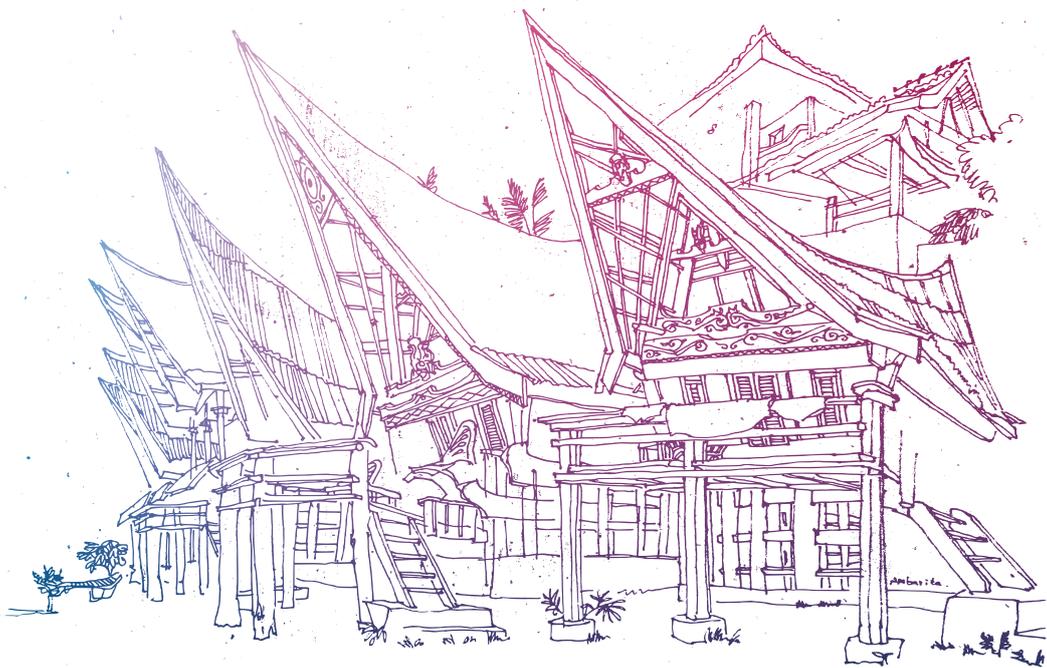


LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Utara

November 2023





Laporan Perekonomian **PROVINSI SUMATERA UTARA**

November 2023



Visi, Misi, & Nilai-nilai Strategis

Visi Bank Indonesia

“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

Nilai-nilai Strategis

Organisasi Bank Indonesia

1. Kejujuran dan integritas (*trust and integrity*);
2. Profesionalisme (*professionalism*);
3. Keunggulan (*excellence*);
4. Mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan
5. Koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.





Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Periode Agustus 2023. Laporan ini memuat evaluasi perkembangan ekonomi Sumatera Utara triwulan III-2023, serta prospek keseluruhan tahun 2023. Publikasi laporan ini sekaligus menjadi bagian dari visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa **perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tumbuh sebesar 4,94% (yoy), menurun dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,19% (yoy)**. Dari sisi pengeluaran, termoderasinya pertumbuhan utamanya berasal dari melemahnya kinerja ekspor seiring dengan menurunnya harga komoditas global dan menurunnya konsumsi pemerintah akibat kontraksi pada komponen belanja pegawai. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat menjadi 6,42% dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini diperkirakan akibat *consumption smoothing* oleh masyarakat yang didorong berlanjutnya relaksasi LTV/FTV untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor hingga akhir 2023, mulai meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang pesta demokrasi, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya, kinerja investasi Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami peningkatan seiring tumbuhnya belanja modal. Dari sisi lapangan usaha, secara tahunan, sektor perdagangan dan konstruksi menopang pertumbuhan ekonomi Sumut di tengah termoderasinya pertumbuhan sektor pertanian dan industri. LU Pertanian mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor industri termoderasi yang tercermin dari SKDU Industri Pengolahan yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring moderasi permintaan domestik dan *rebound* ekonomi China yang tidak setinggi perkiraan berdampak pada tertahannya permintaan. Di sisi lain, sektor perdagangan menunjukkan perbaikan kinerja seiring menguatnya pembiayaan kredit perdagangan dan UMKM perdagangan yang menguat pada triwulan III 2023.

Kedua, **tekanan inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya**. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,55% (yoy) dan berada di rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar $3\% \pm 1\%$. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 2,28% (yoy) namun lebih tinggi dari inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera yang sebesar 2,13% (yoy) pada triwulan III-2023. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, rokok kretek filter, tomat, akademi/ perguruan tinggi, dan bawang putih. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi beras seiring dengan kenaikan harga BBM yang meningkatkan biaya angkut komoditas beras. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi, serta berkurangnya produksi beras secara Nasional akibat fenomena El-Nino juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat dan bawang putih sejalan dengan terbatasnya produksi akibat belum masuknya musim panen dan terbatasnya impor bawang putih. Adapun peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi. Adapun

peningkatan harga daging ayam ras dipicu oleh meningkatnya biaya pakan ternak dan tingginya permintaan masyarakat pada perayaan HBKN Idul Adha. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan III-2023. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan *urban farming* dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat, yakni bias atas dalam kisaran 4,3-5,1% (yoy). Permintaan masyarakat yang kembali pulih dan daya beli masyarakat yang meningkat tercermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti: i) perlambatan ekonomi global yang diiringi dengan tertahannya permintaan ekspor dan koreksi harga komoditas unggulan Sumatera Utara; ii) pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respon dari ketatnya pasar tenaga kerja; serta iii) ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. **Selanjutnya, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya** dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ pada tahun 2023.

Akhir kata, selain sebagai referensi yang bermanfaat, kami mengharapkan buku ini dapat memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Sumatera Utara yang lebih baik ke depan. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan, antara lain, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi masih belum sepenuhnya sempurna sehingga saran, masukan serta dukungan informasi/data dari pembaca sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari laporan ini.

Medan, November 2023
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Utara

ttd

I G P Wira Kusuma

Daftar Isi



Visi Misi Bank Indonesia	II
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Grafik	VIII
Daftar Tabel	XI
Tabel Indikator	XIII
Ringkasan Umum	XVI
Daftar Istilah	93
Tim Penyusun	95

Bab II Keuangan Pemerintah

24

2.1 Gambaran Umum P-APBD 2023	25
2.2 Realisasi APBD Triwulan III-2023	26
2.3 Pagu Belanja APBN untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Lebih Tinggi	29
2.4 Realisasi Belanja APBN pada Triwulan III-2023 Mengalami Peningkatan	30

Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

2

1.1 Perekonomian Sumatera Tetap Tumbuh Kuat Ditopang Oleh Perbaikan Permintaan Domestik	3
1.2 Dari Sisi Pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Kuat	4
1.3 Lapangan Usaha Perdagangan dan Lapangan Usaha Konstruksi Tumbuh Lebih Tinggi	9
Boks 1 Kajian Peran Fiskal Dalam Mengatasi <i>Scarring Effect</i> Pada Sektor Pariwisata Sumatera Utara Khususnya Melalui Dukungan Pembangunan DPSP Danau Toba	15
Boks 2 Analisis Dinamika Uang Elektronik dan Inflasi Regional : Studi Kasus Wilayah Sumatera dengan Model Data Panel Dinamis	19

Bab III Perkembangan Inflasi Daerah

32

3.1 Kinerja Inflasi Triwulan II-2023	33
3.2 Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok	34
3.3 Inflasi Spasial	35
3.4 Perkembangan Inflasi Triwulan IV-2023	41



Bab IV
Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

46

4.1 Pembiayaan Daerah	47
4.2 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	51

Bab V
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

54

5.1 Sistem Pembayaran Menunjukkan Tren Peningkatan	55
5.2. Program Elektronifikasi Berjalan Lancar	57
5.3 Aliran Uang Kartal Mengalami <i>Net Inflow</i>	58
5.4 Aliran Transfer Dana Lintas Negara Tetap Kuat	58

Boks 3 Perluasan Akseptasi Digital Melalui Program Medan Digifestival 2023	61
--	----

Bab VI
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

66

6.1 Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara Mengalami Perbaikan	67
6.2 Kesejahteraan	70

Bab VII
Prospek Perekonomian Daerah

76

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi	77
7.2 Prospek Inflasi	82
7.3 Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2024	83
7.4 Rekomendasi	84

Boks 4 Gelar NSI Day 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Mendukung Kemudahan Aliran Modal Investasi dan UMKM Go Ekspor	87
---	----

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan	3	Grafik 1.22	Kredit Pertanian	12
Grafik 1.2	Kredit Konsumsi	5	Grafik 1.23	Perkembangan Harga Gabah	12
Grafik 1.3	Simpanan Pemerintah Daerah	5	Grafik 1.24	Jumlah Kunjungan Kapal	13
Grafik 1.4	Realisasi Investasi	6	Grafik 1.25	Kredit Transportasi	13
Grafik 1.5	Pangsa Realisasi Investasi	6	Grafik 1.26	Penumpang Angkutan Udara Domestik dan Internasional	13
Grafik 1.6	Pengadaan Semen	6	Grafik 2.1	Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara	25
Grafik 1.7	Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional	7	Grafik 2.2	Derajat Otonomi Fiskal Sumatera Utara	25
Grafik 1.8	Nilai dan Volume Ekspor	7	Grafik 2.3	Proporsi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	26
Grafik 1.9	Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing	7	Grafik 2.4	Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara	26
Grafik 1.10	Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional	8	Grafik 2.5	Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III-2023	27
Grafik 1.11	Ekspor CPO	8	Grafik 2.6	Realisasi PAD Triwulan III-2023	27
Grafik 1.12	Ekspor Karet	8	Grafik 2.7	Realisasi Belanja APBD Triwulan III-2023	28
Grafik 1.13	Ekspor Kopi	8	Grafik 2.8	Realisasi Belanja Operasi Triwulan III-2023	28
Grafik 1.14	Nilai dan Volume Impor	9	Grafik 2.9	Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara	30
Grafik 1.15	Kredit Perdagangan	10	Grafik 2.10	Realisasi Belanja APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Belanja	30
Grafik 1.16	Kredit Konstruksi	10	Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara, Nasional, dan Inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera	33
Grafik 1.17	Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Industri Pengolahan	11	Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara dan Daerah Lainnya	33
Grafik 1.18	Konsumsi Listrik Industri	11	Grafik 3.3	Distribusi Andil Inflasi per Kelompok	34
Grafik 1.19	Kredit Industri Pengolahan	11	Grafik 3.4	Inflasi Kota Sibolga per Kelompok	37
Grafik 1.20	Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit	12	Grafik 3.5	Inflasi Kota Padangsidimpuan per Kelompok	38
Grafik 1.21	Nilai Tukar Petani	12			

Daftar Grafik

Grafik 3.6	Inflasi Kota Pematangsiantar per Kelompok	38	Grafik 5.2	Alokasi Penggunaan Kartu ATM Debit	55
Grafik 3.7	Inflasi Kota Medan per Kelompok	39	Grafik 5.3	Alokasi Penggunaan Kartu Kredit	55
Grafik 3.8	Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok	40	Grafik 5.4	Perkembangan BPNT	56
Grafik 3.9	Historis Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	42	Grafik 5.5	Perkembangan PKH	56
Grafik 3.10	Historis Inflasi Tahunan Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	42	Grafik 5.6	Perkembangan RTGS	56
Grafik 4.1	Indeks Ekspektasi Penghasilan	47	Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi E-Commerce	56
Grafik 4.2	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	47	Grafik 5.8	Perkembangan SKNBI	57
Grafik 4.3	Perkembangan Kredit Multiguna	48	Grafik 5.9	Perkembangan <i>Inflow - Outflow</i>	58
Grafik 4.4	NPL Kredit Rumah Tangga	48	Grafik 5.10	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	59
Grafik 4.5	Pertumbuhan Kredit Korporasi	49	Grafik 5.11	Perkembangan Transaksi PJP-LR	59
Grafik 4.6	<i>Likert Scale</i> Permintaan Domestik dan Ekspor	49	Grafik 6.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara	67
Grafik 4.7	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan	50	Grafik 6.2	TPT Menurut Jenjang Pendidikan	68
Grafik 4.8	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha	50	Grafik 6.3	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	68
Grafik 4.9	NPL Kredit Korporasi	50	Grafik 6.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK	68
Grafik 4.10	Pertumbuhan Kredit UMKM	50	Grafik 6.5	Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha	68
Grafik 4.11	Penyaluran kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit	51	Grafik 6.6	Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	69
Grafik 4.12	Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Segmen UMKM	51	Grafik 6.7	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan	69
Grafik 4.13	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	51	Grafik 6.8	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama	70
Grafik 4.14	Perkembangan NPL Kredit UMKM	52	Grafik 6.9	Perkembangan Nilai Tukar Petani	70
Grafik 4.15	Perkembangan NPL Kredit UMKM	52	Grafik 6.10	Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan	70
Grafik 5.1	Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debit, Kartu Kredit, dan UE	55	Grafik 6.11	IT dan IB Sumatera Utara	71



Daftar Grafik

Grafik 6.12	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara	71
Grafik 6.13	Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan	71
Grafik 6.14	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	72
Grafik 6.15	Perkembangan Rasio Gini	73
Grafik 6.16	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan	73
Grafik 6.17	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan	73
Grafik 6.18	Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional	74



Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara (%)	9
Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara	28
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara	29
Tabel 2.3	Pagu dan Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Belanja (Tidak Termasuk TKDD)	29
Tabel 3.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan III-2023	34
Tabel 3.2	Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional	36
Tabel 3.3	Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel	41
Tabel 4.1	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor	48
Tabel 4.2	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah	49
Tabel 6.1	Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh)	70
Tabel 6.2	Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan	72
Tabel 6.3	IPM Sumut Menurut Komponen	74
Tabel 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	78





Daftar Gambar

Gambar B3.1	<i>Opening Ceremony Medan Digifestival 2023</i>	62
Gambar B3.2	Dokumentasi Kegiatan Medan Digifestival 2023	63
Gambar B4.1	<i>Launching NSI Day 2023</i> : Pj. Gubernur Sumatera Utara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM menuangkan air ke dalam peta Sumatera sebagai bentuk simbolis dukungan Pemerintah terhadap kemudahan aliran modal investasi Sumatera	89

2022

2023

PDRB (% yoy)	2022				2023				2023			
	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III
	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94
PENGELUARAN												
Konsumsi Rumah Tangga	5,20	3,09	3,45	1,69	3,58	4,64	4,63	5,33	4,55	5,69	6,20	6,42
Konsumsi LNPRT	-2,71	-0,50	-1,25	-2,59	3,71	5,93	4,77	7,43	5,47	7,46	7,69	8,72
Konsumsi Pemerintah	2,99	3,57	6,82	3,46	-1,54	-0,21	-7,01	-4,23	-3,34	5,19	6,16	-0,04
PMTB	6,27	6,07	5,82	3,47	5,95	2,12	3,90	3,36	3,80	3,37	3,36	5,28
Ekspor	19,65	19,19	13,71	15,09	12,61	11,16	12,32	9,77	11,44	2,45	-0,71	-5,11
Impor	25,51	25,40	18,30	18,34	15,94	9,61	11,64	8,29	11,20	2,06	-2,52	-6,97
LAPANGAN USAHA												
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,94	4,73	5,63	3,87	5,00	5,25	5,08	5,35	5,17	3,46	3,21	2,68
Pertambangan dan Penggalian	2,89	4,21	3,90	1,92	2,20	2,83	2,54	3,15	2,69	3,78	3,49	3,37
Industri Pengolahan	2,36	1,26	1,07	1,43	0,68	2,04	2,66	2,53	1,98	2,61	4,08	3,92
Pengadaan Listrik, Gas	5,48	4,69	9,86	4,93	7,27	7,67	4,53	0,15	4,81	0,73	2,21	2,36
Pengadaan Air	4,95	3,68	2,55	3,62	2,04	2,17	1,27	3,19	2,17	2,32	1,86	4,47
Konstruksi	4,98	3,93	3,09	2,18	2,50	2,80	2,82	3,30	2,86	5,49	5,56	6,81
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	4,84	5,21	3,62	5,82	6,70	6,79	6,92	6,56	5,56	4,66	6,06
Transportasi dan Pergudangan	5,94	-0,40	1,72	-3,63	6,16	12,10	16,28	16,02	12,69	15,64	12,29	12,41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,49	4,13	4,17	-0,81	4,06	6,62	8,04	9,79	7,16	9,12	9,21	11,19
Informasi dan Komunikasi	6,86	7,12	7,36	6,51	7,38	7,59	7,62	7,78	7,60	7,76	7,80	7,82
Jasa Keuangan	7,87	8,43	0,33	4,46	7,54	1,35	1,07	5,43	3,81	1,60	7,57	7,68
Jasa Perantara Keuangan	11,00	12,11	0,41	7,21	9,83	0,44	0,02	6,19	4,06	0,00	0,04	7,37
Real Estate	3,70	2,89	2,89	2,50	3,11	4,59	4,60	5,75	4,52	6,66	4,74	1,85
Jasa Perusahaan	3,59	2,67	2,72	-0,14	6,57	8,25	9,96	10,22	8,77	11,35	8,83	3,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	-0,05	3,03	2,08	-0,44	-0,14	-0,12	-2,22	-0,74	0,67	8,95	-2,36
Jasa Pendidikan	4,70	3,28	3,88	3,05	3,86	4,52	5,86	6,20	5,13	7,16	8,78	7,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,50	3,79	5,41	0,25	7,78	7,87	2,80	1,29	4,82	3,59	6,00	7,33
Jasa lainnya	5,45	3,80	3,63	1,43	5,21	7,63	9,98	11,61	8,65	9,69	10,22	10,14

Tabel Indikator

	2021					2022					2023		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III
INFLASI													
INDEKS HARGA KONSUMEN													
Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	104,50	104,83	105,35	106,26	106,26	107,91	110,71	111,82	112,77	112,77	113,09	113,54	114,22
Medan	104,18	104,50	105,03	105,92	105,92	107,45	110,24	111,34	112,38	112,38	112,58	112,96	113,64
Pematangsiantar	106,03	106,41	106,64	107,79	107,79	109,87	112,49	113,32	114,43	114,43	115,15	115,98	116,15
Padangsidempuan	106,58	107,28	107,77	108,68	108,68	111,29	114,48	115,93	115,64	115,64	117,27	118,04	119,00
Sibolga	105,92	106,30	107,35	108,15	108,15	110,60	113,21	114,78	115,10	115,10	116,38	117,60	118,68
Gunung Sitoli	106,75	106,77	107,08	108,43	108,43	110,34	113,64	114,75	114,65	114,65	114,60	114,79	116,87
Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera	105,33	105,59	105,74	107,07	107,07	108,60	111,74	113,07	113,65	113,65	114,20	114,77	115,49
Nasional	106,15	106,46	106,53	107,66	107,66	108,95	111,09	112,87	113,59	113,59	114,36	115,00	115,44
LAJU INFLASI TAHUNAN (%YOY)													
Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	1,43	1,69	2,40	1,71	1,71	3,26	5,61	6,14	6,12	6,12	4,80	2,55	2,15
Medan	1,25	1,52	2,26	1,70	1,70	3,14	5,50	6,01	6,10	6,10	4,77	2,47	2,06
Pematangsiantar	2,61	3,14	3,65	2,12	2,12	3,62	5,71	6,26	6,17	6,17	4,81	3,10	2,50
Padangsidempuan	1,93	1,80	2,58	1,50	1,50	4,42	6,71	7,57	6,40	6,40	5,37	3,11	2,65
Sibolga	2,08	2,82	3,87	1,86	1,86	4,42	6,50	6,92	6,42	6,42	5,22	3,88	3,40
Gunung Sitoli	3,22	3,36	2,02	0,54	0,54	3,36	6,43	7,16	5,74	5,74	3,86	1,01	1,85
Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera	1,60	1,76	2,08	1,91	1,91	3,11	5,82	6,94	6,14	6,14	5,16	2,71	2,13
Nasional	1,37	1,33	1,60	1,87	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	5,51	4,97	3,52	2,28
LAJU INFLASI KUMULATIF (%YTD)													
Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	0,02	0,34	0,83	1,71	1,71	1,54	4,18	5,23	6,12	6,12	0,28	0,68	1,29
Medan	0,03	0,34	0,84	1,70	1,70	1,44	4,08	5,12	6,10	6,10	0,17	0,52	1,12
Pematangsiantar	0,45	0,81	1,03	2,12	2,12	1,93	4,36	5,13	6,17	6,17	0,63	1,35	1,50
Padangsidempuan	-0,47	0,19	0,64	1,50	1,50	2,40	5,34	6,67	6,40	6,40	1,41	2,08	2,91
Sibolga	-0,24	0,12	1,11	1,86	1,86	2,27	4,67	6,13	6,42	6,42	1,12	2,17	3,12
Gunung Sitoli	-1,02	-1,00	-0,71	0,54	0,54	1,76	4,81	5,83	5,74	5,74	-0,04	0,12	1,94
Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera	0,25	0,50	0,65	1,91	1,91	1,42	4,36	5,61	6,14	6,14	0,48	0,99	1,62
Nasional	0,44	0,74	0,80	1,87	1,87	1,20	3,19	4,84	5,51	5,51	0,68	1,24	1,63
LAJU INFLASI BULANAN (%MTM)													
Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara	-0,08	0,03	0,29	0,46	0,46	0,71	1,40	1,00	1,50	1,50	-0,31	0,31	0,37
Medan	-0,03	0,03	0,31	0,44	0,44	0,68	1,39	0,98	1,54	1,54	-0,30	0,29	0,38
Pematangsiantar	-0,23	0,23	0,32	0,85	0,85	0,77	1,36	1,50	1,61	1,61	-0,30	0,52	0,16
Padangsidempuan	-0,57	-0,26	0,04	0,35	0,35	1,11	1,29	0,99	0,63	0,63	-0,18	0,21	0,49
Sibolga	-0,29	0,31	0,31	0,17	0,17	0,93	1,12	0,33	1,44	1,44	-0,66	0,62	0,44
Gunung Sitoli	-0,54	-0,28	-0,13	0,62	0,62	0,39	2,72	0,61	1,79	1,79	-0,91	0,21	0,38
Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera	0,02	-0,01	0,18	0,51	0,51	0,80	1,16	1,15	0,96	0,96	-0,12	0,27	0,32
Nasional	0,08	-0,16	-0,04	0,57	0,57	0,66	0,61	1,17	0,66	0,66	0,18	0,14	0,19

Tabel Indikator

	2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)	267,95	279,66	285,15	293,09	302,26	298,79	303,13	305,72	303,31	302,79	306,71
Giro	41,95	47,37	49,24	47,33	58,56	54,29	58,90	53,27	53,98	47,48	52,65
Tabungan	112,21	119,27	121,01	128,98	130,78	134,21	133,54	136,30	133,11	137,01	134,61
Deposito	113,79	113,03	114,90	116,78	112,93	110,29	110,69	116,15	116,22	118,30	119,45
Kredit (Rp triliun)	230,92	235,44	230,33	237,79	243,35	253,87	255,92	253,50	249,86	247,67	253,65
Modal Kerja	109,39	115,13	112,70	109,11	111,66	118,21	114,33	112,34	108,51	105,73	114,47
Investasi	58,48	57,75	53,50	64,02	65,32	68,54	73,02	70,99	70,40	69,86	58,44
Konsumsi	63,06	62,55	64,13	64,66	66,37	67,12	68,58	70,18	70,94	72,08	64,26
Loan to Deposit Ratio (%)	86,2%	84,2%	80,8%	81,1%	80,5%	85,0%	84,7%	82,9%	82,4%	81,8%	82,7%
NPL Kredit (%)	3,50%	3,26%	3,02%	2,76%	2,53%	2,43%	2,46%	2,44%	2,50%	2,39%	2,0%

Sumber: Data Bank Umum Sumatera Utara Menurut Lokasi Proyek

SISTEM PEMBAYARAN	2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
SP TUNAI											
Inflow (Satker Kas- dlm juta)	14.640.646	12.370.252	8.242.936	6.772.770	11.260.835	12.472.201	9.543.674	6.153.405	13.385.862	10.844.317	9.543.674
Outflow (Satker Kas- dlm juta)	(4.775.401)	(12.883.954)	(7.944.287)	(14.006.024)	(6.142.670)	(9.224.180)	(6.933.616)	(12.132.195)	(6.212.541)	(9.939.636)	(6.933.616)
Netflow (Satker Kas- dlm juta)	9.865.245	(513.702)	298.649	(7.233.254)	5.118.165	3.248.021	2.610.058	(5.978.790)	7.173.321	904.680	2.610.058
SP NON TUNAI											
RTGS- volume	69.323	70.891	72.764	82.477	70.653	68.855	63.383	70.181	57.147	53.965	63.383
RTGS- nominal (Rp milyar)	233.777	256.453	218.342	232.096	219.297	228.638	202.965	233.040	185.521	175.577	202.965
SKNBI- volume	692.628	672.999	637.212	718.199	605.239	602.556	593.057	607.008	500.721	502.369	593.057
SKNBI- nominal (Rp milyar)	38.565	37.735	36.757	42.526	36.793	36.235	33.734	34.540	30.656	27.983	33.734



Ringkasan Umum

ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tetap solid didukung kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,94% (yoy) atau sama dengan nasional dan lebih tinggi dari Sumatera yang tumbuh sebesar 4,5%. Pertumbuhan tersebut walaupun lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih tetap kuat ditengah masih lemahnya harga komoditas dunia yang berdampak pada penurunan ekspor. Dari sisi pengeluaran, permintaan domestik di Sumatera Utara tetap kuat. Konsumsi rumah tangga terakselerasi didukung peningkatan pembelian rumah dan kendaraan bermotor dan aktivitas wisatawan mancanegara di masa libur sekolah. Konsumsi Lembaga Non-Profit juga terindikasi mulai meningkat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Di tengah pertumbuhan kredit yang masih terbatas, investasi bangunan swasta juga mulai tumbuh tercermin dari penjualan semen yang tumbuh tinggi dan diperkirakan masih mengandalkan dana internal seiring penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) swasta dengan nilai besar. Sementara itu, belanja pemerintah daerah masih terbatas seiring kecenderungan *wait and see* menjelang penyelenggaraan pemilu 2024.

Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan hotel dan restoran serta konstruksi menopang pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan III 2023 di tengah perlambatan pertumbuhan sektor pertanian dan industri. Akselerasi konsumsi masyarakat mendorong kinerja sektor perdagangan terutama untuk penjualan kendaraan bermotor. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara juga mendorong kinerja LU penyediaan akomodasi dan makan minum dan LU Transportasi. Di sisi lain, kinerja sektor konstruksi juga meningkat tercermin dari peningkatan penjualan semen seiring akselerasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berlanjutnya pembangunan sejumlah infrastruktur strategis dalam mendukung PON 2024. Sementara itu, LU Pertanian mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global terutama pada komoditas kelapa sawit. Perkembangan ini juga berdampak pada perlambatan sektor industri di tengah masih tingginya ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

ASESMEN KEUANGAN DAERAH

Realisasi dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami penurunan dari sisi pendapatan, namun meningkat dari sisi penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada triwulan III-2023 sebesar 63,38% dari pagu, lebih rendah dari realisasi triwulan III-2022 sebesar 69,52% yang berasal dari penurunan realisasi di hampir seluruh komponen pendapatan. Sementara itu, realisasi belanja APBD pada triwulan III-2023 mengalami peningkatan didorong oleh optimalisasi penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2023 tercatat meningkat hingga 9,24% (yoy) dari tahun 2022. Sementara itu, realisasinya pada triwulan III-2023 adalah sebesar 62,93%, atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan III-2022 sebesar 63,14%. Penurunan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja kecuali Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial.

ASESMEN INFLASI

Tekanan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami penurunan secara signifikan. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,55% (yoy) dan berada di rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar $3\% \pm 1\%$. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 2,28% (yoy), namun lebih tinggi dari inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera yang sebesar 2,13% (yoy) pada triwulan III-2023. Sumber tekanan inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Pendidikan. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan III-2023 utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, rokok kretek filter, tomat, akademi/ perguruan tinggi, dan bawang putih. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi beras seiring dengan kenaikan harga BBM yang meningkatkan biaya angkut komoditas beras. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi, serta berkurangnya produksi beras secara Nasional akibat fenomena El-Nino juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat dan bawang putih sejalan dengan terbatasnya produksi akibat belum masuknya musim panen dan terbatasnya impor bawang putih. Adapun peningkatan biaya akademi/ perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan III-2023. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan urban farming dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN SERTA UMKM

Sejalan dengan peningkatan optimisme masyarakat, kinerja pembiayaan Rumah Tangga (RT) dan UMKM turut mengalami peningkatan. Namun, kinerja pembiayaan korporasi mengalami perlambatan pada triwulan III-2023, melanjutkan kondisi yang sama pada triwulan sebelumnya. Meningkatnya kinerja kredit RT dan UMKM mengindikasikan membaiknya pola konsumsi masyarakat paska pandemi serta meningkatkan konsumsi masyarakat selama masa liburan. Sementara itu, kredit korporasi masih tertahan terutama pada penggunaan kredit investasi yang menurun signifikan di tengah kredit modal kerja membaik. Seluruh lapangan usaha mencatatkan penurunan kecuali LU Perdagangan Besar dan Eceran yang masih mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas perusahaan yang masih enggan untuk menggunakan kredit untuk kegiatan investasi sebagai imbas dari suku bunga perbankan yang masih tinggi. Secara keseluruhan, kualitas kredit tetap terjaga di bawah threshold baik untuk rumah tangga, korporasi maupun UMKM.

ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan III-2023, kinerja transaksi sistem pembayaran menunjukkan peningkatan.

Transaksi sistem pembayaran non-tunai menunjukkan persebaran penggunaan pada berbagai instrumen pembayaran. Di tengah peningkatan transaksi non tunai, nominal transaksi kartu ATM debit mengalami perlambatan pada triwulan III-2023 sejalan dengan normalisasi pola konsumsi masyarakat Sumatera Utara pasca HBKN pada triwulan II-2023. Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah masih didukung oleh penyerapan bantuan sosial yang sesuai dengan rencana. Akselerasi sistem pembayaran non tunai didukung oleh peningkatan transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Normalisasi pola konsumsi masyarakat Sumatera Utara juga tercermin pada perkembangan arus kas. Secara keseluruhan, aliran uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mencatatkan *net inflow* sebesar Rp3,7 triliun. Lebih lanjut, layanan kegiatan usaha penukaran valas (KUPVA) semakin meningkat seiring perbaikan mobilitas antar negara. Sejalan dengan itu, transaksi transfer dana melalui PTD BB terus menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan aktivitas remitansi secara konsisten.

ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan perekonomian domestik. Di sisi ketenagakerjaan,

serapan tenaga kerja meningkat seiring dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 menjadi 5,89% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,16%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,53% pada bulan Agustus 2022 menjadi 71,06% pada bulan Agustus 2023. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 8,15% dibanding September 2022 yang sebesar 8,33%. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahatan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Adapun dari sisi ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara untuk keseluruhan tahun 2023 diperkirakan tetap kuat dengan kecenderungan bias atas pada rentang 4,3-5,1% (yoy). Permintaan dan daya beli masyarakat yang meningkat tercermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti: i) perlambatan ekonomi global yang diiringi dengan tertahannya permintaan ekspor dan koreksi harga komoditas unggulan Sumatera Utara; ii) pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respon dari ketatnya pasar tenaga kerja; serta iii) ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. **Selanjutnya, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya** dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ pada tahun 2023.



Foto : Candi Bahal, Padang Lawas, Sumatera Utara
Sumber : Shutterstock



Bab I

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,94% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan termoderasi terutama berasal dari pelemahan kinerja ekspor seiring dengan menurunnya harga komoditas global dan menurunnya konsumsi pemerintah akibat kontraksi pada komponen belanja pegawai. Kontraksi belanja pegawai seiring dengan pasca pembayaran gaji ke-13 pada triwulan sebelumnya dan kecenderungan pemerintah daerah untuk *wait and see* menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Ekspor mengalami kontraksi seiring dengan harga komoditas utama Sumut di pasar internasional yang tertekan. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat akibat pembelian properti hingga akhir 2023 yang ditunjukkan oleh pertumbuhan KPR. Selanjutnya, kinerja investasi mengalami peningkatan seiring tumbuhnya belanja modal dan penjualan semen. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan, konstruksi, dan sektor-sektor jasa menopang pertumbuhan ekonomi Sumut di tengah termoderasinya pertumbuhan sektor pertanian dan industri. LU Pertanian mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor industri termoderasi yang tercermin dari SKDU Industri Pengolahan yang melambat seiring rebound ekonomi China yang tidak setinggi perkiraan berdampak pada tertahannya permintaan. Sektor perdagangan menunjukkan perbaikan kinerja seiring penguatan pembiayaan kredit perdagangan. Selain itu, pertumbuhan sektor konstruksi meningkat dengan akselerasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sektor jasa memiliki pertumbuhan relatif tinggi seiring dengan masih kuatnya permintaan domestik yang terefleksi pada pertumbuhan LU transportasi dan pergudangan, LU jasa lainnya, dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum.



1.1 PEREKONOMIAN SUMATERA TETAP TUMBUH KUAT DITOPANG OLEH PERBAIKAN PERMINTAAN DOMESTIK



PERTUMBUHAN EKONOMI % (yoy)

SUMATERA
UTARA

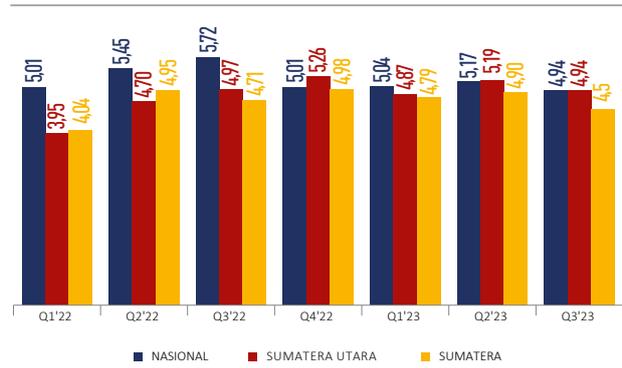
5,19 4,94

■ Triwulan II 2023 ■ Triwulan III 2023

NASIONAL

5,17 4,94

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tumbuh kuat dan lebih tinggi dari keseluruhan wilayah Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,94% (yoy) atau tumbuh kuat sama dengan nasional dan lebih tinggi dari Sumatera yang tumbuh sebesar 4,5% (yoy)– (Grafik 1.1). Masih kuatnya pertumbuhan Sumatera Utara terutama didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Konsumsi rumah tangga menguat didukung peningkatan pembelian rumah dan kendaraan bermotor dan aktivitas wisatawan mancanegara di masa libur sekolah di tengah berlangsungnya pemilu yang mendorong konsumsi Lembaga Non-Profit. Situasi ini tercermin dari peningkatan kredit konsumsi terutama untuk perumahan seiring dengan berlanjutnya insentif *loan-to-value/financing-to-value* (LTV/FTV) dari Bank Indonesia dan tetap kuatnya sektor perdagangan seiring dengan re-opening toko ritel yang sempat tutup sebagai dampak pandemi. Selanjutnya, pertumbuhan kinerja investasi Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) turut meningkat dengan tumbuhnya belanja modal yang tercermin dari meningkatnya penjualan semen.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1

Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan

Di tengah pertumbuhan kredit yang masih terbatas, investasi bangunan swasta juga mulai tumbuh tercermin dari penjualan semen yang tumbuh tinggi dan diperkirakan masih mengandalkan dana internal seiring penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) swasta dengan nilai besar.

Sementara itu, terdapat moderasi dari konsumsi pemerintah akibat penurunan belanja pegawai dan pelemahan kinerja ekspor seiring menurunnya harga komoditas global. Hal ini tercermin pada terkontraksinya konsumsi pemerintah sebesar 0,04% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,16% (yoy). Terkontraksinya konsumsi pemerintah pada triwulan laporan diakibatkan oleh berakhirnya proses pembayaran gaji ke-13 pada triwulan sebelumnya dan kecenderungan pemerintah daerah untuk *wait and see* dalam menyerap anggaran seiring dengan realokasi sebagian anggaran pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, net ekspor mengalami penurunan menjadi 0,0% (yoy) di triwulan laporan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,78% (yoy) sejalan dengan penurunan ekspor yang cukup dalam pada triwulan laporan. Perlambatan ekspor seiring dengan tekanan harga komoditas utama Sumut di pasar internasional yang masih berlanjut dan rebound ekonomi China yang tidak setinggi perkiraan.



Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara (%yoy)

	2021					2022					2023		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III
PDRB	-1,85	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94
PENGELUARAN													
Konsumsi Rumah Tangga	-4,55	5,20	3,09	3,45	1,69	3,58	4,64	4,63	5,33	4,55	5,69	6,20	6,42
Konsumsi LNPRT	-5,84	-2,71	-0,50	-1,25	-2,59	3,71	5,93	4,77	7,43	5,47	7,46	7,69	8,72
Konsumsi Pemerintah	0,03	2,99	3,57	6,82	3,46	-1,54	-0,21	-7,01	-4,23	-3,34	5,19	6,16	-0,04
PMTB	-3,96	6,27	6,07	5,82	3,47	5,95	2,12	3,90	3,36	3,80	3,37	3,36	5,28
Ekspor	7,99	19,65	19,19	13,71	15,09	12,61	11,16	12,32	9,77	11,44	2,45	-0,71	-5,11
Impor	4,70	25,51	25,40	18,30	18,34	15,94	9,61	11,64	8,29	11,20	2,06	-2,52	-6,97

Sumber: BPS (diolah)

Dari sisi lapangan usaha, secara tahunan, sektor perdagangan, konstruksi, dan jasa menopang pertumbuhan ekonomi Sumut di tengah termoderasinya pertumbuhan sektor pertanian dan industri seiring dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat yang semakin pulih pasca pandemi dan pembangunan infrastruktur strategis. Sektor perdagangan dan jasa menopang pertumbuhan ekonomi Sumut sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik dan pemulihan pariwisata. Hal ini terefleksikan pada pertumbuhan yang tinggi pada LU Perdagangan (6,06%, yoy), LU Transportasi dan Pergudangan (12,41%, yoy), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,19%, yoy), dan LU Jasa Lainnya (10,14%, yoy). Adapun LU Konstruksi mengalami akselerasi seiring dengan berlangsungnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol ruas Kisaran-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai, serta pembangunan Stadion Utama Sumut yang masih berjalan.

Sementara itu, pertumbuhan LU Pertanian mengalami perlambatan seiring dengan masih lemahnya harga komoditas di pasar internasional dan terkontraksinya produksi produk hortikultura dan peternakan pasca hari raya Idul Adha pada triwulan laporan. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor industri pengolahan termoderasi akibat permintaan luar negeri yang masih lemah, yang tercermin dari melemahnya hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) sektor industri pengolahan pada triwulan laporan.

1.2 DARI SISI PENGELUARAN, KONSUMSI RUMAH TANGGA MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI TETAP KUAT



KONSUMSI RUMAH TANGGA
%(YOY)

6,20

■ Triwulan II 2023

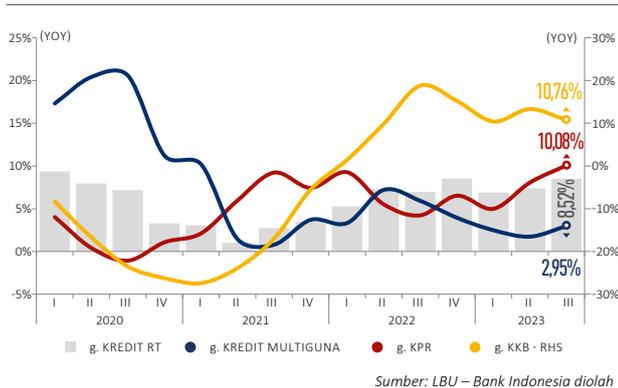


6,42

■ Triwulan III 2023

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2023 kembali menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, yakni tumbuh sebesar 6,42% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 6,20% (yoy). Menguatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan semakin pulihnya aktivitas perekonomian pasca pandemi, yang didukung dengan kebijakan insentif LTV/FTV yang diberikan Bank Indonesia.

Hal ini tercermin dari penyaluran kredit rumah tangga terpantau semakin tinggi pada triwulan laporan. Kredit rumah tangga tumbuh 8,52% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 7,39% (yoy) - (Grafik 1.2). Berdasarkan segmennya, pertumbuhan kredit rumah tangga tetap kuat baik dari jenis kredit KPR (10,08%, yoy), KKB (10,76%, yoy), dan Multiguna



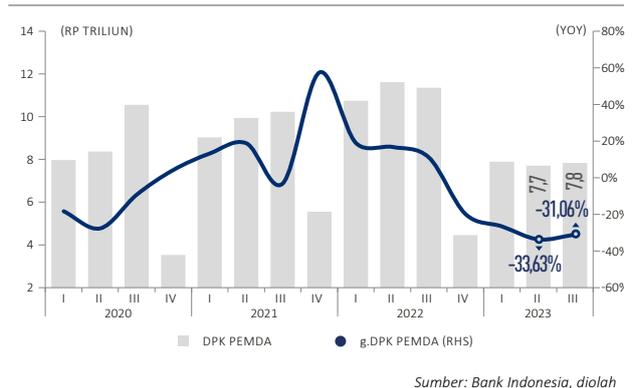
Grafik 1.2 Kredit Konsumsi

(2,95%, yoy). Menguatnya penyaluran kredit rumah tangga seiring dengan permintaan domestik yang tumbuh pada triwulan laporan.



Konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2023 berkontraksi. Pada triwulan III 2023, konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 0,04% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,16% (yoy). Kontraksinya pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2023 disebabkan oleh telah selesainya pembayaran gaji ke-13 pada 5 Juni 2023 (triwulan II 2023) dan faktor *wait and see* dari kebijakan pembatasan anggaran untuk persiapan Pemilu 2024.

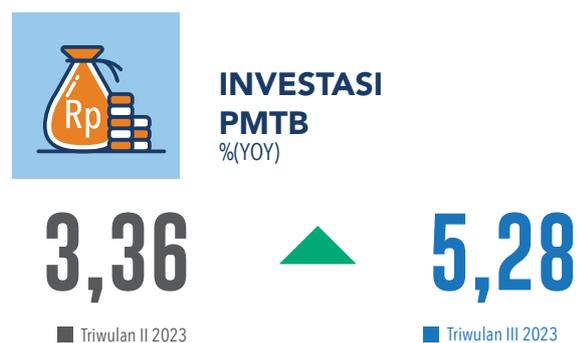
Walaupun terjadi perlambatan konsumsi Pemerintah pada periode laporan, realisasi belanja modal APBD Provinsi Sumatera Utara meningkat dibandingkan tahun lalu. Belanja modal hingga triwulan III 2023 mencapai 30,05%, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang terealisasi mencapai 19,15% - (Grafik 2.7). Belanja modal tersebut didorong



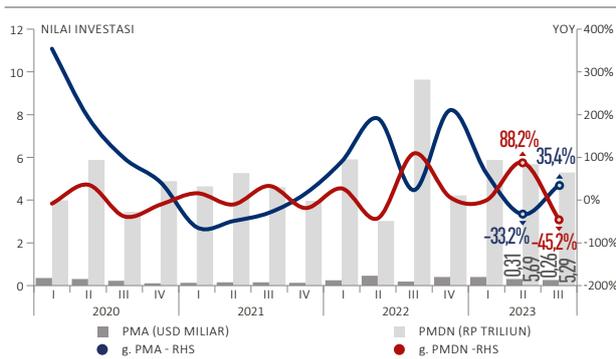
Grafik 1.3 Simpanan Pemerintah Daerah

peningkatan realisasi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan pada sektor konstruksi dan penjualan semen di periode laporan – (Grafik 1.6). Selain itu, Belanja Tidak Terduga juga mengalami peningkatan sebagai upaya pengendalian inflasi.

Selanjutnya, terkontraksinya laju konsumsi pemerintah mendorong pertumbuhan simpanan Pemerintah Daerah di Perbankan dari -33,63% (yoy) pada triwulan II 2023 menjadi -31,06% (yoy) pada periode laporan – (Grafik 1.3).



Kinerja investasi tumbuh meningkat seiring tumbuhnya belanja modal. Kinerja investasi PMTB tumbuh sebesar 5,28% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,36% (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan



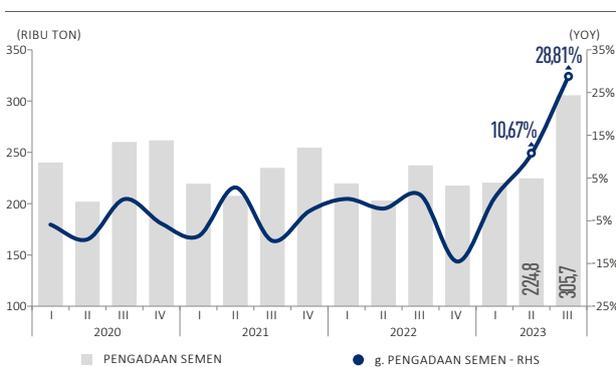
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah

Grafik 1.4 Realisasi Investasi

triwulan sebelumnya - (Grafik 1.4). Terkait PMA, sektor Listrik, Gas, dan Air serta industri-industri pengolahan menjadi sektor utama investasi di Sumatera Utara dengan pangsa mencapai 34% - (Grafik 1.5).

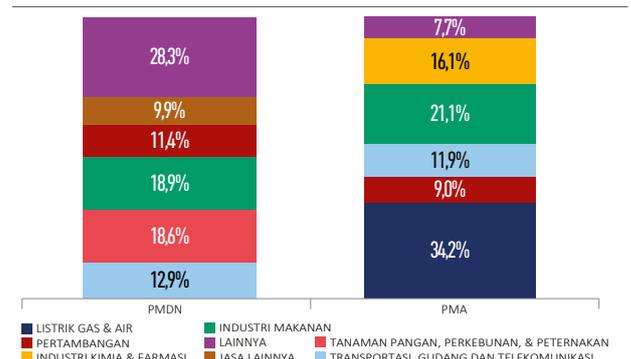
Di sisi lain, berlanjutnya proyek pembangunan oleh pemerintah seperti proyek strategis jalan Tol Trans Sumatera dan persiapan PON XIII yang terus berjalan mendorong pertumbuhan investasi PMTB. Hal ini sejalan dengan realisasi pengadaan semen yang tumbuh sebesar 28,81% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 10,67% (yoy) - (Grafik 1.6).

Peningkatan pertumbuhan investasi pada triwulan laporan ini diyakini tidak lepas dari efek reformasi struktural yang dilakukan pemerintah dalam bentuk



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.6 Pengadaan Semen



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah

Grafik 1.5 Pangsa Realisasi Investasi

“Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi” sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja di daerah untuk memperbaiki iklim investasi. Di sisi lain, faktor ketidakpastian politik di dalam negeri akibat dimulainya tahun politik menjelang Pemilihan Umum 2024 juga membuat investor baru memilih berhati-hati (*wait and see*) sebelum menanamkan modal yang menahan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi.

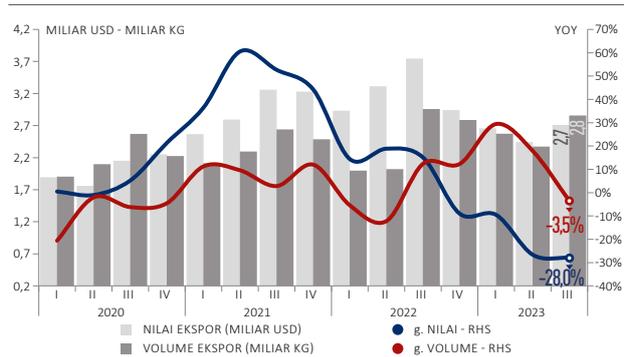
Sejalan dengan komitmen peningkatan investasi, Bank Indonesia bersama tim *North Sumatra Invest* (NSI) secara aktif terus mendorong promosi investasi di Sumatera Utara. Pada triwulan laporan, NSI menyelenggarakan NSI Gathering dan NSI Promotion Forum. Acara terdiri atas pembekalan konsultasi publik bagi kabupaten/kota, pelaksanaan konsultasi ke Bappenas dan BKPM, serta promosi investasi ke KADIN Pusat oleh proyek eksisting.

Selanjutnya, hasil penjarangan pada kedua acara ini akan ditindaklanjuti pada akhir tahun dengan penyelenggaraan NSI Day di Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan proyek investasi dan perdagangan strategis Sumut, sebagai wadah pertemuan para investor baik asing maupun domestik, dan mendorong sektor investasi pariwisata dan perdagangan Sumut.



Komponen Ekspor mengalami pelemahan sejalan dengan menurunnya permintaan negara tujuan ekspor. Selain itu tren penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dan karet yang masih berlanjut, serta adanya kekhawatiran global merupakan penyebab lain perlambatan ekspor – (Grafik 1.7). Kinerja ekspor tumbuh -5,11% (yoy), terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,71% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan kontraksi nilai ekspor yang tumbuh -28% (yoy), terkontraksi lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -26,6% (yoy). Volume ekspor juga mengalami kontraksi sebesar -3,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 17,9% (yoy) – (Grafik 1.8).

Perlambatan kinerja ekspor Sumatera Utara turut tecermin dari aktivitas bisnis dan industri negara mitra dagang utama yang berada di bawah zona ekspansif pada periode laporan. Aktivitas bisnis di negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Zona Eropa terpantau melambat, tecermin dari indikator *Purchasing Managers' Index* (PMI) *Manufacturing* negara tersebut yang berada di bawah level ekspansi pada triwulan III 2023. Di sisi lain, PMI



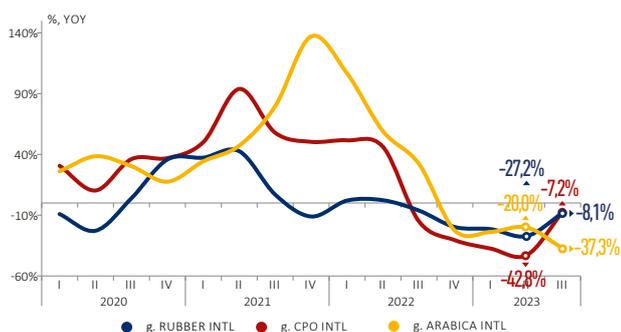
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.8 Nilai dan Volume Ekspor

India yang melanjutkan tren ekspansi sejak triwulan III 2020 dan PMI China dan Singapura yang kembali pada level ekspansi pada triwulan laporan mampu menahan perlambatan kinerja ekspor lebih dalam – (Grafik 1.9).

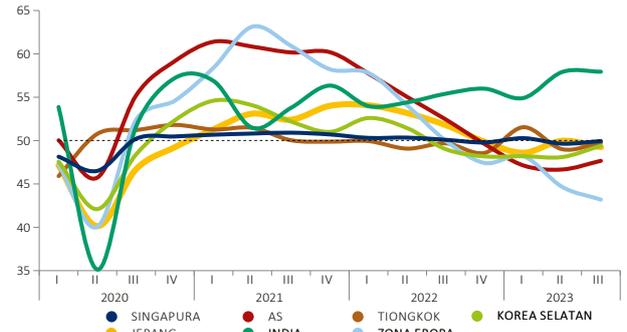
Dari sisi komoditas, CPO sebagai komoditas ekspor utama Sumatera Utara mengalami penurunan harga di pasar internasional. Pangsa ekspor CPO pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 35,4% dari total ekspor Sumatera Utara – (Grafik 1.10). Meningkatnya volume ekspor CPO pada triwulan laporan di tengah harga CPO di pasar internasional yang masih rendah pada triwulan laporan (Grafik 1.10) mendorong nilai ekspor CPO pada triwulan III 2023 yang tercatat sebesar USD942,1 juta, lebih tinggi dari nilai ekspor triwulan sebelumnya yang sebesar USD792,5 juta – (Grafik 1.11).

Ekspor komoditas karet juga mencatat pelemahan pada triwulan III 2023. Pada triwulan laporan, ekspor



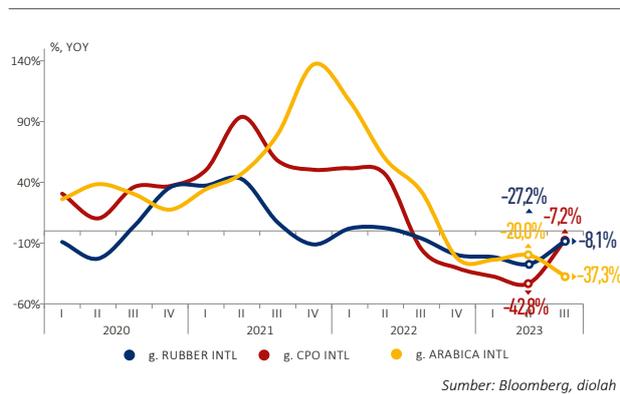
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.7 Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional



Sumber: Tradingeconomics, Bloomberg, diolah

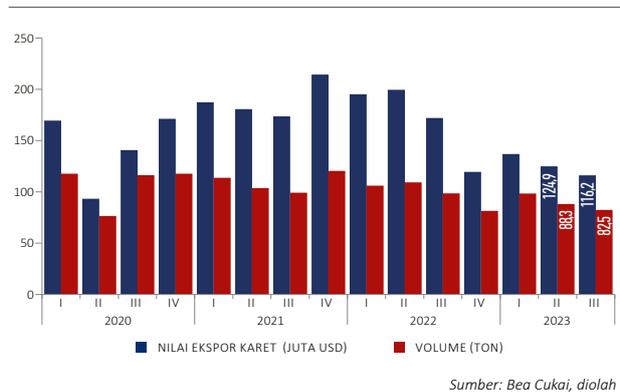
Grafik 1.9 Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing



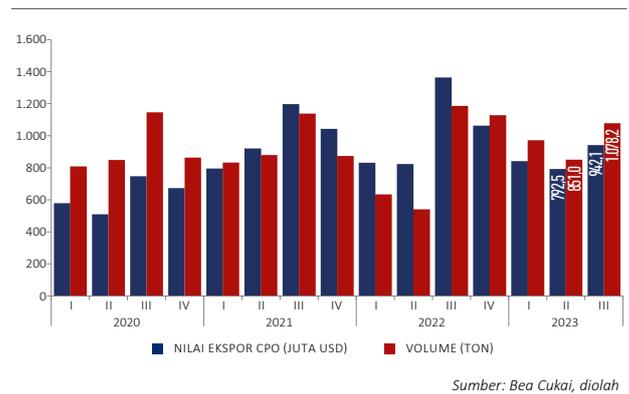
Grafik 1.10 Pertumbuhan Harga Komoditas Internasional

karet mencatatkan pangsa sebesar 4,4%. Nilai ekspor karet melambat sejalan dengan masih lemahnya harga karet di pasar internasional – (Grafik 1.10). Nilai ekspor karet tercatat sebesar USD116,2 juta, lebih rendah dari triwulan II 2023 sebesar USD124,9 juta. Selanjutnya, volume ekspor komoditas karet juga mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan aktivitas negara tujuan ekspor utama karet Sumatera Utara seperti Jepang dan Amerika Serikat, tecermin dari indeks PMI yang berada di bawah level ekspansi – (Grafik 1.9). Volume ekspor karet pada periode laporan sebesar 82,5 ton, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 88,3 ton – (Grafik 1.12).

Ekspor komoditas kopi turut mengalami penurunan pada triwulan III 2023. Pelemahan harga kopi di pasar internasional berdampak pada penurunan nilai ekspor kopi. Nilai ekspor kopi pada periode laporan tercatat sebesar USD52,2 juta, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD76,6 juta. Nilai ekspor yang menurun sejalan dengan volume ekspor

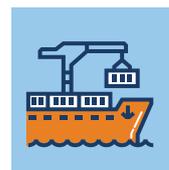


Grafik 1.12 Ekspor Karet



Grafik 1.11 Ekspor CPO

yang melemah seiring dengan permintaan negara tujuan yang masih lemah. Volume ekspor kopi pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 7,6 ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan volume ekspor sebesar 10,9 ton – (Grafik 1.13).



IMPOR
%(YOY)

-2,52

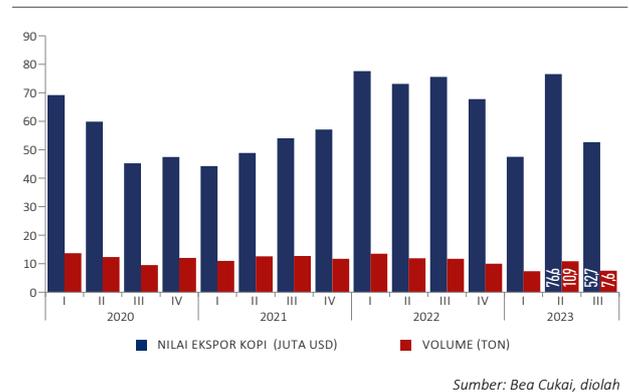
■ Triwulan II 2023



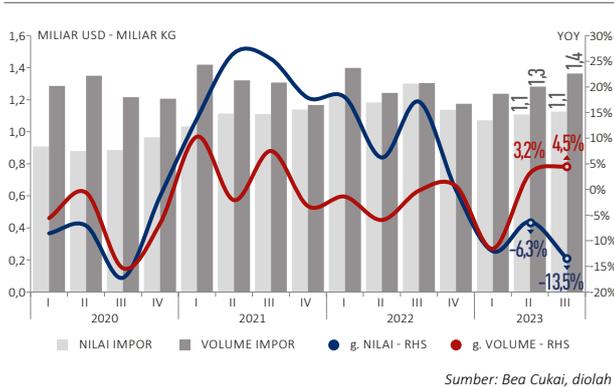
-6,97

■ Triwulan III 2023

Sejalan dengan kinerja ekspor, komponen impor triwulan III 2023 mengalami kontraksi. Kinerja impor Sumatera Utara triwulan III 2023 tumbuh -6,97% (yoy), terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -2,52% (yoy). Berdasarkan data



Grafik 1.13 Ekspor Kopi

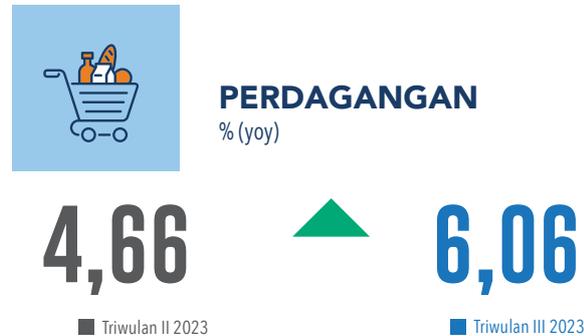


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.14 Nilai dan Volume Impor

dari Bea Cukai, nilai impor berkontraksi sebesar 13,5% (yoy) pada triwulan laporan, lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -6,3% (yoy). Penurunan nilai impor ini sejalan dengan penurunan nilai ekspor yang mengindikasikan aktivitas ekonomi yang termoderasi pada periode laporan pasca HBKN Idul Fitri, HBKN Idul Adha, dan libur sekolah. Adapun pertumbuhan volume impor pada triwulan laporan sebesar 4,5% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 3,2% (yoy) – (Grafik 1.14).

1.3 LAPANGAN USAHA PERDAGANGAN DAN LAPANGAN USAHA KONSTRUKSI TUMBUH LEBIH TINGGI

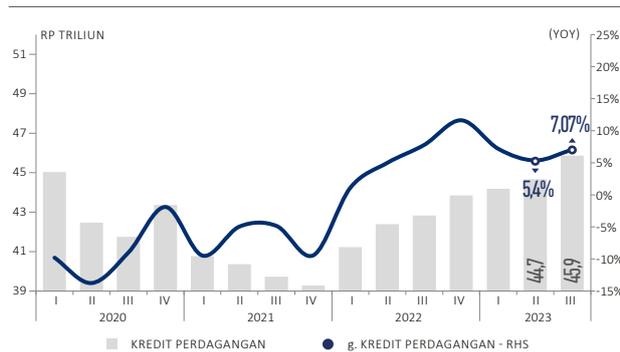


Kinerja LU Perdagangan pada triwulan III 2023 mengalami akselerasi sejalan dengan semakin pulihnya aktivitas perdagangan pascapandemi. Kinerja LU Perdagangan tumbuh sebesar 6,06% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,66% (yoy). Hal ini turut didukung oleh

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara

	2021					2022					2023		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III
PDRB	-1,85	4,95	3,67	3,81	2,61	3,95	4,70	4,97	5,26	4,73	4,87	5,19	4,94
LAPANGAN USAHA													
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	4,94	4,73	5,63	3,87	5,00	5,25	5,08	5,35	5,17	3,46	3,21	2,68
Pertambangan dan Penggalian	-3,14	2,89	4,21	3,90	1,92	2,20	2,83	2,54	3,15	2,69	3,78	3,49	3,37
Industri Pengolahan	1,04	2,36	1,26	1,07	1,43	0,68	2,04	2,66	2,53	1,98	2,61	4,08	3,92
Pengadaan Listrik, Gas	-0,24	5,48	4,69	9,86	4,93	7,27	7,67	4,53	0,15	4,81	0,73	2,21	2,36
Pengadaan Air	3,34	4,95	3,68	2,55	3,62	2,04	2,17	1,27	3,19	2,17	2,32	1,86	4,47
Konstruksi	-3,07	4,98	3,93	3,09	2,18	2,50	2,80	2,82	3,30	2,86	5,49	5,56	6,81
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,21	6,87	4,84	5,21	3,62	5,82	6,70	6,79	6,92	6,56	5,56	4,66	6,06
Transportasi dan Pergudangan	-18,30	5,94	-0,40	1,72	-3,63	6,16	12,10	16,28	16,02	12,69	15,64	12,29	12,41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-15,11	6,49	4,13	4,17	-0,81	4,06	6,62	8,04	9,79	7,16	9,12	9,21	11,19
Informasi dan Komunikasi	4,64	6,86	7,12	7,36	6,51	7,38	7,59	7,62	7,78	7,60	7,76	7,80	7,82
Jasa Keuangan	1,53	7,87	8,43	0,33	4,46	7,54	1,35	1,07	5,43	3,81	1,60	7,57	7,68
Jasa Perantara Keuangan	5,87	11,00	12,11	0,41	7,21	9,83	0,44	0,02	6,19	4,06	0,00	0,04	7,37
Real Estate	0,52	3,70	2,89	2,89	2,50	3,11	4,59	4,60	5,75	4,52	6,66	4,74	1,85
Jasa Perusahaan	-8,81	3,59	2,67	2,72	-0,14	6,57	8,25	9,96	10,22	8,77	11,35	8,83	3,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,14	6,47	-0,05	3,03	2,08	-0,44	-0,14	-0,12	-2,22	-0,74	0,67	8,95	-2,36
Jasa Pendidikan	0,36	4,70	3,28	3,88	3,05	3,86	4,52	5,86	6,20	5,13	7,16	8,78	7,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,34	0,50	3,79	5,41	0,25	7,78	7,87	2,80	1,29	4,82	3,59	6,00	7,33
Jasa lainnya	-6,49	5,45	3,80	3,63	1,43	5,21	7,63	9,98	11,61	8,65	9,69	10,22	10,14

Sumber: BPS (diolah)

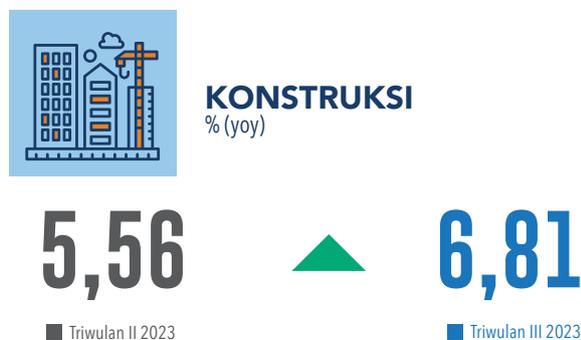


Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

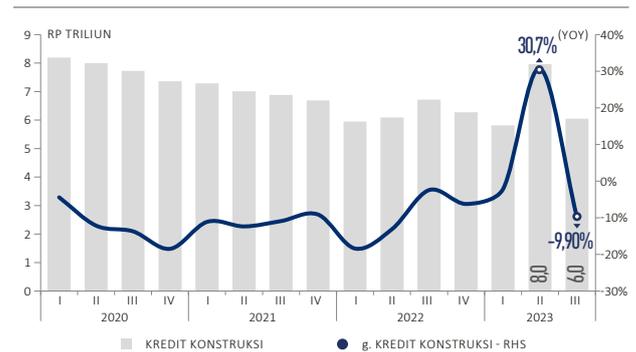
Grafik 1.15 Kredit Perdagangan

konsumsi masyarakat yang masih tumbuh kuat pada periode laporan seiring libur sekolah dan tahun ajaran baru.

Akselerasi LU Perdagangan tercermin dari peningkatan pembiayaan perbankan pada sektor yang sama. Penyaluran kredit perdagangan pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 7,07% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,4% (yoy) – (Grafik 1.15).



LU Konstruksi terpantau turut mengalami akselerasi pada triwulan III 2023 didorong oleh terus berjalannya proyek infrastruktur daerah. Pertumbuhan LU konstruksi tercatat 6,81% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,56% (yoy) seiring dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan



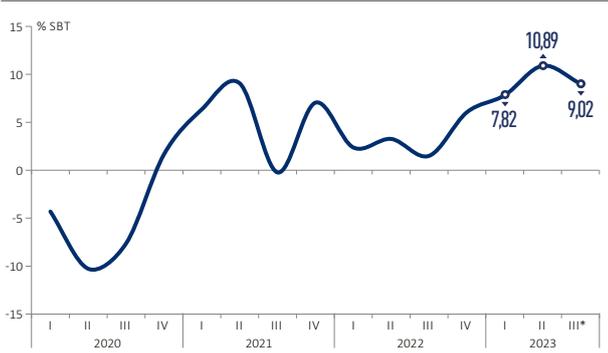
Sumber: LBU - Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.16 Kredit Konstruksi

jalan tol ruas Kisaran-Tebing Tinggi (selesai 16,8 km) dan Medan-Binjai (selesai 28,8 km) yang ditargetkan selesai di 2023, serta pembangunan jalan nasional yang terealisasi sepanjang 1.290,88 km senilai Rp463,26 (49,58%). Selain itu, pembangunan PSN kereta api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung sepanjang 21,5 km dengan nilai proyek Rp750 miliar telah selesai pada September 2023.

Akselerasi belanja Pemerintah juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya seiring dengan berlanjutnya pembangunan *venue* pendukung PON XIII Aceh-Sumut 2024, seperti pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara (*multi-years*) dengan pagu Rp72,56 miliar yang telah terealisasi. Akselerasi pembangunan ini sejalan dengan realisasi pengadaan semen yang tumbuh sebesar 28,81% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 10,67% (yoy) - (Grafik 1.6).

Di sisi lain, laju kredit perbankan ke LU Konstruksi yang berkontraksi 9,90% (yoy) di triwulan III 2023 menahan pertumbuhan sektor konstruksi yang lebih tinggi. Kondisi ini cukup berbeda dibanding triwulan sebelumnya dimana pembiayaan perbankan ke LU Konstruksi tumbuh 30,7% (yoy) – (Grafik 1.16).



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.17 Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Industri Pengolahan



**INDUSTRI
PENGOLAHAN**
% (yoy)

4,08

■ Triwulan II 2023



3,92

■ Triwulan III 2023

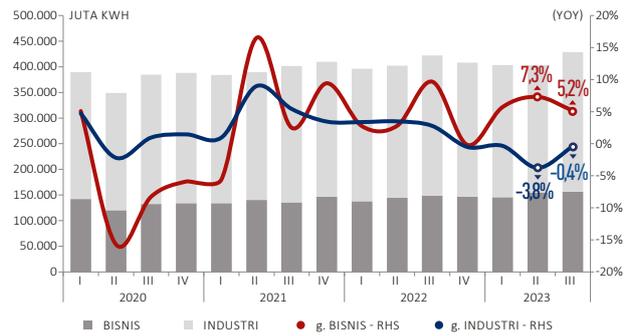
Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan termoderasi yang dipengaruhi melemahnya permintaan ekspor. LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,92% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,08% (yoy). Penurunan kinerja LU Industri Pengolahan sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha yang menurun pada periode laporan – (Grafik 1.17) dan melemahnya aktivitas impor – (Grafik 1.14).

Penurunan kinerja industri pengolahan merupakan imbas dari penurunan permintaan eksternal akibat eskalasi ketidakpastian global. Hal ini tecermin dari kinerja ekspor yang melambat dan indeks PMI negara



Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.19 Kredit Industri Pengolahan



Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.18 Konsumsi Listrik Industri

mitra dagang yang sebagian besar berada di bawah zona ekspansif.

Meski demikian, konsumsi listrik sektor industri mengalami kenaikan, di mana pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar -3,8% (yoy) dan meningkat pada triwulan selanjutnya dengan pertumbuhan sebesar -0,4% (yoy) – (Grafik 1.18). Selain itu, pembiayaan perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2023 terpantau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Kredit perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2023 tumbuh -12,14% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar -22,1% (yoy) – (Grafik 1.19). Berdasarkan Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan (Bank Indonesia, September 2023), kebutuhan pembiayaan korporasi meningkat terutama untuk keperluan aktivitas operasional, membayar kewajiban jatuh tempo, dan mendukung aktivitas investasi.



PERTANIAN
% (yoy)

3,21

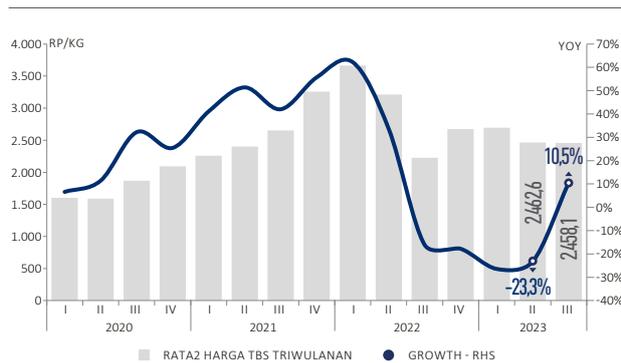
■ Triwulan II 2023



2,68

■ Triwulan III 2023

Di sisi lain, perkembangan kinerja LU Pertanian melambat dampak penurunan harga komoditas perkebunan dan gabah. Kinerja LU Pertanian pada triwulan III 2023 tumbuh 2,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 1.20 Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit

sebesar 3,21% (yoy). Harga komoditas ekspor seperti CPO dan karet masih relatif rendah sebagai dampak melemahnya permintaan global – (Grafik 1.10). Hal ini sejalan dengan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS), tecermin dari rata-rata harga TBS triwulan III 2023 sebesar Rp2.458,1 per kilogram, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar Rp2.462,6 per kilogram – (Grafik 1.20). Namun di sisi lain, harga TBS pada triwulan laporan masih tumbuh 10,5% (yoy) akibat harga TBS yang turun cukup dalam pada triwulan III 2022.

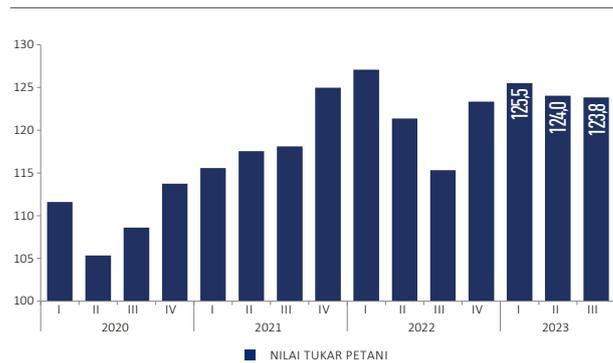
Penurunan harga komoditas perkebunan yang sejalan dengan penurunan harga, yang selanjutnya berdampak pada perlambatan pada Nilai Tukar Petani (NTP). NTP pada triwulan III 2023 sebesar 123,8, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 124 – (Grafik 1.21).

Selain itu, berdasarkan Laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) produksi tanaman hortikultura



Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.22 Kredit Pertanian



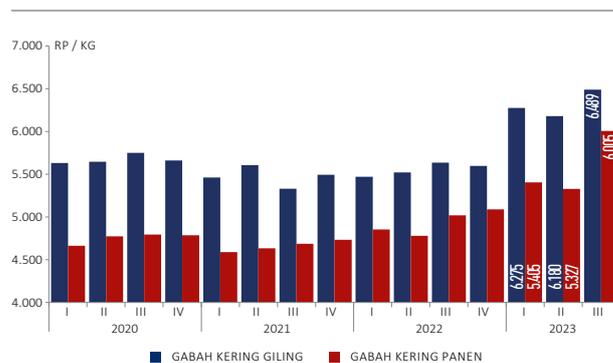
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.21 Nilai Tukar Petani

tahunan dan semusim mengalami kontraksi pada triwulan III 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Komoditas peternakan seperti ayam, telur, sapi, dan kambing turut mengalami penurunan produksi pada triwulan laporan seiring telah berakhirnya HBKN Idul Adha.

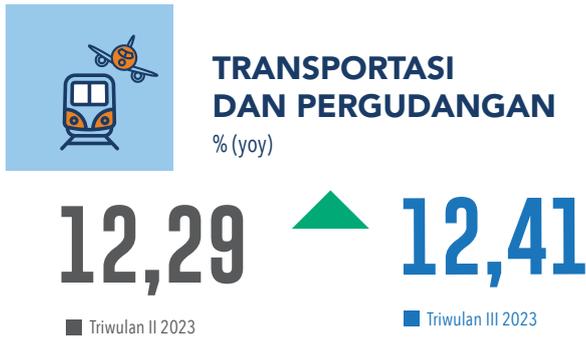
Kinerja pembiayaan LU pertanian juga mengalami kontraksi lebih dalam pada periode laporan. Pertumbuhan kredit pertanian pada triwulan III 2023 mengalami kontraksi menjadi sebesar -5,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -4,0% (yoy) – (Grafik 1.22). Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi pembiayaan perbankan pada LU Pertanian yang cukup tinggi dari Rp47,3 triliun di triwulan II 2023 menjadi Rp43,4 triliun di triwulan laporan.

Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan LU Pertanian dapat tertahan oleh peningkatan harga gabah, baik harga gabah kering giling maupun gabah kering panen pada periode laporan – (Grafik 1.23).



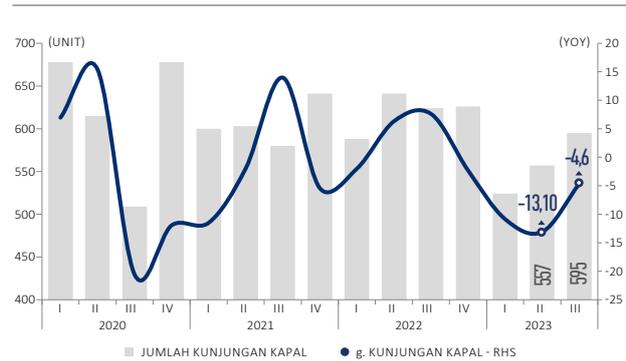
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.23 Perkembangan Harga Gabah



Peningkatan aktivitas perdagangan juga mendorong peningkatan aktivitas transportasi dan logistik pada triwulan laporan. Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh lebih tinggi pada triwulan III 2023 sebesar 12,41% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 12,29% (yoy). Akselerasi kinerja transportasi dan pergudangan sejalan dengan pertumbuhan jumlah kunjungan kapal pada periode laporan sebesar -4,6% (yoy), lebih baik dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 13,1% – (Grafik 1.24).

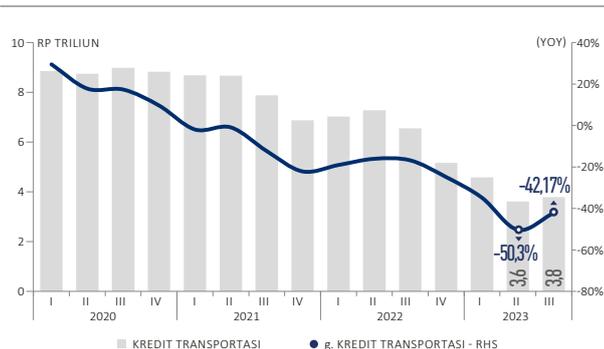
Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit kepada debitur usaha di LU Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan pemulihan. Pertumbuhan kinerja kredit transportasi pada triwulan III 2023 sebesar -42,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar -50,3% (yoy) – (Grafik 1.25).



Sumber: BPS, diolah

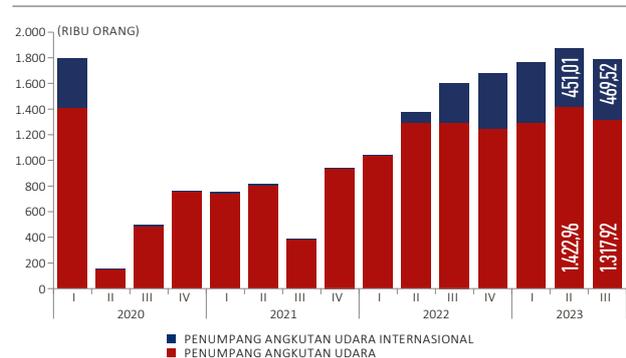
Grafik 1.24 Jumlah Kunjungan Kapal

Di sisi lain, pasca fenomena Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan libur sekolah yang serentak jatuh pada triwulan II 2023, mobilitas masyarakat mengalami penurunan yang tercermin dari penurunan jumlah penumpang angkutan udara domestik. Penumpang angkutan udara domestik turun menjadi 1,3 juta penumpang pada triwulan III 2023, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,4 juta penumpang – (Grafik 1.26). Penurunan jumlah penumpang menahan akselerasi kinerja LU Transportasi dan Pergudangan lebih tinggi pada periode laporan.



Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.25 Kredit Transportasi



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.26 Penumpang Angkutan Udara Domestik dan Internasional



Halaman ini sengaja dikosongkan



Sumber : Shutterstock

► BOKS 1

Kajian Peran Fiskal Daerah Dalam Mengatasi *Scarring Effect* Pada Sektor Pariwisata Sumatera Utara Khususnya Melalui Dukungan Pembangunan DPSP Danau Toba



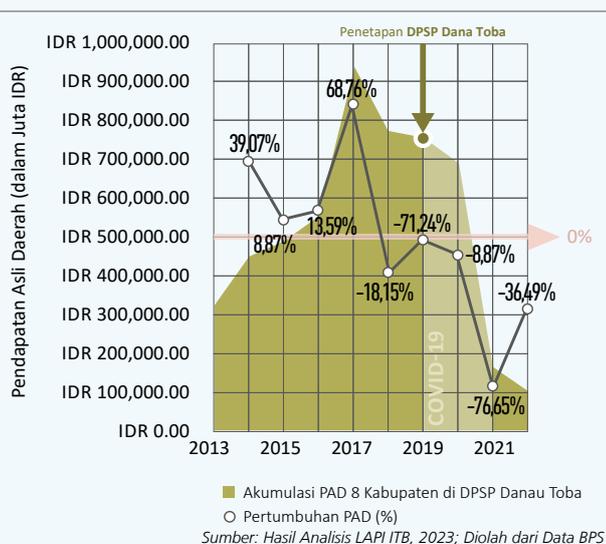
Dalam pengembangan kawasan pariwisata, Danau Toba termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. KSPN Danau Toba sebagai salah satu daerah yang kemudian menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif pembangunan ekonomi dalam memperoleh manfaat ekonomi baik antar lapisan masyarakat (*vertical inequity*) maupun antar daerah (*spatial inequity*) di DPSP Danau Toba. Pariwisata Danau Toba yang pada awalnya mengalami

pertumbuhan yang begitu pesat, saat ini mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan sebagai dampak pandemi COVID-19. Guncangan pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan *scarring effect* bagi pariwisata Danau Toba dari hulu ke hilir seperti mengakibatkan penurunan devisa, penurunan pendapatan daerah dan masyarakat, serta adanya peningkatan angka pengangguran baru.

Guna membantu mempercepat pemulihan sektor pariwisata Danau Toba dan mengatasi *scarring effect* pandemi, Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) pada tahun 2020 telah memberikan panduan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 yang terdapat di dalam dokumen *COVID-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package* yang termasuk didalamnya 3 (tiga) pilar utama membangun pariwisata kembali pasca pandemi yakni, pemulihan ekonomi (*economic recovery*), pemasaran dan promosi (*marketing and promotion*), serta penguatan kelembagaan (*institutional strengthening and building resilience*). Dengan demikian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) telah menyusun kajian Peran Fiskal Daerah Dalam Mengatasi *Scarring Effect* Pada Sektor Pariwisata Sumatera Utara Khususnya Melalui Dukungan Pembangunan DPSP Danau Toba yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan fiskal daerah yang digunakan dalam mendukung sektor pariwisata khususnya dalam lingkup DPSP Danau Toba pada masa pemulihan ekonomi; sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapabilitas pariwisata DPSP Danau Toba dalam berkreasi dan berinovasi, serta formulasi strategi ketahanan sektor pariwisata yang berkesinambungan.

A. Isu dan Permasalahan Danau Toba

Pengembangan DPSP Danau Toba dinilai masih belum optimal. Hal ini terbukti dari terus menurunnya besaran nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 8 Kabupaten di sekitar DPSP Danau Toba sejak pandemi COVID-19 yang berlangsung pada 2019-2022 lalu. Idealnya, pengembangan pariwisata di DPSP Danau Toba



Grafik B1.1 Grafik Pertumbuhan PAD 8 Kabupaten di Kawasan Danau Toba Selama Periode 2013-2022

mampu meningkatkan PAD yang berasal dari pajak restoran, hotel, dan tempat wisata, sehingga sejak 2021 (ketika pembatasan mobilitas masyarakat mulai dilonggarkan), pertumbuhan PAD seharusnya mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Detil gambaran pertumbuhan PAD 8 Kabupaten tersebut dapat dilihat pada **Grafik B1.1**.

Saat ini, walaupun pandemi COVID-19 sudah berakhir, nilai PAD dan jumlah kunjungan wisatawan di Danau Toba masih belum kunjung naik. Terdapat isu dan permasalahan yang perlu ditangani oleh pengelola Danau Toba maupun Pemerintah setempat untuk lebih memajukan pariwisata di Danau Toba. Isu yang teridentifikasi ini dilihat berdasarkan pendekatan 3A2P (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Promosi dan Pelaku Usaha). Adapun secara singkat, isu dan permasalahan yang teridentifikasi di Danau Toba mencakup:

- Aksesibilitas:** permasalahan aksesibilitas di Danau Toba saat ini adalah masih belum banyak transportasi umum yang menyediakan trayek angkutan menuju Danau Toba. Walaupun sudah terkoneksi secara fisik, namun pengunjung akan merasa kesulitan untuk berpindah dari satu tempat wisata ke wisata lainnya jika tidak memiliki/menyewa kendaraan pribadi;
- Amenitas:** terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan yaitu penyediaan fasilitas akomodasi

yang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan, penyediaan sarana fasilitas umum, minimnya tempat ibadah, kualitas air bersih yang belum memadai hingga permasalahan dari budaya dan kepercayaan masyarakat yang berakibat pada penyediaan amenities untuk makan dan minum menjadi minim;

- Atraksi:** atraksi yang saat ini berada di Danau Toba masih terbatas. Selain itu, jika dilihat pada kondisi saat ini, kunjungan wisatawan di Danau Toba masih sangat dipengaruhi oleh suatu *event*. Belum banyak atraksi wisata yang dapat memfasilitasi pengunjung untuk mengembangkan diri dan belajar budaya sekitar;
- Promosi:** *branding* untuk Danau Toba di Indonesia sejauh ini sudah sangat baik, bahkan dapat dikatakan setara dengan destinasi lainnya seperti Bali dan Labuan Bajo;
- Pelaku Usaha:** pelaku usaha di Danau Toba masih sangat minim seiring dengan minimnya investor. Selain itu, kurangnya ketegasan dari pengelola wisata terkait adanya retribusi berulang di kawasan wisata dan rendahnya kompetensi masyarakat lokal terkait industri pariwisata juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun pariwisata Danau Toba.

B. Implikasi Kebijakan

Beberapa isu utama yang terdapat di Danau Toba berdasarkan kerangka 3A2P di atas adalah permasalahan yang perlu diatasi. Adapun selanjutnya, *breakdown* terkait isu permasalahan di atas tercantum pada **Tabel B2.1**. Implikasi dari strategi yang dapat diterapkan di Danau Toba untuk mengatasi isu dan permasalahan tersebut mencakup:

C. Dampak Kebijakan

Penerapan strategi kebijakan yang telah diusulkan sebelumnya tentu akan mengoptimalkan dampak pengembangan DPSP Danau Toba terhadap 8 Kabupaten di kawasan Danau Toba. Dari perhitungan yang telah dilakukan oleh LAPI ITB, penerapan seluruh strategi tersebut diperkirakan akan mampu mendatangkan tambahan kunjungan wisatawan

3A2P	Isu Permasalahan	Strategi
Aksesibilitas	Belum banyak transportasi umum yang menyediakan angkutan menuju Danau Toba (belum terkoneksi secara moda angkutan). Fasilitas dari akomodasi di sekitar Danau Toba tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan.	Penyediaan transportasi yang terpadu mulai dari feeder hingga transportasi utama. Penyediaan transportasi yang terpadu mulai dari feeder hingga transportasi utama. Peningkatan kapasitas akomodasi (hotel, resort, dan penginapan) serta standarisasi layanan dan harga.
	Penyediaan fasilitas umum seperti toilet, tempat ibadah hingga tempat makan di sekitar kawasan wisata masih sangat minim. Kualitas air bersih yang masih kurang di beberapa wilayah di kawasan Danau Toba. Budaya dan kepercayaan masyarakat setempat sedikit menyulitkan wisatawan Muslim untuk memastikan makanan/minuman yang dijual telah memenuhi syarat halal atau tidak.	Pemberian keringanan dan bahkan pembebasan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Peningkatan kapasitas dan kualitas air bersih serta penyediaan fasilitas toilet umum. Implementasi pariwisata ramah Muslim.
Atraksi	Dependensi tinggi jumlah trafik/kunjungan wisatawan terhadap event yang diselenggarakan di kawasan Danau Toba. Belum banyak atraksi yang memfasilitasi pengembangan diri atau mempelajari budaya setempat.	Membuat atraksi di Danau Toba lebih menarik dan tertata sehingga tidak bergantung pada event yang diadakan di Danau Toba. Implementasi <i>creative tourism</i> yang lebih luas.
Promosi	Akses informasi terkait atraksi atau destinasi wisata di Danau Toba masih minim.	Promosi pariwisata di pintu masuk menuju Danau Toba (Bandara Internasional).
Pelaku Usaha	Adanya pungutan liar di beberapa titik menuju atraksi wisata seperti di Desa Wisata Tomok dan Air Terjun Sipiso-Piso yang menunjukkan bahwa belum adanya pengelolaan yang terstruktur dari setiap atraksi wisata. Kompetensi SDM lokal di industri pariwisata masih rendah.	Pengaturan retribusi.
	Selain kurangnya sistem pengelolaan di kawasan wisata, adanya oknum dari kelompok masyarakat yang ingin ikut merasakan manfaat adanya atraksi wisata di wilayah mereka adalah penyebab maraknya pungutan liar di Danau Toba. Masalah konflik lahan dengan masyarakat adat.	Peraturan BUMDes. Penawaran kerjasama konsesi lahan dalam jangka waktu maksimal 15 tahun. Selama periode konsesi tersebut, masyarakat adat dilibatkan dalam operasional perusahaan pengelola obyek wisata. Ganti rugi atas lahan dibarengi dengan pemberian hak kepemilikan perusahaan pengelola obyek wisata. Kerjasama pengelolaan aset desa wisata.

Sumber: Hasil Analisis LAPI ITB, 2023

hingga mencapai lebih dari 2 juta kunjungan dalam 5 (lima) tahun ke depan (2023-2027) dengan dampak ekonomi yang tercipta diperkirakan sebesar Rp44,01 triliun. Dari tambahan kunjungan wisatawan tersebut, industri pariwisata di kawasan Danau Toba akan dapat tumbuh dan mampu menciptakan total 102 ribu lapangan pekerjaan. Selanjutnya, jika menghitung dampaknya bagi perekonomian, implementasi seluruh strategi yang diusulkan di 5 tahun pertama (2023-2027) akan berkontribusi pada peningkatan sebesar 6,90% perekonomian 8 Kabupaten di kawasan Danau Toba, peningkatan sebesar 0,88% perekonomian Sumatera Utara, dan peningkatan sebesar 0,04% perekonomian Nasional. Detil aproksimasi dampak dari penerapan strategi-strategi yang diusulkan untuk pengembangan DPSP Danau Toba dapat dilihat pada **Tabel B1.2**.

	Indikator Dampak	Satuan	Angka Akumulasi 2023-2027
1	Proyeksi Tambahan Wisatawan yang Berkunjung	Wisatawan	2.229.349
2	Proyeksi Dampak Ekonomi	Miliar Rp	Rp 44.010,030
3	Proyeksi Penciptaan Lapangan Kerja	Lapangan Kerja	102.340
4	Kontribusi Terhadap PDRB 8 Kabupaten	%	6,90%
5	Kontribusi Terhadap PDRB Sumatera Utara	%	0,88%
6	Kontribusi Terhadap PDB Nasional	%	0,04%

Sumber: Hasil Analisis LAPI ITB, 2023



Sumber : Shutterstock

▶ BOKS 2

Analisis Dinamika Uang Elektronik dan Inflasi Regional: Studi Kasus Wilayah Sumatera dengan Model Data Panel Dinamis

Salah satu aspek penting dalam strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi saat ini adalah melalui digitalisasi. Perkembangan teknologi dan informasi dapat mendorong terjadinya inovasi dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia termasuk dalam hal sistem pembayaran. Digitalisasi pada sistem pembayaran secara bertahap dapat mendorong transformasi digital yang memudahkan alur pembayaran dan meningkatkan inklusivitas. Salah satu bentuk digitalisasi sistem pembayaran yang saat ini semakin marak penggunaannya adalah uang elektronik. Uang elektronik digunakan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk transaksi jual-beli, transportasi umum, hingga perjalanan pribadi menggunakan tol.

Dengan semakin meningkatnya adopsi uang elektronik dan perubahan menuju *cashless society* terutama setelah pandemi membuat semakin signifikannya uang elektronik bagi perekonomian Indonesia begitu pula Sumatera.

Sejalan dengan visi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral digital terdepan dan komitmen untuk memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, maka penting untuk mengetahui bagaimana dampak dari uang elektronik terhadap inflasi karena semakin signifikannya penggunaan uang elektronik yang dapat berdampak pada efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan juga kemudahan mengakses uang elektronik untuk meningkatkan inklusi keuangan yang berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas inovasi digitalisasi ekonomi dan keuangan terhadap pengendalian inflasi melalui dampak uang elektronik terhadap inflasi regional dengan studi kasus di wilayah Sumatera.

A. Hubungan Uang Elektronik dan Inflasi Regional

Tabel di atas menyediakan hasil analisis regresi dari hubungan antara uang elektronik dan inflasi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persentase transaksi uang elektronik terhadap PDRB secara konsisten meningkat dari triwulan III 2018 hingga triwulan 1 2023. Peningkatan ini juga diikuti oleh penurunan variasi nilai transaksi uang elektronik antar daerah yang berarti transformasi uang elektronik terjadi secara seragam di wilayah Sumatera. Pada periode yang sama, terjadi fluktuasi pada inflasi antar waktu dan variasi inflasi yang cukup besar antarprovinsi. Hasil analisis regresi menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara nilai transaksi uang elektronik dan inflasi regional. Hubungan antara keduanya signifikan pada tingkat signifikansi 1% sehingga dapat dikatakan ada korelasi yang cukup kuat di antara keduanya. Temuan ini tetap konsisten saat menambahkan variabel kontrol

Tabel B2.1 Hasil Analisis Regresi Hubungan Antara Uang Elektronik dan Inflasi di Wilayah Sumatera pada Periode 2018-2023

	Inflasi		
	(1)	(2)	(3)
Inf t-1	0,584*** (0,120)	0,691*** (0,126)	0,787*** (0,157)
ln(UEperPDRB)	0,723*** (0,237)	0,963** (0,259)	0,956*** (0,285)
ln(UEperPDRB) t-1		0,0156 (0,0790)	-0,157 (0,137)
ln(UEperPDRB) t-2			0,196 (0,126)
gdrpg	0,0156 (0,0139)	0,0110 (0,0119)	0,00830 (0,0109)
BIRategrowth	-0,0348*** (0,00776)	-0,0462*** (0,00882)	-0,0536*** (0,0113)
Credgrowth t-2	0,0262* (0,0147)	0,0360** (0,0145)	0,0433*** (0,0160)
tpfgrowth t-2	0,0173** (0,00431)	0,0143*** (0,00387)	0,0143*** (0,00316)
PADgrowth	0,000318 (0,000950)	0,000161 (0,000938)	-0,000116 (0,000966)
tptgrowth	-0,000869 (0,00733)	0,00453 (0,00688)	0,00437 (0,00913)
Triwulan 2	-0,164 (0,248)	-0,248 (0,244)	-0,252 (0,245)
Triwulan 3	-0,290*** (0,144)	-0,376** (0,137)	-0,354** (0,156)
Triwulan 4	-0,418** (0,173)	-0,318 (0,206)	-0,268 (0,227)
Konstanta	0,327** (0,132)	0,185 (0,135)	0,131 (0,149)
N	131	125	119

Catatan: Standard errors robust dalam kurung. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$

pertumbuhan PDRB, BI7DRR, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kredit, Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Asli Daerah, dan tren triwulanan.

Meningkatnya penggunaan uang elektronik telah memacu perkembangan teknologi finansial yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa uang tunai. Layanan pembayaran dengan uang elektronik mempermudah individu untuk bertransaksi secara efisien dan cepat, dengan dorongan tambahan berupa potongan harga atau *cashback* yang ditawarkan oleh banyak pedagang saat pembayaran dengan uang elektronik. Manfaat yang ditawarkan oleh uang elektronik semakin terasa dampaknya selama pandemi COVID-19 di Indonesia, ketika masyarakat terbatas dalam aktivitas di luar rumah. Banyak orang beralih dari pembayaran konvensional

ke pembayaran elektronik karena pertimbangan kesehatan dan kenyamanan. Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa nilai transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp786,35 triliun pada tahun 2021, meningkat sebesar Rp281,39 triliun (55,73%) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp504,96 triliun. Di wilayah Sumatera sendiri, terjadi peningkatan drastis sebesar 324% dalam transaksi menggunakan uang elektronik selama pandemi.

Tentunya, temuan ini memiliki implikasi yang cukup penting mengingat pesatnya pertumbuhan adopsi uang elektronik oleh masyarakat Indonesia. Di balik berbagai keuntungan yang disediakan oleh uang elektronik seperti memudahkan transaksi dan menyediakan akses keuangan terhadap kelompok *unbanked*, uang elektronik juga memiliki implikasi terhadap stabilitas harga. Pada penelitian ini, ditemukan uang elektronik dapat meningkatkan harga dan mempengaruhi stabilitas harga. Diperlukan bauran kebijakan yang tepat untuk tetap memperluas akses uang elektronik dan meredam kemungkinan adanya kenaikan tingkat harga.

Hasil yang diperoleh juga mendukung kerangka pemikiran yang disajikan pada tinjauan literatur. Secara teori, terdapat beberapa saluran yang dapat menjelaskan hubungan positif antara uang elektronik dan inflasi. Saluran pertama adalah peningkatan perputaran uang (*velocity of money*) yang disebabkan oleh kemudahan transaksi dengan uang elektronik. Teori kuantitas uang menjelaskan bahwa peningkatan perputaran uang dapat menimbulkan inflasi *demand-pull*. Saluran kedua adalah ketika uang elektronik menggantikan peredaran mata uang, menurunkan *currency ratio*, meningkatkan pengganda uang, meningkatkan peredaran uang, meningkatkan permintaan agregat, dan menimbulkan inflasi *demand-pull*. Saluran ketiga adalah ketika uang elektronik menggantikan peredaran mata uang di perekonomian sehingga mengurangi akurasi M1 sebagai pengukuran uang beredar, melemahkan kemampuan Bank Sentral atas peredaran uang, meningkatkan permintaan agregat, dan menimbulkan inflasi *demand-pull*.

Saluran terakhir adalah ketika perubahan biaya yang terkait dengan infrastruktur uang elektronik, seperti komisi transaksi dapat mempengaruhi harga-harga yang diterapkan oleh produsen dan penjual sehingga menimbulkan inflasi *cost-push*.

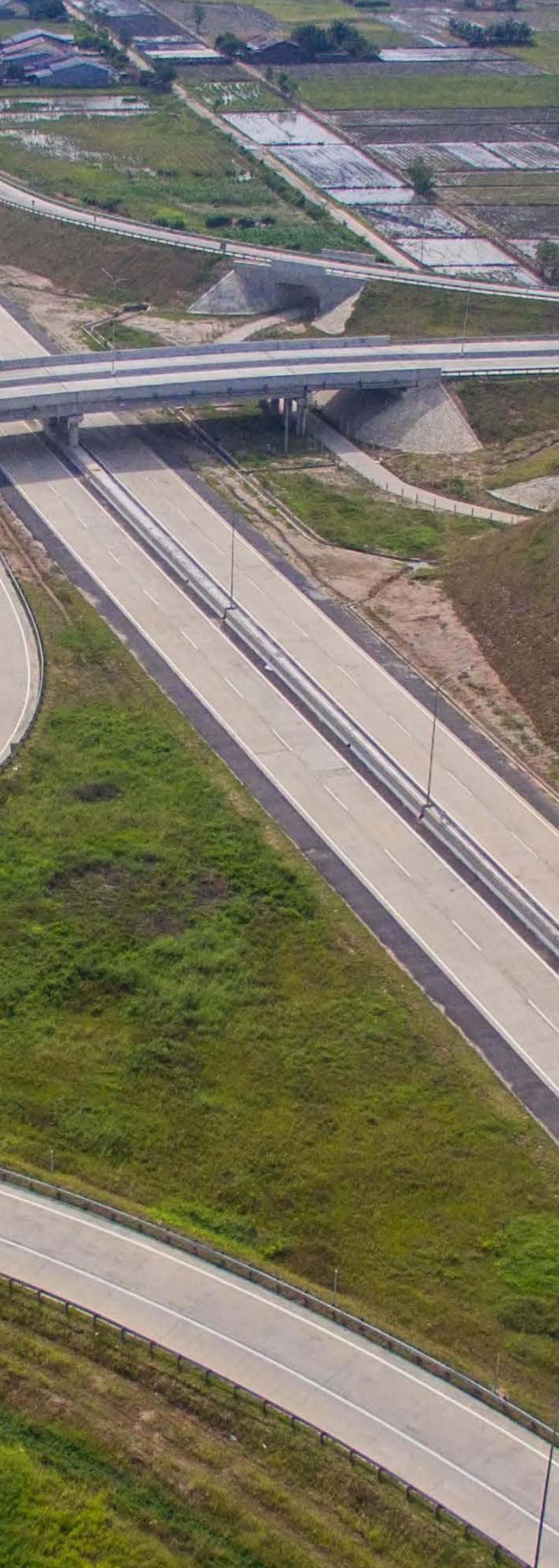
B. Implikasi Kebijakan

Saran dan rekomendasi yang diusulkan kepada pihak terkait pengembangan uang elektronik dalam rangka mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) perlu berkolaborasi dalam membuat regulasi mengenai perlindungan konsumen dan privasi data melalui *regulatory technology* dan *supervisory technology* yang tertuang dalam visi keempat Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Standarisasi uang elektronik (*Electronic Money Indonesian Standard*) yang berbasis *chip* juga bisa dilakukan untuk memudahkan transaksi agar masyarakat dapat menggunakan uang elektronik tanpa terbatas pada mesin spesifik saja.
2. Pemerintah Provinsi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus gencar dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait uang elektronik agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, serta mendorong penggunaannya untuk kegiatan produktif daripada konsumtif yang sejalan dengan visi kedua SPI 2025. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang uang elektronik maka dapat meningkatkan adopsi, transaksi, dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi hingga inklusi keuangan.
3. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu bekerjasama untuk meningkatkan infrastruktur digital penunjang uang elektronik agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna di Sumatera terutama di daerah yang "unbankable" dan mengintegrasikan *fintech* dengan perbankan yang sejalan dengan visi ketiga SPI 2025. Pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu bersinergi dalam menerapkan kebijakan fiskal dan moneter dalam upaya pengendalian inflasi.
4. Bank Indonesia (BI) perlu mengawasi uang elektronik sebagai indikator dalam bauran kebijakan dengan memanfaatkan *big data* dan *Artificial Intelligence* dengan mengumpulkan dan menganalisis data transaksi uang elektronik secara *real-time* untuk memprediksi dan mengendalikan inflasi. Selain itu, BI dapat mempertimbangkan pengembangan CBDC yang diedarkan dan dikontrol oleh bank sentral dengan memanfaatkan *private blockchain* sehingga memudahkan pengawasan transaksi dan penawaran uang serta memudahkan transformasi digital bagi masyarakat yang sesuai dengan visi pertama SPI 2025.
5. Selain didorong untuk terus meningkatkan kualitas tampilan *platform*, penerbit uang elektronik harus mematuhi aturan yang berlaku dengan prinsip resiprokalitas yang tertuang dalam visi kelima SPI 2025, serta disarankan untuk terus berinovasi dalam hal layanan seperti menyediakan keamanan dan perlindungan data, kemudahan dalam pengisian ulang, fitur untuk bisa menarik kembali saldo, dan biaya administrasi yang rendah.



Foto : Jalan Tol Kualanamu-Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Sumber : Shutterstock

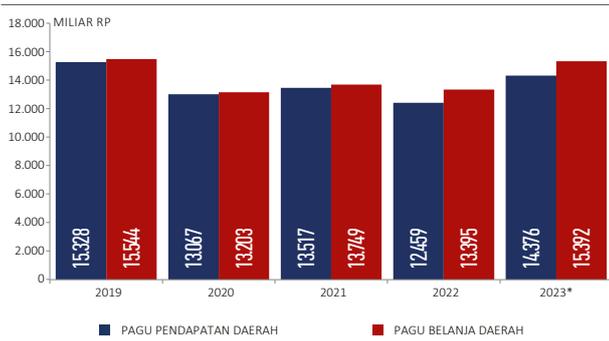


Bab II

Keuangan Pemerintah

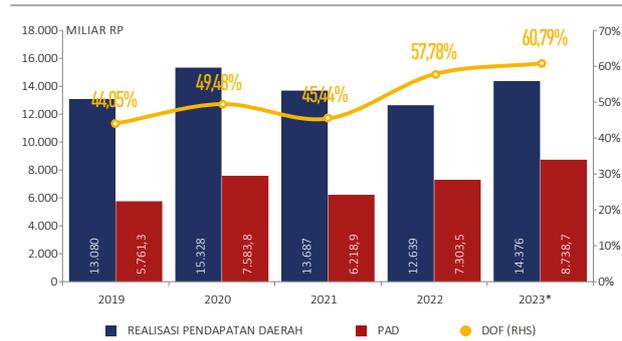
Realisasi dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami penurunan dari sisi pendapatan, namun meningkat dari sisi penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada triwulan III-2023 sebesar 63,38% dari pagu, lebih rendah dari realisasi triwulan III-2022 sebesar 69,52% yang berasal dari penurunan realisasi di hampir seluruh komponen pendapatan. Di sisi lain, realisasi belanja APBD pada triwulan III-2023 mengalami peningkatan didorong oleh optimalisasi penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2023 tercatat meningkat hingga 9,24% (yoy) dari tahun 2022. Sementara itu, realisasinya pada triwulan III-2023 adalah sebesar 62,93%, yang mana mengalami penurunan dibandingkan triwulan III-2022 sebesar 63,14%. Penurunan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja kecuali Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial.





Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.1 Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara



Sumber: Survei Statistik Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.2 Derajat Otonomi Fiskal Sumatera Utara

2.1 GAMBARAN UMUM P-APBD 2023

Postur Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023 Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Struktur pendapatan mengalami peningkatan sebesar 15,38% (yoy) dari Rp12,46 triliun pada P-APBD 2022 menjadi Rp14,38 triliun. Struktur belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 14,91% (yoy) dari Rp13,40 triliun menjadi Rp15,39 triliun – (Grafik 2.1).

Peningkatan struktur pendapatan hingga 15,38% (yoy) dalam P-APBD 2023 tersebut didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD mengalami peningkatan pagu sebesar 20,35% (yoy), sedangkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 8,51% (yoy) dari P-APBD 2022. Pemerintah Daerah meyakini pendapatan pajak dan retribusi daerah di tahun 2023 akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi dan melonggarnya restriksi mobilitas melalui pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara resmi. Sementara itu, pagu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4,83% (yoy).

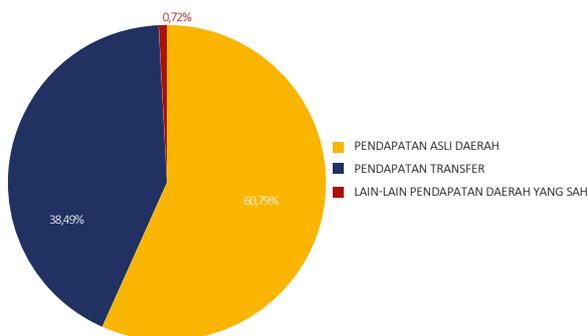
Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja pada APBD 2023 Provinsi Sumatera Utara turut mengalami peningkatan. Peningkatan pagu belanja didorong

oleh peningkatan pagu belanja modal dan belanja tak terduga. Pagu belanja modal meningkat sebesar 61,95% (yoy) dari P-APBD 2022. Sementara itu, pagu belanja tak terduga meningkat sebesar 369,80% (yoy) dari P-APBD 2022. Di sisi lain, komponen belanja operasi dan belanja transfer mengalami penurunan dari pagu anggaran tahun sebelumnya.

2.1.1 Pagu Anggaran Pendapatan APBD 2023 Mengalami Peningkatan

Peningkatan penerimaan yang berasal dari PAD mencerminkan optimisme perekonomian yang kembali pulih di Provinsi Sumatera Utara. Proyeksi kenaikan penerimaan PAD dalam APBD 2023 didorong oleh optimisme Pemerintah Daerah terhadap kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah seiring telah dibukanya sektor-sektor utama dan pelonggaran restriksi mobilitas melalui pencabutan PPKM secara resmi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan mengurangi insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha secara bertahap. Hal ini juga tercermin dari kenaikan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)¹ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 57,78% pada realisasi APBD 2022 menjadi 58,38% pada pagu P-APBD 2023 – (Grafik 2.2). Selanjutnya, pendapatan transfer juga mencatat peningkatan sebesar 8,51% pada pagu pendapatan P-APBD 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turut mengalami peningkatan pada P-APBD 2023 sebesar 4,83% (yoy). Pada tahun 2023, pagu pendapatan didominasi oleh

¹ DOF merupakan skala interval derajat desentralisasi fiskal untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).



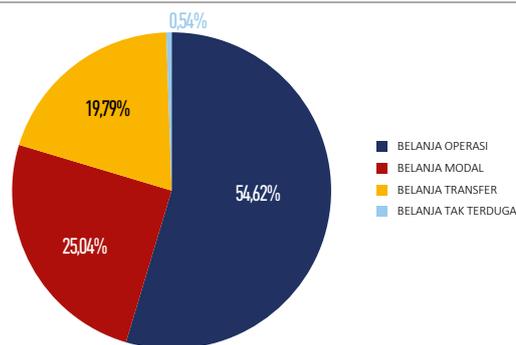
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.3 Proporsi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

komponen PAD sebesar 60,79%, sehingga upaya mengoptimalkan potensi PAD menjadi salah satu kunci dari kinerja penerimaan daerah - (Grafik 2.3).

2.1.2 Sejalan dengan Pagu Pendapatan, Pagu Anggaran Belanja APBD 2023 Turut Mengalami Peningkatan

Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja P-APBD 2023 di Provinsi Sumatera Utara turut mengalami peningkatan hingga 14,91% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2022. Pagu anggaran belanja APBD 2023 naik menjadi Rp15,39 triliun dari Rp13,40 triliun. Adapun peningkatan pagu belanja berasal dari komponen belanja modal dan belanja tak terduga. Hal ini sejalan dengan program *multiyears* pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp2,7 triliun yang masih berlangsung dan berakhir di tahun 2023. Selain pembangunan jalan dan jembatan, pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah memprioritaskan pembangunan sarana prasarana kesehatan serta sarana prasarana olahraga pendukung penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024. Kemudian penyelenggaraan Pemilu mendatang membutuhkan dana yang besar karena mencakup biaya persiapan mulai dari pendaftaran calon hingga logistik untuk proses pemilihan dan penghitungan suara. Lebih lanjut, komponen belanja modal memiliki pangsa terbesar kedua dari pagu anggaran belanja APBD 2023, yakni Rp3,27 triliun atau setara dengan 22,88% dari total pagu anggaran belanja. Dengan demikian, peningkatan pagu belanja modal turut berdampak



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.4 Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara

pada peningkatan pagu belanja APBD 2023 secara umum. Adapun peningkatan pagu belanja tak terduga diperkirakan seiring dengan asumsi potensi risiko bencana di tahun 2023 dan anggaran untuk pengendalian inflasi di Sumatera Utara - (Grafik 2.4).

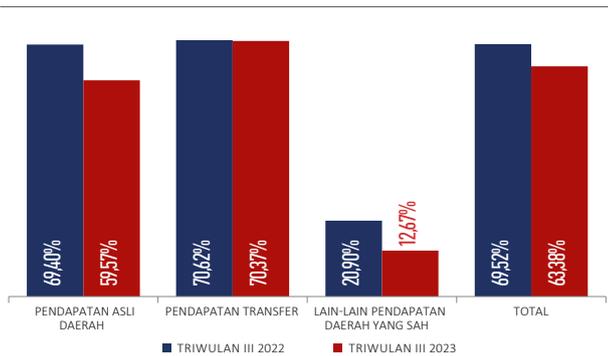
Sementara itu, pagu komponen belanja operasi juga turut mengalami peningkatan, yakni sebesar 5,81% pada P-APBD 2023. Peningkatan pagu belanja operasi pada P-APBD 2023 secara umum disebabkan oleh peningkatan pagu Belanja Operasi Lainnya yang terdiri dari Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Namun, di sisi lain terdapat penurunan pagu salah satu komponen Belanja Operasi, yaitu Belanja Barang dan Jasa, dalam rangka efisiensi terhadap belanja yang bersifat rutin atau pendukung dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran belanja Pemerintah.

2.2 REALISASI APBD TRIWULAN III-2023

2.2.1 Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III-2023 Menurun

Realisasi pendapatan pada triwulan III-2023 mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan III-2023, realisasi pendapatan mencapai 63,38%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan di triwulan III-2022 sebesar 69,52%. Penurunan realisasi pendapatan tersebut didorong oleh menurunnya realisasi di hampir seluruh komponen pendapatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun





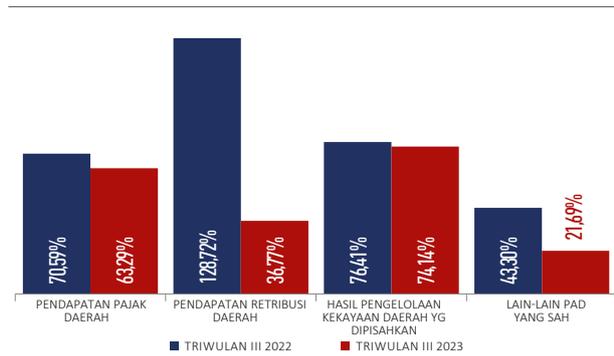
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.5 Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III-2023

sebelumnya – (Grafik 2.5). Adapun andil penurunan terbesar terjadi di komponen PAD yang menurun dari 69,40% pada triwulan III-2022 menjadi 59,57% pada triwulan III-2023.

Penurunan realisasi penerimaan PAD triwulan III-2023 tersebut didorong oleh penurunan realisasi dari seluruh sub komponen PAD dan seiring dengan peningkatan pagu PAD pada tahun 2023. – (Grafik 2.6). Namun, jika dilihat secara nominal, realisasi PAD pada triwulan III-2023 tercatat sebesar Rp5,21 triliun, lebih tinggi dari triwulan III-2022 sebesar Rp5,04 triliun. Pajak Daerah secara nominal tumbuh menjadi sebesar Rp4,70 triliun pada triwulan III-2023 yang didorong oleh peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Pajak Kendaraan Bermotor dan dari aktivitas konsumsi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh secara nominal menjadi Rp299,39 miliar pada triwulan-III 2023 karena ada peningkatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah atas penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD.

Selain itu, realisasi Pendapatan Transfer yang merupakan kontributor tertinggi penerimaan daerah triwulan III-2023 setelah PAD mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan transfer pada triwulan III-2023 terealisasi sebesar 70,37% dari pagu P-APBD 2023, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 70,62% –



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.6 Realisasi PAD Triwulan III-2023

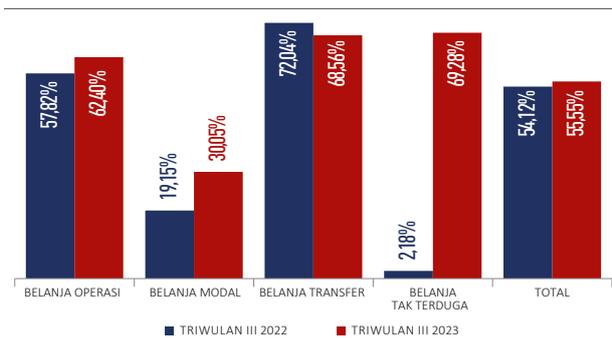
(Grafik 2.5). Realisasi yang turun ini sejalan dengan berkurangnya alokasi program PEN penanganan COVID-19 seiring dengan periode pascapandemi.

Lebih lanjut, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup komponen Pendapatan Hibah dan komponen Pendapatan Lainnya, juga tercatat menurun. Realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada triwulan III-2023 sebesar Rp13,19 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp20,74 miliar – (Tabel 2.1). Hal ini utamanya disebabkan oleh kinerja Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan Jasa Giro.

2.2.2 Di Sisi Lain, Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Triwulan III-2023 Tercatat Meningkat

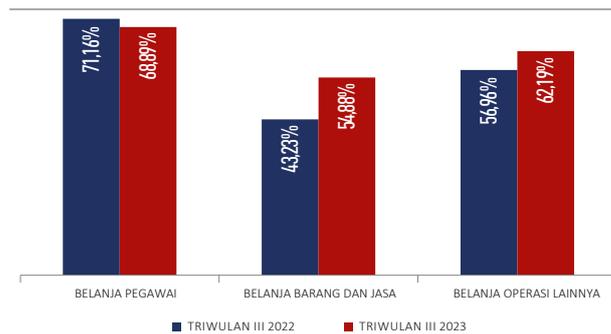
Realisasi belanja APBD triwulan III-2023 mengalami peningkatan, didorong oleh kenaikan penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja – (Grafik 2.7). Pada triwulan III-2023, realisasi belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp8,55 triliun atau 55,55% dari pagu belanja tahun 2023, lebih tinggi dari realisasi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,25 triliun atau terserap 54,12% dari pagu P-APBD 2022.

Realisasi Belanja Operasi pada triwulan III-2023 menunjukkan peningkatan dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III-2023, realisasi belanja operasi mencapai Rp5,25 triliun atau setara dengan 62,40% dari pagu P-APBD 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.7 Realisasi Belanja APBD Triwulan III-2023



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.8 Realisasi Belanja Operasi Triwulan III-2023

realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dirinci per komponen, peningkatan persentase realisasi belanja operasi didorong oleh peningkatan pada komponen Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Operasi Lainnya – (Grafik 2.8). Hal ini berkaitan dengan belanja dalam rangka persiapan Pemilu yang berdampak pada peningkatan belanja hibah dan belanja bantuan keuangan.

Peningkatan realisasi belanja modal didorong oleh komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui proses pengadaan atau *tender* yang dilakukan lebih cepat dari prakiraan sebelumnya. Realisasi belanja modal pada triwulan III-2023 mencapai Rp1,16 triliun atau sebesar 30,05% dari

pagu belanja modal, lebih tinggi dari triwulan yang sama tahun 2022 sebesar Rp455,81 miliar atau sebesar 19,15% dari pagu belanja modal P-APBD 2022. Realisasi terbesar belanja modal pada triwulan III-2023 berasal dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, serta pemeliharaan gedung dan bangunan. Kemudian, peningkatan Belanja Modal ini juga terkait dengan pembangunan *venue* untuk pelaksanaan PON XXI Tahun 2024.

Lebih lanjut, realisasi pos Belanja Tak Terduga triwulan III-2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan III-2022 dengan realisasi sebesar 69,28%. Pos belanja tak terduga terserap secara signifikan diduga sebagai dampak dari pelaksanaan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2022			2023			% Pertumbuhan Pagu	% Pertumbuhan Realisasi
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw III (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw III (miliar Rp)	% Realisasi		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.261,20	5.039,36	69,40%	8.738,71	5.205,37	59,57%	20,35%	3,29%
Pendapatan Pajak Daerah	6.420,26	4.532,35	70,59%	7.427,34	4.700,67	63,29%	15,69%	3,71%
Pendapatan Retribusi Daerah	29,80	38,36	128,72%	55,89	20,55	36,77%	87,55%	-46,42%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	354,76	271,06	76,41%	403,81	299,39	74,14%	13,83%	10,45%
Lain-lain PAD yang Sah	456,38	197,60	43,30%	851,68	184,76	21,69%	86,62%	-6,50%
PENDAPATAN TRANSFER	5.098,88	3.601,07	70,62%	5.532,89	3.893,25	70,37%	8,51%	8,11%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.098,88	3.601,07	70,62%	5.532,89	3.893,25	70,37%	8,51%	8,11%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99,27	20,74	20,90%	104,06	13,19	12,67%	4,83%	-36,44%
Pendapatan Hibah	74,27	8,61	11,59%	79,06	4,38	5,54%	6,45%	-49,08%
Pendapatan Lainnya	25,00	12,14	48,56%	25,00	8,80	35,22%	0,00%	-27,47%
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PENDAPATAN	12.459,35	8.661,17	69,52%	14.375,66	9.111,81	63,38%	15,38%	-8,82%

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2022			2023			% Pertumbuhan Pagu	% Pertumbuhan Realisasi
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw III (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw III (miliar Rp)	% Realisasi		
BELANJA OPERASI	7.945,95	4.594,64	57,82%	8.407,46	5.245,98	62,40%	5,81%	14,18%
Belanja Pegawai	3.511,84	2.499,17	71,16%	3.548,32	2.444,35	68,89%	1,04%	-2,19%
Belanja Barang dan Jasa	3.133,32	1.354,55	43,23%	3.013,61	1.653,98	54,88%	-3,82%	22,11%
Belanja Operasi Lainnya	1.300,78	740,92	56,96%	1.845,53	1.147,65	62,19%	41,88%	54,90%
BELANJA MODAL	2.380,29	455,81	19,15%	3.854,83	1.158,21	30,05%	61,95%	154,10%
BELANJA TRANSFER	3.051,10	2.198,14	72,04%	3.046,55	2.088,71	68,56%	-0,15%	-4,98%
BELANJA TAK TERDUGA	17,67	0,38	2,18%	82,99	57,50	69,28%	369,80%	14856,77%
TOTAL BELANJA	13.395,01	7.248,98	54,12%	15.391,84	8.550,41	55,55%	14,91%	17,95%

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

1 (F1H2O) dan Hari Pers Nasional yang dianggap sebagai keadaan mendesak dan belum dianggarkan pada APBD 2023 (Grafik 2.4).

Di sisi lain, realisasi Belanja Transfer menunjukkan penurunan. Realisasi belanja transfer pada triwulan III-2023 tercatat sebesar Rp2,09 triliun atau 68,56% dari pagu, sementara pada triwulan yang sama tahun sebelumnya realisasi belanja transfer mencapai sebesar Rp2,20 triliun atau 72,04% dari pagu. Hal ini dikarenakan adanya penurunan realisasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

2.3 Pagu Belanja APBN² untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Lebih Tinggi

Secara garis besar, pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023,

pagu belanja Pemerintah Pusat di Sumatera Utara meningkat sebesar 16,09% (yoy) dengan nominal sebesar Rp23,83 triliun, lebih tinggi dari pagu belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 sebesar Rp20,57 triliun. Untuk menghindari prinsip penghitungan ganda, realisasi APBN tidak memperhitungkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai bagian dari penerimaan APBD.

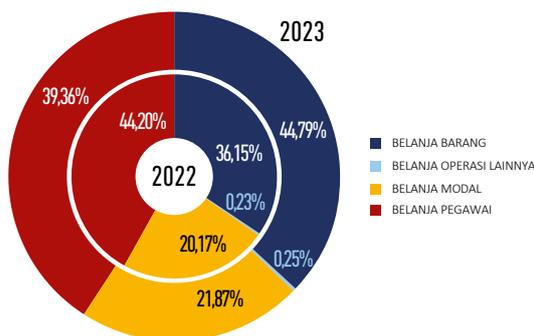
Komponen belanja barang dan belanja modal pada umumnya mendorong peningkatan pagu belanja APBN di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan persentase pangsa dari pagu, komponen belanja barang dan belanja modal memiliki pangsa yang cukup besar dalam pagu belanja APBN di Sumatera Utara yakni masing-masing sebesar 44,79% dan 21,87%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pagu kedua komponen belanja ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam mendorong peningkatan pagu belanja APBN di Sumatera Utara – (Grafik 2.9).

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Belanja (Tidak Termasuk TKDD)

URAIAN	2022			2023		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw II (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw II (miliar Rp)	% Realisasi
BELANJA OPERASI	16.575,80	10.875,63	65,61%	18.968,94	12.208,54	64,36%
Belanja Pegawai	9.092,44	6.638,21	73,01%	8.845,15	6.622,69	74,87%
Belanja Barang dan Jasa	7.436,46	4.196,22	56,43%	10.066,82	5.552,96	55,16%
Belanja Operasi Lainnya	46,90	41,20	87,84%	56,97	32,89	57,73%
BELANJA MODAL	46,90	22,54	48,06%	56,97	32,89	57,73%
BELANJA TAK TERDUGA	4.071,49	1.954,11	47,99%	5.062,79	2.124,86	41,97%
TOTAL	20.572,51	12.829,74	62,36%	24.031,73	14.333,40	59,64%

Sumber : DJPb Provinsi Sumatera Utara

2 tidak termasuk TKDD



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.9 Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara

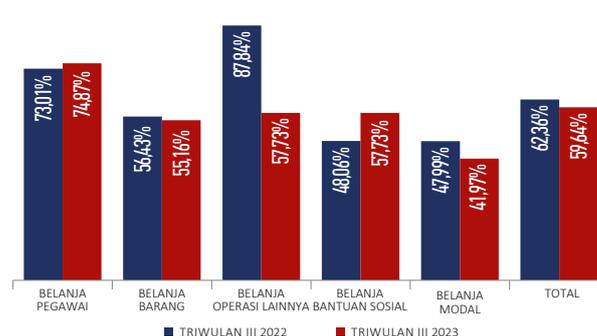
Sementara itu, pagu belanja pegawai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pagu belanja pegawai menurun sebesar -2,72% (yoy) menjadi Rp8,85 triliun dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp9,17 triliun.

2.4 REALISASI BELANJA APBN PADA TRIWULAN III-2023 MENGALAMI PENINGKATAN

Realisasi belanja APBN di Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja APBN pada triwulan berjalan tahun 2023 adalah sebesar 59,87% dari pagu, lebih rendah daripada triwulan III-2022 sebesar 62,87% dari pagu. Adapun penurunan realisasi belanja APBN terutama terjadi pada komponen Belanja Barang, Belanja Operasi Lainnya dan Belanja Modal – (Grafik 2.10).

Realisasi Belanja Barang pada triwulan III-2023 menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Barang tercatat 55,16% dari pagu, menurun dari triwulan III-2022 yang terealisasi sebesar 56,43%.

Realisasi Belanja Operasi Lainnya turut mengalami peningkatan pada triwulan III-2023. Realisasi Belanja Operasi Lainnya pada triwulan III-2023 sebesar 57,56% dari pagu atau setara dengan Rp32,89 miliar, lebih rendah dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 87,84% atau setara dengan Rp41,20 miliar.



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.10 Realisasi Belanja APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Belanja

Lebih lanjut, realisasi Belanja Modal tercatat mengalami penurunan seiring dengan peningkatan pagu belanja modal pada tahun 2023. Meskipun demikian, secara nominal, realisasi belanja modal pada triwulan III-2023 tercatat sebesar Rp2,12 triliun dari pagu, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,95 triliun dari pagu. Belanja modal ini terutama digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan bendungan Lau Simeme, Jalan Tol Trans-Sumatera, dan infrastruktur penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan, dan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Simalungun.

Di sisi lain, realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial, mengalami peningkatan pada triwulan III-2023. Realisasi Pegawai mencatat peningkatan dari 73,01% pada triwulan III-2022 menjadi 74,87% pada triwulan III-2023. Kemudian, Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan realisasi menjadi sebesar 57,73% pada triwulan III-2023 dari realisasi sebesar 48,06% pada triwulan III-2022 karena adanya percepatan realisasi untuk penyaluran perlindungan sosial dalam bentuk uang dari Kementerian Agama dan perlindungan sosial dalam bentuk barang dari Kementerian Sosial.





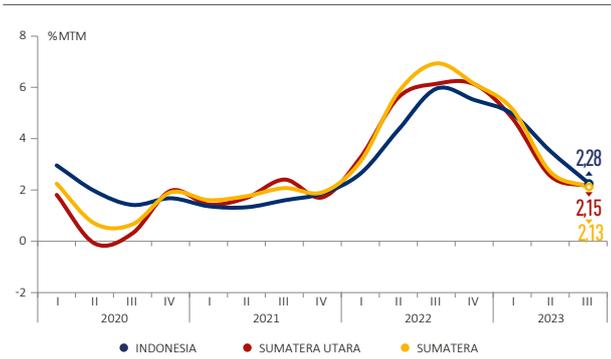


Bab III

Perkembangan Inflasi Daerah

Tekanan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami penurunan secara signifikan. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,55% (yoy) dan berada di rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar $3\% \pm 1\%$. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 2,28% (yoy), namun lebih tinggi dari inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera yang sebesar 2,13% (yoy) pada triwulan III-2023. Sumber tekanan inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Pendidikan. Adapun berdasarkan komoditas, inflasi triwulan III-2023 utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, rokok kretek filter, tomat, akademi/ perguruan tinggi, dan bawang putih. Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi beras seiring dengan kenaikan harga BBM yang meningkatkan biaya angkut komoditas beras. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi, serta berkurangnya produksi beras secara Nasional akibat fenomena El-Nino juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat dan bawang putih sejalan dengan terbatasnya produksi akibat belum masuknya musim panen dan terbatasnya impor bawang putih. Adapun peningkatan biaya akademi/ perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.





Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

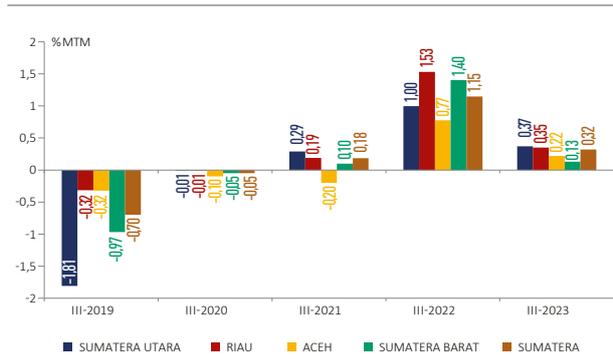
Grafik 3.1

Perkembangan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara, Nasional, dan Inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera

3.1 KINERJA INFLASI TRIWULAN III-2023

Secara tahunan, tekanan inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,55% (yoy). Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 2,28% (yoy), namun lebih tinggi dari inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera yang sebesar 2,13% (yoy) pada triwulan III-2023 – (Grafik 3.1). Adapun secara bulanan, inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mencatatkan inflasi sebesar 0,37% (mtm), berada di atas inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera dengan angka 0,32% (mtm) dan beberapa daerah lainnya seperti Riau (0,35%, mtm), Aceh (0,22%, mtm), dan Sumatera Barat (0,13%, mtm) – (Grafik 3.2).

Secara umum, inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara bersumber dari kenaikan harga yang terjadi di seluruh kelompok pengeluaran. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 1,23% (yoy) pada triwulan III-2023, diikuti oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan sumbangan



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Grafik 3.2

Perkembangan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara dan Daerah Lainnya

masing-masing sebesar 0,18% (yoy) dan 0,16% (yoy). Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, rokok kretek filter, tomat, akademi/ perguruan tinggi, dan bawang putih yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,65% (yoy), 0,26% (yoy), 0,18% (yoy), 0,13% (yoy), dan 0,10% (yoy) – (Tabel 3.1). Peningkatan harga beras disebabkan oleh kenaikan biaya produksi beras seiring dengan kenaikan harga BBM yang meningkatkan biaya angkut komoditas beras. Selain itu, tingginya harga pupuk, belum meratanya panen di wilayah produksi, serta berkurangnya produksi beras secara Nasional akibat fenomena El-Nino juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat dan bawang putih sejalan dengan terbatasnya produksi akibat belum masuknya musim panen dan terbatasnya impor bawang putih. Adapun peningkatan biaya akademi/ perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan ke level yang lebih tinggi akibat penurunan harga sejumlah komoditas. Meski demikian, tercatat tidak ada kelompok yang mengalami deflasi, namun kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami inflasi yang sangat rendah dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy). Sejumlah komoditas menunjukkan



Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan III-2023

Inflasi Triwulan III-2023					
Juli		Agustus		September	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
BENSIN	0,930	BENSIN	0,927	BERAS	0,645
BERAS	0,501	BERAS	0,569	ROKOK KRETEK FILTER	0,256
ROKOK KRETEK FILTER	0,272	ROKOK KRETEK FILTER	0,268	TOMAT	0,177
ANGKUTAN DALAM KOTA	0,194	ANGKUTAN DALAM KOTA	0,195	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0,128
DAGING AYAM RAS	0,166	BAWANG PUTIH	0,122	BAWANG PUTIH	0,099

Deflasi Triwulan III-2023					
Juli		Agustus		September	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
CABAI MERAH	-0,990	CABAI MERAH	-0,677	CABAI MERAH	-0,365
BAWANG MERAH	-0,281	BAWANG MERAH	-0,156	BAWANG MERAH	-0,165
CABAI RAWIT	-0,213	IKAN DENCIS	-0,138	DAGING BABI	-0,058
ANGKUTAN UDARA	-0,099	ANGKUTAN UDARA	-0,084	BUAH NAGA	-0,040
CABAI HIJAU	-0,092	CABAI HIJAU	-0,059	SABUN CAIR/CUCI PIRING	-0,033

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

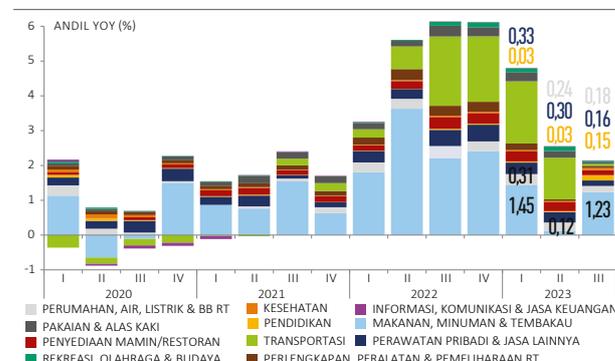
deflasi yang cukup dalam sehingga menahan tingkat inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara yang lebih tinggi secara keseluruhan. Komoditas dengan andil deflasi tertinggi antara lain cabai merah, bawang merah, daging babi, buah naga, dan sabun cair/cuci piring dengan andil deflasi masing-masing komoditas sebesar -0,37% (yoy), -0,17% (yoy), -0,06% (yoy), -0,04% (yoy), dan -0,03% (yoy). Penurunan harga komoditas hortikultura disebabkan oleh melimpahnya pasokan dari sentra produksi baik dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Utara.

Kenaikan harga beras disebabkan oleh kenaikan harga gabah baik di tingkat petani maupun penggilingan seiring dengan kenaikan biaya produksi petani. Penyesuaian harga BBM Pertamina dan tingginya harga pupuk juga turut berdampak pada peningkatan biaya produksi tersebut. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat dan bawang putih sejalan dengan terbatasnya produksi akibat belum masuknya musim panen dan terbatasnya impor bawang putih.

3.2 ANDIL INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Memberikan Andil Inflasi Terbesar

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi terbesar pada triwulan III-2023 sebesar 1,23% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas beras, rokok kretek filter, tomat, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar 0,64% (yoy), 0,26% (yoy), 0,18% (yoy), dan 0,10% (yoy).



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Grafik 3.3 Distribusi Andil Inflasi per Kelompok

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Memberikan Andil Inflasi Tertinggi Kedua

Pada triwulan III-2023, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mencatatkan andil inflasi sebesar 0,18% (yoy), merupakan tertinggi kedua setelah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Namun demikian, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menunjukkan penurunan andil inflasi dari 0,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 0,18% (yoy) pada triwulan III-2023.

Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok tersebut utamanya didorong oleh peningkatan harga pada komoditas sewa rumah dan kontrak rumah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08% (yoy) dan 0,06% (yoy). Kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah diperkirakan merupakan indikasi berlanjutnya ekspektasi pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemilik rumah, sehingga penyesuaian harga sewa rumah dan kontrak rumah yang tertunda selama pandemi dapat mulai dilaksanakan secara bertahap dan tetap berlangsung pada triwulan III-2023.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga Memberikan Andil Inflasi

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil inflasi sebesar 0,16% (yoy) pada triwulan III-2023, menurun -0,14% dari 0,30% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Secara komoditas, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya disumbang oleh kenaikan harga mie, ketupat/lontong sayur, dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,05% (yoy), 0,04% (yoy), dan 0,03% (yoy). Peningkatan harga ketiga komoditas tersebut disebabkan oleh kembali tingginya minat masyarakat untuk makan di restoran seiring dengan perayaan HBKN Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini juga sejalan dengan adanya tren peningkatan pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sehingga makin banyak masyarakat

yang menggunakan uangnya untuk memesan makanan di luar rumah. Adapun kenaikan harga mie lebih lanjut turut didorong oleh menipisnya pasokan gandum dunia akibat pemberlakuan larangan ekspor sejumlah negara pemasok gandum sebagai imbas dari masih berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

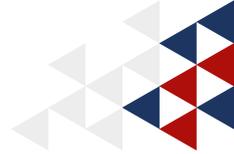
Secara komoditas, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh peningkatan harga pada komoditas emas perhiasan, pasta gigi, dan biaya fotocopy dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08% (yoy), 0,02% (yoy), dan 0,02% (yoy). Peningkatan harga pada emas perhiasan diperkirakan karena investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik. Adapun kenaikan harga emas global juga berimbas pada harga emas di dalam negeri. Selanjutnya, kenaikan harga pasta gigi diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan peningkatan mobilitas secara konsisten. Sementara itu, kenaikan biaya fotocopy diindikasikan akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru perguruan tinggi.

Kelompok Pendidikan Tercatat Mengalami Inflasi

Kelompok Pendidikan tercatat mengalami inflasi, dengan andil inflasi sebesar 0,15% (yoy) pada triwulan III-2023. Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok tersebut utamanya didorong oleh peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi dengan andil inflasi sebesar 0,13% (yoy). Adapun peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.

3.3 INFLASI SPASIAL

Mayoritas Kota IHK di Sumatera Utara mencatatkan penurunan tekanan inflasi pada triwulan III-2023 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kecuali Kota Gunungsitoli. Adapun tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga dengan angka inflasi sebesar 3,40% (yoy), kemudian diikuti



Kota	Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional											
	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
Inflasi IHK, % mtm												
Gabungan 5 Kota IHK Sumut	-0,08	0,03	0,29	0,46	0,71	1,40	1,00	1,50	-0,31	0,31	0,37	
Medan	-0,03	0,03	0,31	0,44	0,68	1,39	0,98	1,54	-0,30	0,29	0,38	
Pematangsiantar	-0,22	0,23	0,31	0,85	0,77	1,36	1,50	1,61	-0,30	0,52	0,16	
Padangsidempuan	-0,57	-0,26	0,04	0,35	1,11	1,29	0,99	0,64	-0,18	0,21	0,49	
Sibolga	-0,29	0,31	0,32	0,17	0,93	1,12	0,33	1,44	-0,66	0,62	0,44	
Gunung Sitoli	-0,54	-0,28	-0,13	0,62	0,39	2,72	0,61	1,79	-0,91	0,21	0,38	
Sumatera	0,02	-0,01	0,18	0,51	0,80	1,16	1,15	0,96	-0,12	0,27	0,32	
Nasional	0,08	-0,16	-0,04	0,57	0,66	0,61	1,17	0,66	0,18	0,14	0,19	
Inflasi IHK, % ytd												
Gabungan 5 Kota IHK Sumut	0,02	0,34	0,83	1,71	1,54	4,18	5,23	6,12	0,28	0,68	1,29	
Medan	0,03	0,34	0,84	1,70	1,44	4,08	5,12	6,10	0,17	0,52	1,12	
Pematangsiantar	0,45	0,81	1,03	2,12	1,93	4,36	5,13	6,16	0,63	1,35	1,50	
Padangsidempuan	-0,47	0,19	0,64	1,49	2,40	5,34	6,67	6,40	1,41	2,08	2,91	
Sibolga	-0,24	0,12	1,11	1,86	2,27	4,68	6,13	6,43	1,12	2,17	3,12	
Gunung Sitoli	-1,02	-1,00	-0,71	0,54	1,76	4,80	5,83	5,74	-0,04	0,12	1,94	
Sumatera	0,25	0,50	0,65	1,91	1,42	4,36	5,61	6,14	0,48	0,99	1,62	
Nasional	0,44	0,74	0,80	1,87	1,20	3,19	4,84	5,51	0,68	1,24	1,63	
Inflasi IHK, % yoy												
Gabungan 5 Kota IHK Sumut	1,43	1,69	2,40	1,71	3,26	5,61	6,14	6,12	4,80	2,55	2,15	
Medan	1,25	1,52	2,26	1,70	3,14	5,49	6,01	6,10	4,77	2,47	2,06	
Pematangsiantar	2,61	3,14	3,65	2,12	3,62	5,71	6,26	6,16	4,81	3,10	2,50	
Padangsidempuan	1,93	1,80	2,58	1,49	4,42	6,71	7,57	6,40	5,37	3,11	2,65	
Sibolga	2,08	2,82	3,87	1,86	4,42	6,50	6,92	6,43	5,22	3,88	3,40	
Gunung Sitoli	3,22	3,36	2,02	0,54	3,36	6,44	7,16	5,74	3,86	1,01	1,85	
Sumatera	1,60	1,76	2,08	1,91	3,11	5,82	6,94	6,14	5,16	2,71	2,13	
Nasional	1,37	1,33	1,60	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

Kota Padangsidempuan sebesar 2,65% (yoy), Kota Pematangsiantar sebesar 2,50% (yoy), Kota Medan sebesar 2,15% (yoy), dan Kota Gunungsitoli dengan inflasi terendah sebesar 1,85% (yoy) – (Tabel 3.2). Dengan demikian, secara umum, tingkat inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat menurun dan berada di rentang sasaran inflasi nasional 3%±1%.

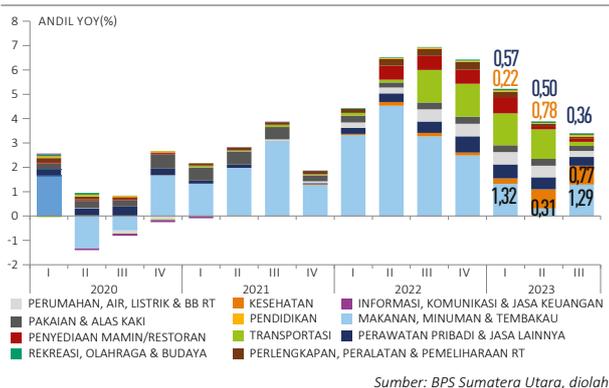
Kota Sibolga Mencatatkan Inflasi Tertinggi
Kota Sibolga mengalami inflasi tertinggi, yaitu tercatat sebesar 3,40% (yoy) pada triwulan III-2023, namun lebih rendah dari triwulan

sebelumnya yang sebesar 3,88% (yoy) – (Tabel 3.3). Inflasi di Kota Sibolga didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,29% (yoy). Inflasi pada kelompok tersebut didorong oleh peningkatan harga pada komoditas beras, rokok kretek filter, dan tomat yang masing-masing memiliki andil inflasi sebesar 0,94% (yoy), 0,67% (yoy), dan 0,22% (yoy) pada triwulan III-2023. Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga tomat seiring dengan berkurangnya pasokan akibat belum masuknya musim panen dan cuaca ekstrem (curah hujan tinggi) yang mengganggu produksi dan distribusi komoditas tersebut.

Kelompok Kesehatan menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil inflasi sebesar 0,77% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan tarif rumah sakit dan tarif dokter umum dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,65% (yoy) dan 0,11% (yoy). Kenaikan tarif rumah sakit dan tarif dokter umum seiring dengan penerbitan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga. Pada peraturan tersebut terdapat penyesuaian tarif layanan rumah sakit umum mempertimbangkan penambahan objek layanan, perkembangan indeks harga, dan perkembangan ekonomi.

Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga menjadi penyumbang inflasi Kota Sibolga pada triwulan III-2023. Kelompok ini mencatatkan andil inflasi sebesar 0,36% (yoy). Adapun peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh





Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Grafik 3.4 Inflasi Kota Sibolga per Kelompok

kenaikan harga pada emas perhiasan, tarif gunting rambut pria, dan shampo dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08% (yoy), 0,08% (yoy), dan 0,05% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan diperkirakan karena investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik. Selanjutnya, kenaikan tarif gunting rambut pria diperkirakan seiring dengan peningkatan biaya hidup sebagai dampak dari kenaikan harga BBM terhadap pengeluaran masyarakat sehingga beberapa usaha salon memutuskan untuk meningkatkan tarif gunting rambut pria. Sementara itu, kenaikan harga komoditas shampo diperkirakan seiring dengan peningkatan permintaan dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, laju inflasi Kota Sibolga lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, bawang merah, dan ikan serai mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar -0,92% (yoy), -0,14%, dan -0,11% (yoy) – (Tabel 3.4).

Kota Padangsidimpuan Mencatatkan Inflasi Tertinggi Kedua

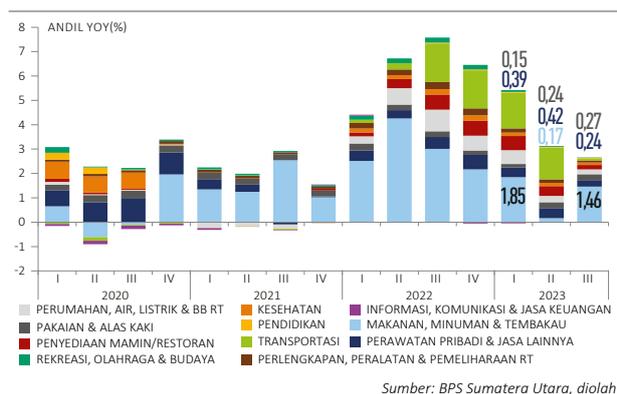
Kota Padangsidimpuan mencatatkan inflasi tertinggi kedua di Sumatera Utara. Pada triwulan III-2023, Kota Padangsidimpuan mengalami inflasi sebesar 2,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 3,11% (yoy) – (Tabel 3.3). Sumber utama inflasi di Kota Padangsidimpuan didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,46% (yoy). Berdasarkan komoditasnya,

inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, rokok kretek filter, dan jeruk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,97% (yoy), 0,22% (yoy), dan 0,18% (yoy). Kenaikan harga beras seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Sementara itu, kenaikan harga jeruk diperkirakan disebabkan oleh terganggunya produksi dan distribusi jeruk akibat cuaca ekstrem (curah hujan yang tinggi).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan III-2023 dengan andil inflasi sebesar 0,27% (yoy). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,19% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan diperkirakan karena investor melihat emas masih menjadi alternatif investasi terbaik.

Selanjutnya, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,24% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas baju muslim wanita, celana panjang jeans pria, dan seragam sekolah anak dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04% (yoy), 0,03% (yoy), dan 0,02% (yoy). Kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diperkirakan akibat peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan perayaan tahun baru Islam 2023 dan dimulainya tahun ajaran baru.

Di sisi lain, inflasi Kota Padangsidimpuan lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, bawang merah, dan ikan dencis mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-



Grafik 3.5 Inflasi Kota Padangsidimpuan per Kelompok

masing sebesar -0,40% (yoy), -0,25% (yoy), dan -0,14% (yoy) – (Tabel 3.4).

Kota Pematangsiantar Mencatatkan Inflasi Tertinggi Ketiga

Inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan III-2023 tercatat sebesar 2,50% (yoy) – (Tabel 3.3).

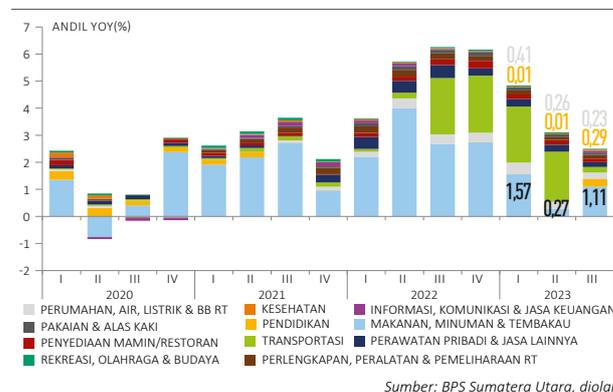
Nilai realisasi inflasi tersebut lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,10% (yoy). Inflasi Kota Pematangsiantar didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Pendidikan, dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan andil inflasi terbesar yakni 1,11% (yoy) pada triwulan III-2023. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga pada komoditas beras, rokok kretek filter, dan tomat dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,65% (yoy), 0,26% (yoy), dan 0,18% (yoy). Kenaikan harga beras tidak terlepas dari terbatasnya pasokan beras secara Nasional di tengah adanya peningkatan konsumsi masyarakat, tingginya biaya pupuk, dan transmisi kenaikan harga BBM terhadap biaya produksi petani. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter merupakan transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok secara bertahap. Sementara itu, kenaikan harga tomat diperkirakan seiring dengan belum masuknya musim panen dan terganggunya produksi akibat cuaca ekstrem (curah hujan tinggi).

Selanjutnya, Kelompok Pendidikan juga turut menjadi penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan III-2023 dengan andil inflasi sebesar 0,29% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan biaya akademi/ perguruan tinggi dengan andil inflasi sebesar 0,18% (yoy). Adapun peningkatan biaya akademi/ perguruan tinggi seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar terbesar berikutnya dengan andil inflasi mencapai 0,23% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga kontrak rumah, sewa rumah, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,10% (yoy), 0,07% (yoy), dan 0,05% (yoy). Kenaikan harga kontrak rumah dan sewa rumah diperkirakan merupakan indikasi ekspektasi pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemilik rumah, sehingga penyesuaian harga yang tertunda selama pandemi dilakukan kenaikan secara bertahap. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar rumah tangga seiring dengan penyesuaian harga BBM dan masih berlanjutnya dampak penyesuaian harga LPG nonsubsidi pada 10 Juli 2022.

Di sisi lain, inflasi Kota Pematangsiantar lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, daging babi, dan bawang merah mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-



Grafik 3.6 Inflasi Kota Pematangsiantar per Kelompok

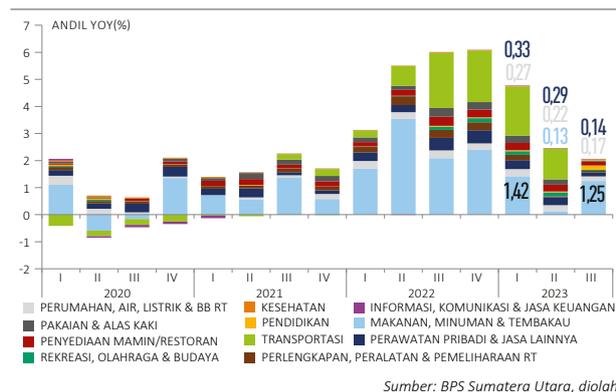
masing sebesar -1,16% (yoy), -0,45% (yoy), dan -0,26% (yoy) – (Tabel 3.4).

Kota Medan Mencatatkan Inflasi Tertinggi Selanjutnya

Kota Medan mencatatkan penurunan tekanan inflasi pada triwulan III-2023. Pada triwulan laporan, inflasi Kota Medan tercatat sebesar 2,06% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mencatatkan inflasi sebesar 2,47% (yoy) – (Tabel 3.3). Berdasarkan kelompoknya, inflasi tersebut didorong oleh sumbangan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Kelompok Pendidikan, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,25% (yoy), 0,17% (yoy), dan 0,15% (yoy).

Tekanan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara umum didorong oleh kenaikan harga beras, rokok kretek filter, dan tomat dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,61% (yoy), 0,25% (yoy), dan 0,18% (yoy). Kenaikan harga beras tidak terlepas dari terbatasnya pasokan beras secara Nasional di tengah adanya peningkatan konsumsi masyarakat, tingginya biaya pupuk, dan transmisi kenaikan harga BBM terhadap biaya produksi petani sehingga meningkatkan harga gabah baik di tingkat petani maupun penggilingan. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter merupakan transmisi dari kenaikan tarif cukai rokok secara bertahap. Sementara itu, kenaikan harga tomat diperkirakan seiring dengan belum masuknya musim panen dan terganggunya produksi akibat cuaca ekstrem (curah hujan tinggi).

Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga turut menjadi penyumbang inflasi Kota Medan pada triwulan III-2023 dengan andil inflasi sebesar 0,17% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh peningkatan harga sewa rumah dan kontrak rumah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08% (yoy) dan 0,06% (yoy). Kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah diperkirakan merupakan indikasi ekspektasi pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemilik rumah, sehingga



Grafik 3.7 Inflasi Kota Medan per Kelompok

penyesuaian harga yang tertunda selama pandemi dilakukan kenaikan secara bertahap.

Kelompok Pendidikan menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh peningkatan harga pada komoditas akademi/ perguruan tinggi dengan andil inflasi sebesar 0,14% (yoy) pada triwulan III-2023. Peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi tersebut seiring dengan mulai masuknya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan tinggi.

Di sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kota Medan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, bawang merah, dan buah naga mencatatkan andil deflasi terdalam yakni masing-masing sebesar -0,33% (yoy), -0,16%, dan -0,04% (yoy) – (Tabel 3.4).

Kota Gunungsitoli Mencatatkan Inflasi Terendah

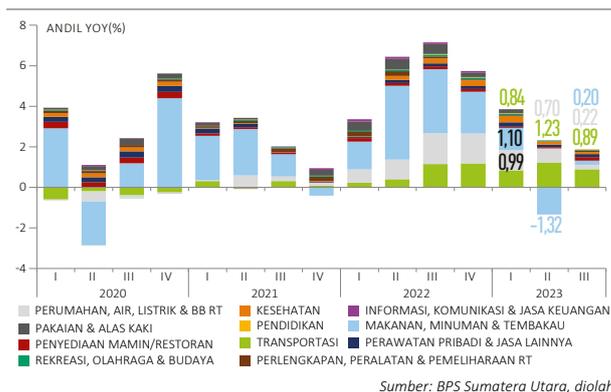
Tekanan inflasi di Kota Gunungsitoli terendah di antara 5 kota IHK Sumatera Utara. Pada triwulan III-2023, Kota Gunungsitoli mencatat inflasi 1,85% (yoy), meningkat dari triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 1,01% (yoy). Sumber utama tekanan inflasi berasal dari Kelompok Transportasi yang memberikan andil inflasi sebesar 0,89% (yoy) pada triwulan III-2023. Tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga angkutan udara dan bensin dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,75% (yoy) dan 0,04% (yoy) pada triwulan III-2023.



Kenaikan tarif angkutan udara diperkirakan didorong oleh meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat seiring dengan libur semester anak sekolah. Selanjutnya, kenaikan harga bensin sejalan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi, salah satunya Pertamina dari Rp12.400 per liter menjadi Rp13.300 per liter pada 1 September 2023.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil inflasi sebesar 0,22% (yoy) pada triwulan III-2023. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga tukang bukan mandor, bahan bakar rumah tangga, semen, dan kontrak rumah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,09% (yoy), 0,04% (yoy), 0,03% (yoy), dan 0,03% (yoy). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga seiring dengan berlanjutnya dampak penyesuaian harga LPG nonsubsidi pada 10 Juli 2022. Sementara itu, peningkatan harga tukang bukan mandor, semen, dan kontrak rumah sejalan dengan akselerasi pertumbuhan LU Konstruksi pada triwulan III-2023 di tengah meningkatnya harga bahan bangunan seperti semen.

Selanjutnya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar berikutnya dengan andil inflasi sebesar 0,20% (yoy) pada triwulan III-2023. Peningkatan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga beras dan rokok kretek filter dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,99% (yoy) dan 0,21% (yoy). Kenaikan harga beras



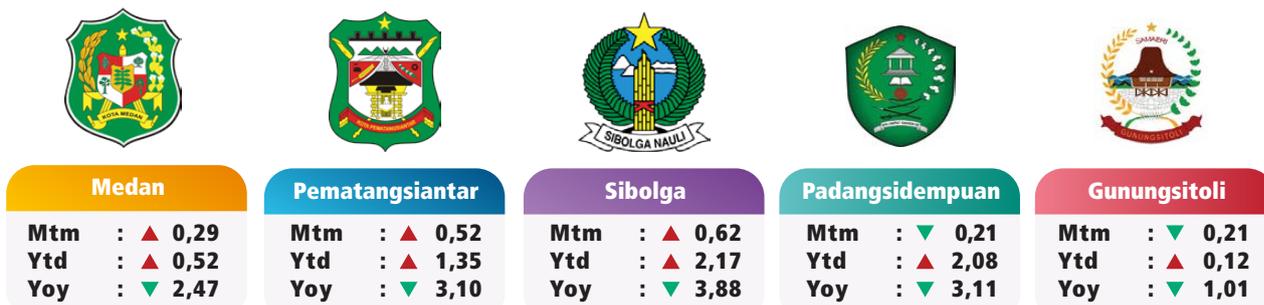
Grafik 3.8 Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok

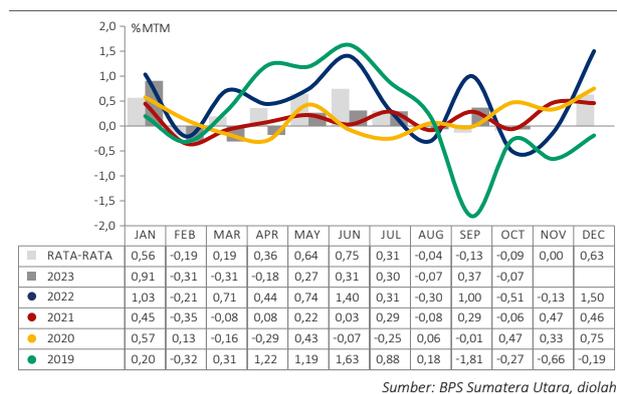
seiring dengan terbatasnya pasokan secara Nasional dampak berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino dan perilaku proteksionisme negara-negara pemasok beras utama dunia. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga turut berdampak pada kenaikan harga beras secara umum. Selanjutnya, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023.

Di sisi lain, inflasi lebih tinggi di Kota Gunungsitoli tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Pada triwulan III-2023, komoditas cabai merah, daging babi, dan bawang merah menjadi penyumbang deflasi terdalam Kota Gunungsitoli dengan andil deflasi masing-masing sebesar -1,02% (yoy), -0,79% (yoy), dan -0,11% (yoy) – (Tabel 3.4).

Gambar 3.1 Inflasi di Kota IHK Sumatera Utara Triwulan II-2023

Perkembangan Inflasi secara spasial di Kota IHK Sumatera Utara



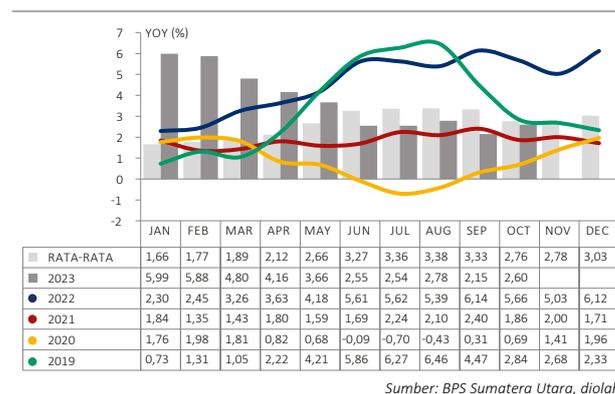


Grafik 3.9 Historis Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara

-0,43% (mtm), dengan andil deflasi -0,14% (mtm). Deflasi tersebut utamanya didorong oleh penurunan harga komoditas pangan seperti cabai merah (-0,16%, mtm), tomat (-0,05%, mtm), telur ayam ras (-0,02%, mtm), wortel (-0,02%, mtm), dan cabai hijau (-0,02%, mtm). Komoditas cabai merah menjadi penyumbang deflasi tertinggi dikarenakan beberapa daerah yang mengalami panen, seperti Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara, cuaca yang mendukung mendorong percepatan buah untuk masak dan meningkatkan panen sehingga terdapat surplus pasokan cabai merah.

Selanjutnya, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan memberikan andil deflasi terdalam kedua pada Oktober 2023. Kelompok ini mencatatkan deflasi sebesar -0,03% (mtm), dengan andil deflasi sebesar -0,001% (mtm). Deflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh penurunan harga pada komoditas telepon seluler dan televisi berwarna dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,008% (mtm) dan -0,005% (mtm).

Di sisi lain, Kelompok Transportasi memberikan andil inflasi tertinggi pada periode Oktober 2023. Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 0,30% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,04% (mtm). Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga bensin dengan andil inflasi sebesar 0,41% (mtm). Hal ini berkaitan erat dengan kenaikan harga BBM non-subsidi selama bulan Oktober 2023.



Grafik 3.10 Historis Inflasi Tahunan Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara

Adapun secara tahunan, inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada Oktober 2023 tercatat sebesar 2,60% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,15% (yoy) – (Grafik 3.10). Inflasi tahunan pada Oktober 2023 tercatat sedikit lebih rendah dari rata-rata inflasi tiga tahun terakhir pada periode yang sama yakni sebesar 2,61% (yoy). Dari sisi kelompok pengeluaran, laju inflasi Oktober 2023 didorong oleh kenaikan harga sebagian besar kelompok, dengan andil inflasi terbesar berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,66% (yoy) dan 0,18% (yoy). Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dipicu oleh kenaikan harga beras, rokok kretek filter, dan tomat dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,69% (yoy), 0,25% (yoy), dan 0,18% (yoy). Di sisi lain, inflasi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga utamanya didorong oleh kenaikan harga sewa rumah, kontrak rumah, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,07% (yoy), 0,06% (yoy), dan 0,03% (yoy).

Tekanan Inflasi Triwulan IV-2023 Diperkirakan Lebih Tinggi dari Triwulan III-2023

Tekanan inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan IV-2023 diperkirakan lebih tinggi daripada triwulan III-2023. Peningkatan tekanan inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara

pada triwulan IV-2023 diperkirakan disebabkan oleh peningkatan harga yang terjadi pada beberapa kelompok.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan masih akan menjadi salah satu penyumbang inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan IV-2023 seiring dengan masih adanya dinamika rantai pasok pangan global dan dampak perubahan iklim. Sejak pertengahan 2022, Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam atau *Black Sea Grain Initiative* telah meredam laju kenaikan harga komoditas pangan dunia akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang memegang peranan penting dalam pasar ekspor pangan dunia. Pada 17 Juli 2023, Rusia telah menarik keterlibatannya dalam inisiatif tersebut dan diperkirakan dapat memicu kenaikan harga komoditas pangan dunia seperti jagung, gandum, dan bunga matahari. Hal ini diperkirakan turut berdampak pada berlanjutnya peningkatan biaya pakan ternak dan meningkatkan biaya produksi makanan berbahan dasar tepung seperti mie di dalam negeri. Transmisi dampak kenaikan harga BBM juga diperkirakan berlanjut pada meningkatnya biaya transportasi angkutan distribusi komoditas hortikultura dan perikanan, sehingga berlanjut pada kenaikan biaya produksi. Terbatasnya pasokan beras yang terjadi secara Nasional seiring dengan berkurangnya produksi akibat fenomena El-Nino serta tingginya harga pupuk turut berdampak pada peningkatan harga beras yang diperkirakan masih menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi tertinggi di akhir tahun. Selain itu, berlanjutnya dampak transmisi berlaku efektifnya kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2023 serta potensi terjadinya lonjakan permintaan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2024 diperkirakan turut meningkatkan laju inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan IV-2023.

Lebih lanjut, Kelompok Transportasi diperkirakan turut menjadi penyumbang inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan IV-2023. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin yang juga tertransmisikan pada kenaikan

harga angkutan dalam kota dan angkutan antar kota, serta potensi kenaikan tarif angkutan udara. Kenaikan harga BBM Pertamina, Shell Indonesia, dan BP-AKR yang diterapkan pada tanggal 1 Oktober 2023 diperkirakan berdampak pada peningkatan harga komoditas bensin sebagai penyumbang inflasi dengan andil yang cukup signifikan pada triwulan IV-2023 yang selanjutnya tertransmisikan pada tarif angkutan dalam kota dan angkutan antar kota. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong oleh meningkatnya mobilitas dan permintaan masyarakat menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2024 seiring dengan libur sekolah pada Desember 2023 yang berpotensi meningkatkan permintaan angkutan udara lebih tinggi.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga diperkirakan menjadi penyumbang inflasi Sumatera Utara pada triwulan IV-2023. Tekanan inflasi pada kelompok ini diperkirakan utamanya bersumber dari kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah. Kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah diperkirakan merupakan indikasi berlanjutnya ekspektasi pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemilik rumah, sehingga penyesuaian harga sewa rumah dan kontrak rumah yang tertunda selama pandemi dapat mulai dilaksanakan secara bertahap dan tetap berlangsung pada triwulan IV-2023.

Terakhir, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga diperkirakan menjadi penyumbang inflasi Sumatera Utara pada triwulan IV-2023. Tekanan inflasi pada kelompok ini seiring dengan potensi terjadinya lonjakan permintaan masyarakat pada HBKN Natal dan Tahun Baru 2024 serta semakin lunturnya dampak *scarring effect* pandemi yang mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan tersebut, secara keseluruhan pada triwulan IV-2023, laju inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara diperkirakan mengalami peningkatan namun masih berada di sekitar titik tengah kisaran target inflasi nasional $3\% \pm 1\%$



Halaman ini sengaja dikosongkan



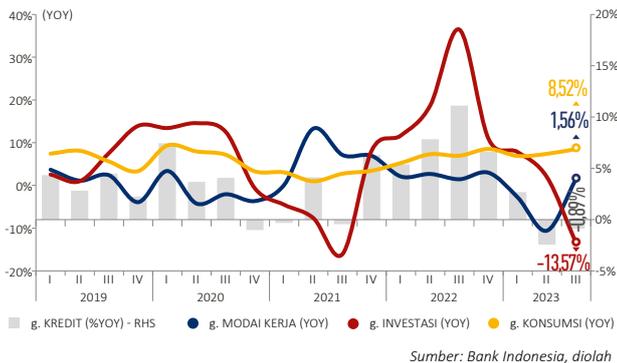


Bab IV

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Sejalan dengan peningkatan optimisme masyarakat, kinerja pembiayaan Rumah Tangga (RT) dan UMKM turut mengalami peningkatan. Namun, di sisi lain kinerja pembiayaan korporasi mengalami perlambatan pada triwulan III-2023 setelah triwulan sebelumnya mengalami kondisi yang sama. Meningkatnya kinerja kredit RT dan UMKM mengindikasikan mulai kembali normalnya pola konsumsi masyarakat paska pandemi serta meningkatkan konsumsi masyarakat selama masa liburan. Sementara itu, kredit korporasi masih tertahan terutama pada penggunaan kredit investasi yang menurun signifikan sedangkan kredit modal kerja membaik. Berdasarkan lapangan usaha, seluruhnya mencatatkan penurunan kecuali LU PBE yang masih mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas perusahaan yang masih enggan untuk menggunakan kredit untuk kegiatan investasi sebagai imbas dari suku bunga perbankan yang masih tinggi. Secara keseluruhan, kualitas kredit tetap terjaga baik di bawah threshold baik untuk rumah tangga, korporasi maupun UMKM.





Grafik 4.1 Pertumbuhan Kredit Sumatera Utara



Grafik 4.2 Indeks Ekspektasi Penghasilan

4.1 PEMBIAYAAN DAERAH

Kinerja penyaluran pembiayaan daerah di Sumatera Utara pada triwulan III 2023 tercatat mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemulihan pertumbuhan kredit perbankan didorong oleh kuatnya pertumbuhan kredit konsumsi dan terjaganya pertumbuhan kredit modal kerja ditengah penurunan kredit investasi. (Grafik 4.1).

4.1.1 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

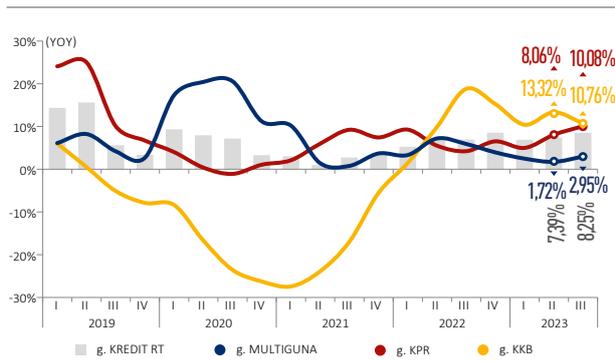
Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan RT pada triwulan III-2023, jumlah penghasilan serta ekspektasi penghasilan Masyarakat juga tetap terjaga. Survei Konsumen triwulan III-2023 menunjukkan bahwa rumah tangga dengan penghasilan yang sama atau meningkat dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya tercatat sebesar 72,70%, meningkat dibandingkan triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 71,74% - (Gambar 4.1). Angka tersebut menunjukkan bahwa daya beli tetap terjaga pada periode laporan yang kemudian mendorong optimisme masyarakat di tengah berbagai tantangan internal maupun eksternal.



Lebih lanjut, optimisme ini tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi rumah tangga pada masa liburan sekolah beserta menggeliatnya beberapa lapangan usaha seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Ke depan, diperkirakan konsumsi rumah tangga akan pulih secara bertahap menuju keadaan normal sebelum pandemi COVID-19. Salah satu faktor yang mendorong konsumsi adalah peningkatan konsumsi menjelang nataru, peningkatan permintaan barang dan jasa untuk kegiatan pemilu dan stimulus pembebasan pajak PPN untuk pembelian rumah tinggal pada harga tertentu. Namun, tingkat inflasi dan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja dapat menjadi faktor penghambat utama, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

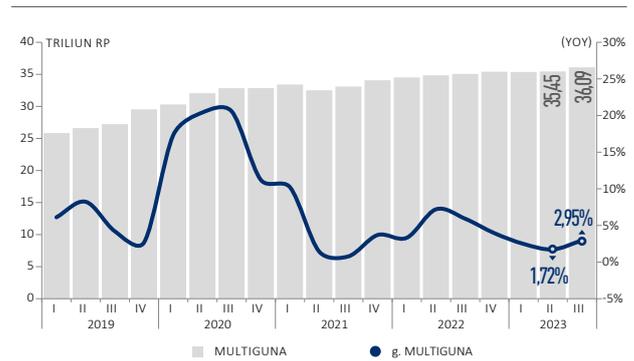
Ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian 6 (enam) bulan ke depan masih berada di level optimis. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks ekspektasi penghasilan 6 (enam) bulan ke depan tercatat sebesar 122, di atas angka optimis 100 – (Grafik 4.2), yang artinya masyarakat optimis bahwa akan ada kenaikan pendapatan di masa yang akan datang. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 120 pada triwulan II-2023. Kemudian, diperlukan upaya penguatan atau menjaga ekspektasi masyarakat khususnya terkait kondisi domestik di tengah geopolitik global sehingga indeks ekspektasi dapat terjaga secara rata-rata tercatat



Grafik 4.3 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

di atas 120. Ekspektasi peningkatan pendapatan kemudian ditransmisikan kepada konsumsi 3 (tiga) bulan mendatang dengan indeks yang berada di level optimis 100. Namun demikian, apabila diperhatikan, meski perkiraan pendapatan sudah mulai meningkat, indikator konsumsi tetap berada pada level optimis yang sama dan tidak mengalami peningkatan sejak triwulan II-2020. Hal ini ditengarai terkait dengan fenomena *scarring effect* ketika masyarakat menahan konsumsi dan menyimpan uangnya dengan motif berjaga-jaga masih berlanjut akibat masih tingginya ketidakpastian kondisi global. Kondisi ini diprakirakan juga menjadi perhatian perbankan Ketika merespons dengan cenderung menurunkan suku bunga kredit konsumsi dengan tujuan mendorong tingkat konsumsi masyarakat sejak pandemi hingga saat ini. Rata-rata suku bunga perbankan untuk kredit konsumsi yang pada awal pandemi (triwulan II-2020) tercatat sebesar 10,93% terus menurun hingga 10,25% pada triwulan II-2023. Hal ini berbeda dengan kredit produktif yang mengalami tren kenaikan paska pemulihan aktivitas masyarakat.

Sejalan dengan optimisme ekspektasi penghasilan dan ekspektasi pengeluaran konsumsi, penyaluran kredit rumah tangga turut meningkat. Realisasi kredit rumah tangga pada triwulan III-2023 sebesar Rp74,43 triliun atau tumbuh 8,52% (yoy) – (Grafik 4.3). Pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2023 yang sebesar 7,39% (yoy) ini didorong oleh peningkatan konsumsi selama masa liburan sekolah. Kredit rumah



Grafik 4.4 Perkembangan Kredit Multiguna

tangga didominasi oleh KPR (10,08%, yoy), Multiguna (2,95%, yoy), dan KKB (10,76%, yoy).

Kinerja kredit rumah tangga terus membaik dan tumbuh positif menuju level sebelum pandemi. Peningkatan kredit RT terutama didorong oleh kredit multiguna yang tumbuh 2,95% (yoy), meningkat dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya 1,72%. Kredit multiguna tercatat 2,95% (yoy) pada triwulan III-2023, meningkat dari sebelumnya 1,72% pada triwulan II-2023 – (Grafik 4.4).

KKB mencatatkan penurunan dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan KKB menurun dari triwulan II-2023 yang tercatat 13,32% (yoy) menjadi 10,76% (yoy) pada triwulan III-2023. Hal ini terjadi dikarenakan adanya normalisasi pembelian kendaraan setelah sebelumnya sempat melonjak paska berakhirnya pandemi. Kontribusi KKB terbesar berasal dari mobil roda empat yang salah satunya didorong oleh pelonggaran pajak kendaraan bermotor berbasis listrik. – (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor

KKB	Growth (%)		Pangsa (%)		Kontribusi		Delta
	Q2'23	Q3'23	Q2'23	Q3'23	Q2'23	Q3'23	Kontribusi
Mobil Roda Empat	18%	16%	83%	83%	15%	13,6%	-1,4%
Sepeda Bermotor	-4%	0%	14%	14%	-0,5%	0,0%	0,5%
Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam	-16%	-46%	3%	3%	-0,5%	-1,2%	0,7%
Kendaraan Bermotor Lainnya	75%	100%	0%	0%	0,4%	0,4%	0,0%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah

KPR	Growth (%yoy)		Pangsa (%)		Kontribusi		Delta Kontribusi
	Q3'22	Q4'22	Q3'22	Q4'22	Q3'22	Q4'22	
	Rumah Tinggal s.d. Tipe 21	-9,91%	21,60%	2,66%	2,70%	-0,26%	
Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70	6,98%	7,53%	54,22%	53,34%	3,78%	4,01%	0,2%
Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	11,97%	13,94%	34,51%	35,39%	4,13%	4,93%	0,8%
Flat atau Apartemen s.d. Tipe 21	-7,41%	-16,67%	0,11%	0,11%	-0,01%	-0,02%	0,0%
Flat atau Apartemen Tipe 22 s.d. 70	22,99%	23,81%	0,96%	1,01%	0,22%	0,24%	0,0%
Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	-2,15%	3,32%	1,23%	1,21%	-0,03%	0,04%	0,1%
Rumah Toko atau Rumah Kantor	6,32%	6,88%	6,29%	6,25%	0,40%	0,43%	0,0%

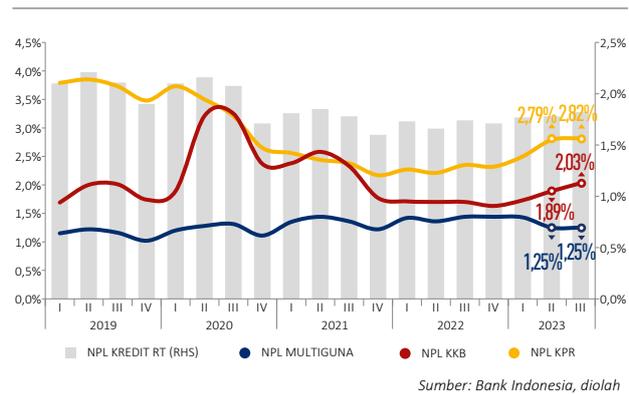
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Di sisi lain, KPR juga turut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan KPR pada triwulan III-2023 yang sebesar 11,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2023 yang tercatat 8,06% (yoy). KPR yang sempat menunjukkan perlambatan di triwulan IV-2022 hingga triwulan I-2023 mulai menunjukkan geliat pertumbuhan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat untuk membeli rumah berangsur kembali normal pasca pandemi.

Kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari kredit rumah tinggal tipe 22 s.d. 70, yang menguasai pangsa KPR sekitar 53,34%, dimana terjadi pertumbuhan dari 7,53% (yoy) di triwulan III-2023 dari 6,98% (yoy) pada triwulan II-2023 - (Tabel 4.2). Kenaikan minat terhadap properti turut didorong oleh adanya optimisme masyarakat paska pandemi COVID-19.

Kualitas kredit Rumah Tangga tetap terjaga yang tercermin dari tingkat *Non-Performing Loan (NPL)* atau kredit bermasalah di bawah 5%.

NPL kredit Rumah Tangga meningkat pada triwulan laporan, dari 1,78% pada triwulan II-2023 menjadi 1,82% pada triwulan laporan. Peningkatan NPL berasal dari peningkatan NPL kredit KPR dan KKB dimana NPL kredit KPR naik dari 2,79% pada triwulan II-2023 menjadi 2,82% pada triwulan laporan dan NPL KKB naik dari 1,89% pada triwulan II-2023 menjadi 2,03% pada triwulan laporan. Sementara itu, NPL Multiguna tetap stagnan pada angka 1,25% pada triwulan laporan - (Grafik 4.5).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

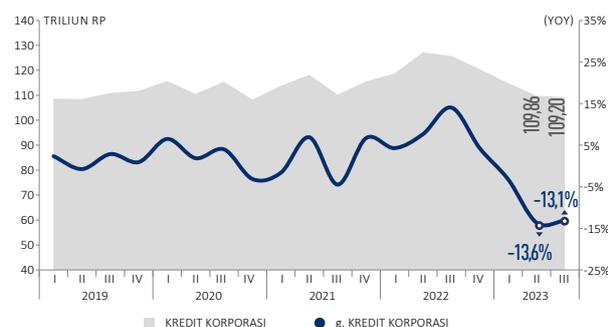
Grafik 4.5 NPL Kredit Rumah Tangga

4.1.2 Pembiayaan Korporasi

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan III-2023 masih tertahan. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan III-2023 masih terkontraksi sebesar 13,1% (yoy) setelah pada triwulan II-2023 juga mengalami kontraksi sebesar 13,6% (yoy) - (Grafik 4.6).

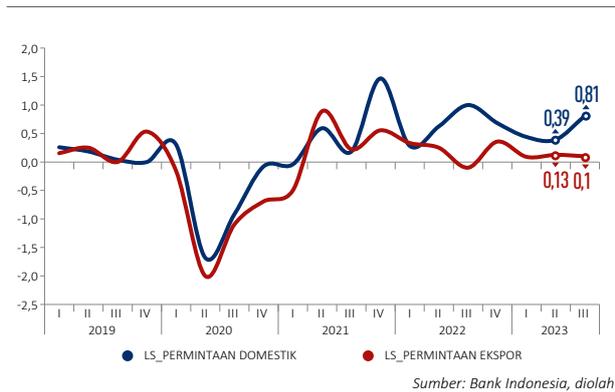
Masih tertahannya pertumbuhan kredit korporasi pada triwulan III-2023 terkonfirmasi oleh permintaan ekspor yang menurun dari LS 0,13 pada triwulan II-2023 menjadi LS 0,10 pada triwulan III-2023. Mayoritas responden menyampaikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh mahalnya biaya pengangkutan dan tekanan inflasi yang meningkat berdampak pada tertahannya permintaan pada triwulan III-2023. - (Grafik 4.7).

Berdasarkan jenis penggunaan, penurunan kredit korporasi berasal dari kredit Investasi yang turun secara signifikan menjadi -26,7% (yoy) pada



Sumber: Bank Indonesia, diolah

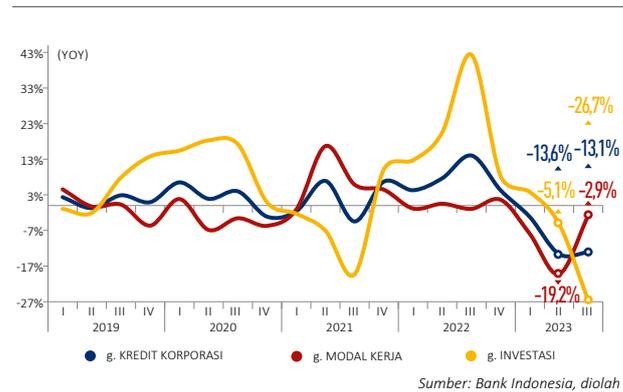
Grafik 4.6 Pertumbuhan Kredit Korporasi



Grafik 4.7 Likert Scale Permintaan Domestik dan Ekspor
Sumber: Bank Indonesia, diolah

triwulan III-2023 – (Grafik 4.8). Hal ini disebabkan oleh mayoritas perusahaan yang masih enggan untuk menggunakan kredit untuk kegiatan investasi dikarenakan masih adanya unsur kehati-hatian dalam mengajukan kredit dan juga sebagai imbas dari suku bunga perbankan yang masih tinggi. Di sisi lain, kredit modal kerja membaik meski masih terkontraksi dari 19,2% (yoy) pada triwulan II tahun 2023 menjadi 2,9% (yoy) pada triwulan III tahun 2023. Meski kredit korporasi masih tertahan, kualitas kredit korporasi membaik pada triwulan III-2023 dan masih berada di bawah *threshold* 5%.

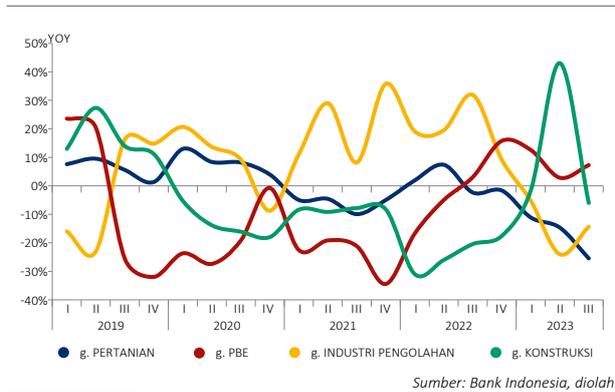
Berdasarkan lapangan usaha, hanya sektor PBE yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan menjadi 7,3% (yoy) pada triwulan III-2023 – (Grafik 4.8). Kredit Industri Pengolahan pada triwulan III-2023 masih terkontraksi sebesar 14,4% (yoy). Sementara itu kredit Konstruksi menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi -6,0% (yoy) setelah triwulan sebelumnya mencatatkan



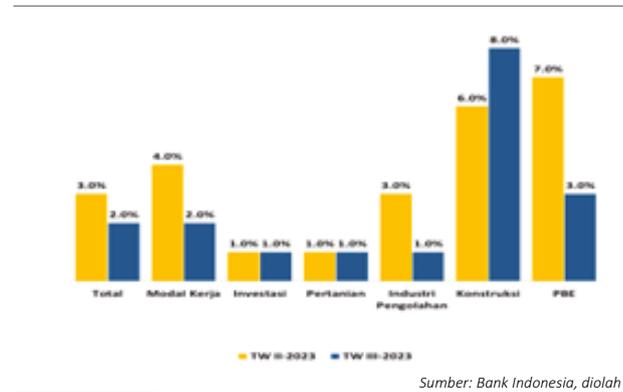
Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: Bank Indonesia, diolah

pertumbuhan sebesar 43,1% (yoy). Di sisi lain, sektor utama lainnya yakni pertanian masih terus mengalami perlambatan menjadi -25,5% (yoy), dikarenakan salah satu diantaranya adalah penurunan harga komoditas ekspor terutama sawit. Perkembangan dimaksud mencerminkan aktivitas dunia usaha khususnya pada sektor utama di Sumatera Utara mengalami penurunan pada triwulan laporan.

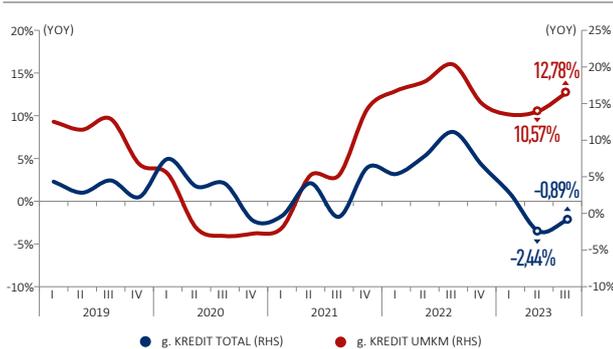
Selanjutnya, kualitas kredit korporasi pada triwulan III 2023 membaik, tercermin dari rasio kredit yang bermasalah atau NPL yang menurun menjadi 2% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3%. Berdasarkan penggunaannya, perbaikan rasio NPL korporasi didorong oleh membaiknya kualitas penyaluran kredit modal kerja sebesar 2% dan terjaganya NPL kredit investasi sebesar 1%. Berdasarkan LU, perbaikan rasio NPL korporasi didorong oleh kualitas NPL dari sektor PBE pada triwulan III-2023 yang turun signifikan dari 7% menjadi 3% pada triwulan III-2023 - (Grafik 4.10).



Grafik 4.9 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha
Sumber: Bank Indonesia, diolah

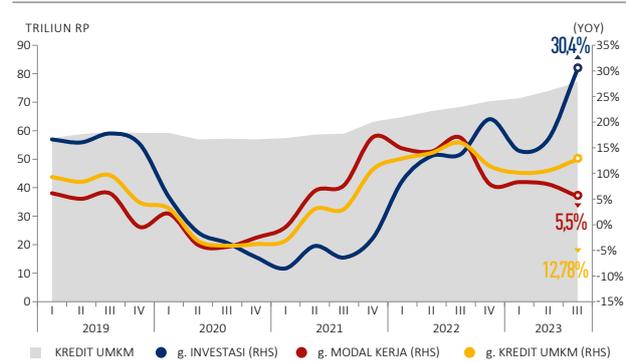


Grafik 4.10 NPL Kredit Korporasi
Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Pertumbuhan Kredit UMKM



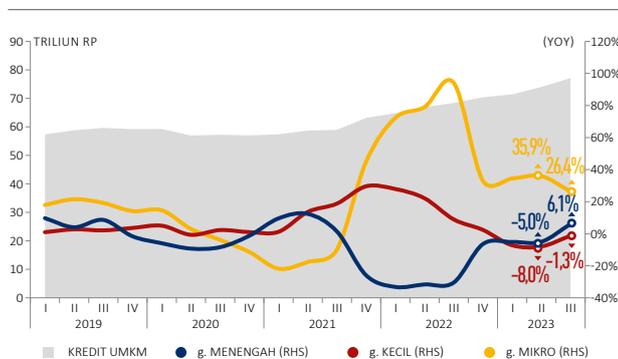
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit

4.2 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pertumbuhan penyaluran kredit kepada **UMKM meningkat pada triwulan III 2023**. Kredit UMKM tercatat sebesar Rp77,11 triliun, dengan pertumbuhan secara tahunan sebesar 12,78% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 10,57% (yoy) – (Grafik 4.11). Peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM di Provinsi Sumatera Utara didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit investasi, sementara kredit modal kerja melambat. Kinerja penyaluran kredit investasi pada UMKM tercatat meningkat dari 16,7% (yoy) pada triwulan II-2023 menjadi 30,4% (yoy) pada triwulan III-2023. Sementara itu, kredit modal kerja pada UMKM melambat dari 7,9% (yoy) menjadi sebesar 5,5% (yoy) pada triwulan III-2023 – (Grafik 4.12).

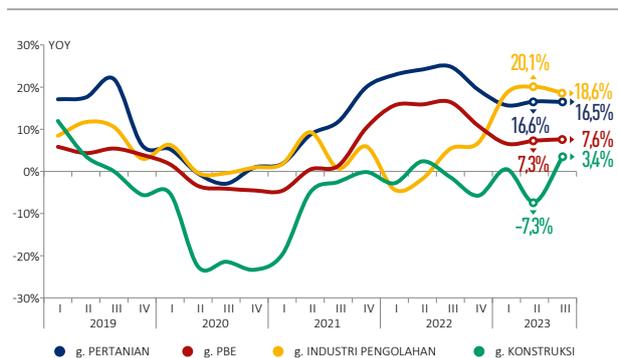
Ditinjau dari segmennya, pertumbuhan kredit **UMKM didorong oleh pertumbuhan kredit segmen usaha kecil dan menengah**. Secara nominal, *share* kredit terbesar berasal dari segmen mikro sebesar 49,88%, diikuti oleh segmen kecil 27,80% dan menengah 22,32%. Pola penyaluran kredit mikro yang lebih besar dibandingkan segmen kredit lainnya telah terjadi sejak triwulan IV-2021, dimana pada tahun-tahun sebelumnya, kredit menengah lebih mendominasi penyaluran kredit UMKM. Pergeseran segmen kredit UMKM ini diperkirakan karena munculnya beragam jenis usaha perorangan dalam era kenormalan baru sehingga kredit yang disalurkan kepada kelompok mikro lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Pertumbuhan kredit kelompok mikro pada triwulan III 2023 menurun menjadi 26,4% (yoy) setelah sebelumnya pada triwulan II 2023 mencapai 35,9% (yoy) – (Grafik 4.13). Selanjutnya, kredit kelompok kecil menunjukkan perbaikan, walaupun masih mengalami kontraksi sebesar 1,3% (yoy) dari triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 8,0% (yoy). Sementara, pertumbuhan kredit menengah mengalami kenaikan yang signifikan pada triwulan laporan sebesar 6,1% (yoy) dibandingkan dari triwulan II-2023 yang tumbuh sebesar -5,0% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Segmen UMKM

Penyaluran kredit UMKM berdasarkan lapangan usaha mengalami pertumbuhan di dua sektor utama yakni Konstruksi dan PBE. – (Grafik 4.14). Hal ini menggambarkan UMKM pada sektor tersebut



Sumber: Bank Indonesia, diolah

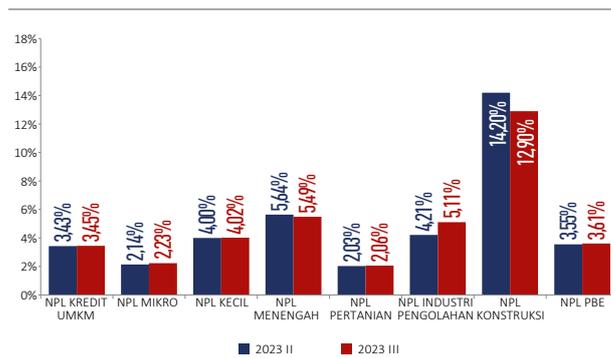
Grafik 4.14 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

menggeliat sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian Sumatera Utara.

Selanjutnya, rasio kredit bermasalah UMKM cenderung stabil dan terjaga di bawah *threshold*.

Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 3,45%, stabil dibandingkan triwulan II-2023 sebesar 3,43%. Meski memiliki share tertinggi yang mencapai 50%, NPL kredit UMKM segmen mikro mencatat NPL terendah yakni 2,23%, yang kemudian diikuti oleh segmen kecil dan menengah yang masing-masing tercatat 4,02% dan 5,49%. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, rasio kredit bermasalah LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU PBE masih berada pada kondisi aman (dibawah 5%). Namun demikian, perkembangan rasio NPL LU konstruksi masih menjadi perhatian khusus karena memiliki risiko kredit diatas 5% – (Grafik 4.15). Kondisi ini sejalan dengan hasil FGD dengan perbankan di Kota Medan yang menyatakan bahwa LU Konstruksi merupakan sektor prioritas pembiayaan dengan risiko tinggi dengan dampak ekonomi yang besar.

Bank Indonesia melalui kebijakannya senantiasa terus berupaya mendorong optimalisasi realisasi kredit baik kredit secara keseluruhan maupun UMKM. Dalam upaya meningkatkan pembiayaan perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/5/PBI/2022 memberikan insentif bagi bank yang memberikan kredit atau



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15 Perkembangan NPL Kredit UMKM

pembiayaan kepada sektor prioritas, dan/atau perbankan yang memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berupa pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) harian sampai dengan sebesar 100 bps yang berlaku efektif sejak 1 Maret 2022. Adapun kewajiban pemenuhan RPIM yang tercantum dalam PBI Nomor 24/3/PBI/2022 dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Desember dan untuk pertama kali pada posisi Desember 2022 dengan penetapan target RPIM sesuai dengan penilaian mandiri bank tersebut. Dalam hal RPIM Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, target RPIM yang ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.

Di tingkat regional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia juga mendorong pengembangan UMKM melalui pemenuhan target Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Adapun target pengembangan tersebut di antaranya pengembangan UMKM *go marketplace*, UMKM *go cashless*, fasilitasi UMKM *go export*, dan pemberdayaan kelompok UMKM wanita. Selain dari target TPAKD, Kantor Perwakilan Bank Indonesia turut mengembangkan UMKM binaan Bank Indonesia melalui pembinaan, pendampingan, dan *business matching*, serta pembukuan melalui pelatihan pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) sehingga mempermudah UMKM memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.





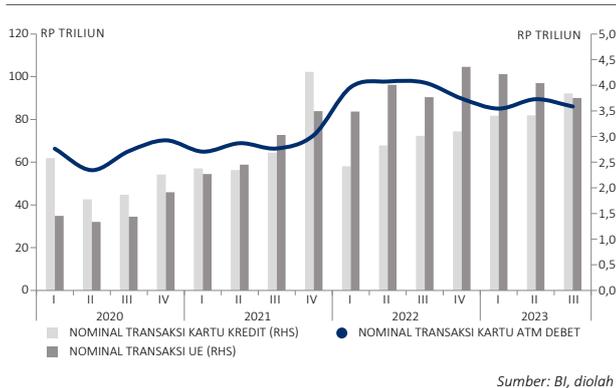


Bab V

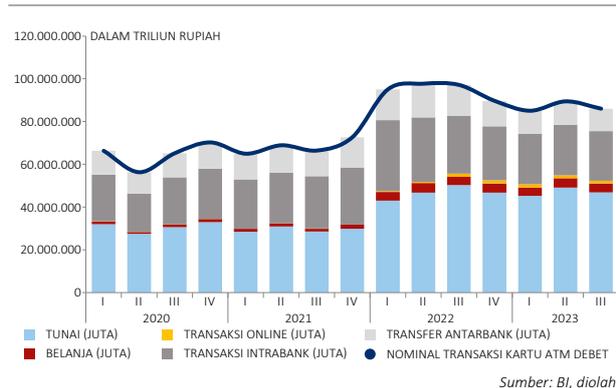
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan III-2023, transaksi sistem pembayaran menunjukkan peningkatan. Transaksi sistem pembayaran non-tunai menunjukkan persebaran penggunaan pada berbagai instrumen pembayaran. Di tengah peningkatan transaksi non tunai, nominal transaksi kartu ATM debit mengalami perlambatan pada triwulan III-2023 sejalan dengan normalisasi pola konsumsi masyarakat Sumatera Utara pasca HBKN pada triwulan II-2023. Daya beli masyarakat bawah masih didukung oleh penyerapan bantuan sosial yang sesuai dengan rencana. Akselerasi sistem pembayaran non tunai didukung oleh perbaikan transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Normalisasi pola konsumsi masyarakat Sumatera Utara juga tercermin pada perkembangan arus kas. Secara keseluruhan, aliran uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mencatatkan net inflow sebesar Rp3,7 triliun. Lebih lanjut, layanan kegiatan usaha penukaran valas (KUPVA) semakin meningkat seiring perbaikan mobilitas antar negara. Di sisi lain, transaksi transfer dana melalui PTD BB terus menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan aktivitas remitansi secara persisten.





Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debit, Kartu Kredit, dan UE



Grafik 5.2 Alokasi Penggunaan Kartu ATM Debit

5.1 SISTEM PEMBAYARAN MENUNJUKKAN TREN PENINGKATAN

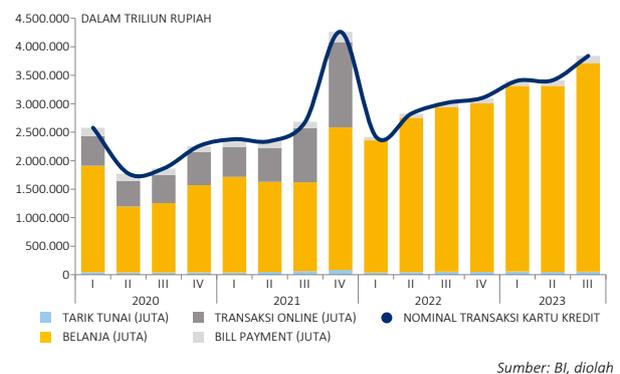
Pada triwulan III-2023, transaksi sistem pembayaran non-tunai menunjukkan peningkatan dengan penggunaan yang semakin tersebar pada berbagai instrumen pembayaran. Sejalan dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat Sumatera Utara, nominal transaksi menggunakan kartu kredit semakin menguat (Grafik 5.1). Meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai sejalan dengan preferensi masyarakat dalam menggunakan fasilitas kanal pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal). Pada triwulan III-2023, nominal transaksi kartu ATM debit dan Uang Elektronik (UE) di Sumatera Utara mengalami perlambatan. Namun demikian, secara proporsi nominal transaksi kartu ATM debit masih mendominasi di Sumatera Utara.

Nominal transaksi kartu ATM debit yang melambat pada triwulan III-2023 diindikasikan dengan normalisasi pola konsumsi masyarakat pasca HBKN Idul Fitri 1444H dan Idul Adha 1444H. Pada triwulan III-2023, nominal transaksi kartu ATM debit tercatat kontraksi pada angka -11.45% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II-2023 yaitu sebesar -8.46% (yoy) (Grafik 5.1). Penurunan nominal transaksi kartu ATM debit terlihat pada transaksi tarik tunai, belanja, transaksi online, dan transfer antarbank dan intrabank (Grafik 5.2). Hal ini sejalan dengan kembali normalnya pola konsumsi

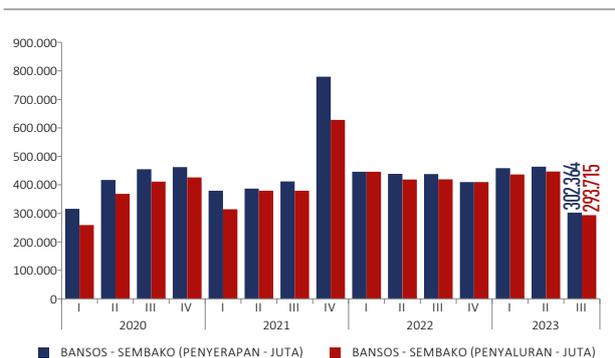
masyarakat pasca bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444H, dan Idul Adha 1444H.

Pertumbuhan ditunjukkan pada transaksi non tunai menggunakan kartu kredit yang tetap kuat seiring pemulihan daya beli dan perubahan preferensi masyarakat menuju non tunai. Pada triwulan III-2023, pertumbuhan nominal transaksi kartu kredit di Sumatera Utara yang menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 27.37% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya sebesar 20.75% (yoy). Lebih lanjut, pada nominal transaksi kartu kredit menunjukkan beberapa peningkatan diantaranya pada transaksi belanja dan *bill payment* masing-masing menjadi sebesar Rp3.6 triliun dan Rp124.5miliar pada triwulan III-2023 (Grafik 5.3).

Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah pun ditopang oleh penyerapan bantuan sosial (bansos) yang masih sesuai dengan rencana. Penyaluran program sembako dan Program Keluarga



Grafik 5.3 Alokasi Penggunaan Kartu Kredit

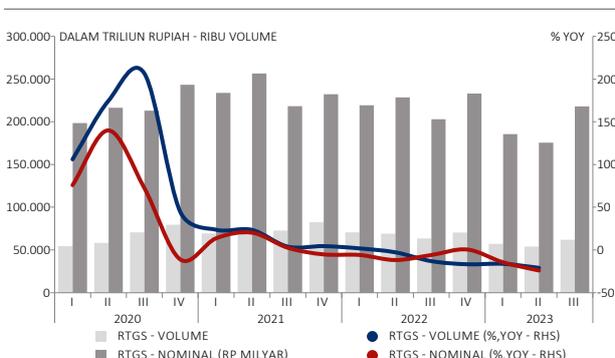


Sumber: Kementerian Sosial, diolah

Grafik 5.4 Perkembangan BPNT

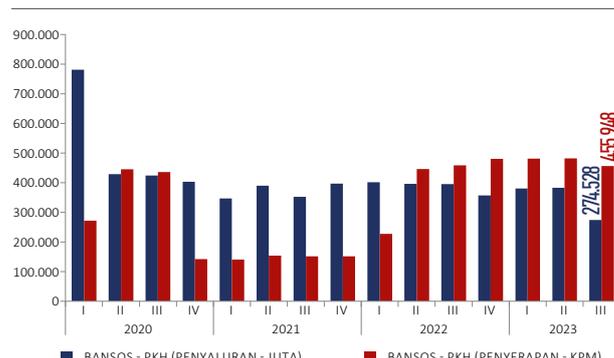
Harapan (PKH) tetap berjalan lancar. Pada penyaluran bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tetap berjalan dengan lancar. Pada triwulan III (Juli-Agustus) 2023, penyaluran BPNT tercatat Rp302,36 miliar dengan tingkat penyerapan 97,14% atau sebesar Rp293,72 miliar (Grafik 5.4). Hingga triwulan III 2023, mekanisme penyaluran BPNT di Sumatera Utara masih dilakukan melalui dua metode, yaitu metode tunai (PT. Pos) dan non tunai (Himbara dan BSI).

Sejalan dengan program BPNT, pada Program Keluarga Harapan (PKH) juga penyaluran masih berjalan lancar. Penyaluran PKH pada tahap III 2023 (Juli-Agustus) sebesar Rp455,95 Miliar, sementara dari sisi jumlah KPM penyerapan tercatat sebanyak 293,71 ribu KPM atau dengan tingkat penyerapan 98,53% yang menunjukkan penyerapan PKH masih berjalan dengan baik (Grafik 5.5).



Sumber: BI, diolah

Grafik 5.6 Perkembangan RTGS



Kementerian Sosial, diolah

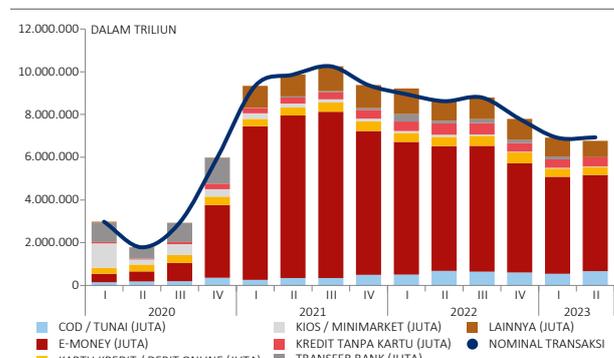
Grafik 5.5 Perkembangan PKH

Di sisi lain, transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) kembali pulih dan menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Perkembangan nominal transaksi sistem RTGS pada triwulan III-2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp218.0 triliun atau meningkat menjadi sebesar 7.5% (yoy). Sejalan dengan peningkatan nominal transaksi, volume transaksi RTGS pada triwulan III-2023 tercatat meningkat meskipun masih berada pada sisi kontraksi pada angka 61.8 ribu transaksi atau meningkat menjadi -2.41% (yoy), lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan II-2022 sebesar 53.9 ribu transaksi atau tumbuh sebesar -21.6% (yoy) (Grafik 5.6).

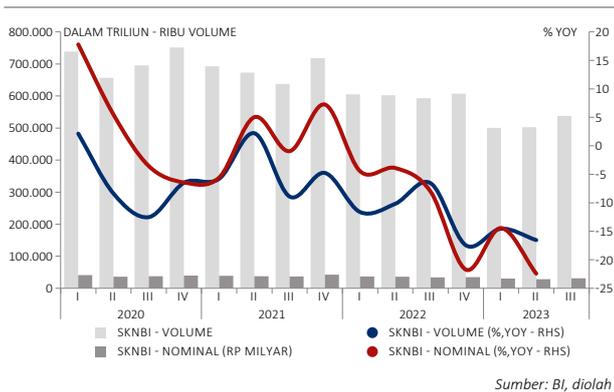
Transaksi e-commerce kembali menguat pada Triwulan III 2023.

Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan nominal transaksi e-commerce sebesar 0.5% (yoy) pada triwulan-III 2023 dengan nominal transaksi sebesar Rp3.5 triliun (Grafik 5.7).



Sumber: BI, diolah

Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi E-Commerce



Grafik 5.8 Perkembangan SKNBI

Peningkatan tersebut juga tercermin pada volume transaksi e-commerce yang meningkat menjadi 23.2 juta transaksi pada triwulan III-2023 dari yang sebelumnya 19.3 juta transaksi pada triwulan II-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku berbelanja secara online tetap meningkat meskipun kondisi paska pandemi kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbelanja secara tatap muka.

Penggunaan infrastruktur SKNBI kembali menunjukkan agresivitasnya, meskipun masih berada pada sisi kontraksi. Pada triwulan III-2023, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI menunjukkan tren peningkatan menjadi sebesar -8.4% (yoy), membaik dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar -22.8% (yoy). Perbaikan tersebut diiringi dengan peningkatan volume transaksi SKNBI yang menunjukkan peningkatan meskipun masih berada pada angka negatif menjadi sebesar -9.3% (yoy) (Grafik 5.8). Perbaikan ini merupakan indikasi persebaran preferensi masyarakat dalam bertransaksi khususnya ketika melakukan transfer dana antar bank. Munculnya berbagai inovasi di sistem pembayaran memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih infrastruktur pembayaran yang efisien dan handal sesuai dengan preferensi masing-masing.

5.2 PROGRAM ELEKTRONIFIKASI BERJALAN LANCAR

Perkembangan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus terakselerasi.

Peningkatan penggunaan uang elektronik ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah *merchant* QRIS di Sumatera Utara. QRIS merupakan standardisasi pembayaran melalui metode *QR Code* atau kode baca cepat dari Bank Indonesia sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

Pada triwulan III-2023, jumlah *merchant* QRIS di Sumatera Utara sebanyak 1.12 juta *merchant* atau tumbuh sebesar 23,38% (yoy). Sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan daerah melalui kemudahan sistem pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal), Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) terus berupaya mendorong perluasan implementasi QRIS sebagai solusi transaksi pembayaran digital. Edukasi dan sosialisasi pembayaran digital intensif dilakukan guna mendorong akseptasi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut jumlah pengguna QRIS di Sumatera Utara tercatat telah mencapai 2.04 juta pengguna pada triwulan III 2023 atau tumbuh 80,88% (yoy). Dalam rangka mendorong akseptasi pembayaran non-tunai, pada triwulan III 2023 telah dilaksanakan berbagai inisiasi program diantaranya Pekan QRIS Nasional, Medan Digi Festival, *User Experience* QRIS Festival Buah dan Bunga Tanah Karo, Festival Oang-Oang Pakpak Bharat dan lainnya.

Guna mendukung percepatan transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, program elektronifikasi di Sumatera Utara terus diperluas. Perluasan dilakukan ke beberapa sektor seperti moda transportasi, pariwisata, hingga transaksi keuangan Pemerintah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi belanja dan pendapatan Pemerintah Daerah dari tunai menjadi *non* tunai. ETPD bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi di bidang sistem pembayaran.



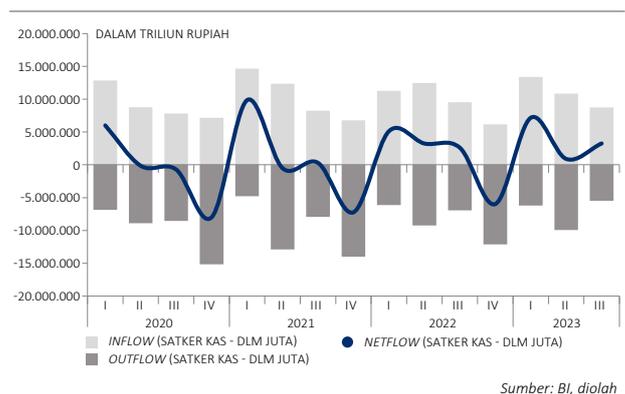
Secara semesteran perkembangan digitalisasi daerah tercermin pada Indeks ETPD. Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya. Implementasi ETPD terus diperluas baik dari sisi perluasan elektronifikasi transaksi maupun pemanfaatan kanal pembayaran digital menjadi faktor yang mendorong peningkatan angka Indeks ETPD di Wilayah Sumatera Utara.

Adapun skor IETPD pada periode Semester II- 2023 terdapat 30 Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahap Digital dan 4 Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahap Maju. Selanjutnya, implementasi ETPD terus diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan TP2DD di daerah diantaranya pelaksanaan *Capacity Building* TP2DD se wilayah Sumatera Utara, Rapat Koordinasi TP2DD, *High Level Meeting* TP2DD, implementasi Kartu Kредu Indonesia (KKI) dan lainnya.

5.3 ALIRAN UANG KARTAL MENGALAMI NET INFLOW

Pada triwulan III-2023, arus kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menunjukkan *net inflow* pada angka Rp3.7 triliun. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah aliran kas inflow (*inflow*) kepada Bank Indonesia se-Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar Rp8.7 triliun seiring dengan normalisasi pola konsumsi masyarakat Sumatera Utara pasca perayaan HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1444H pada triwulan II-2023. Sementara itu, transaksi *outflow* mengalami penurunan dari Rp 9.9 triliun pada triwulan II-2023 menjadi Rp 5.5 triliun pada triwulan III-2023 (Grafik 5.9).

Pada triwulan III-2023, arus kas pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia menunjukkan net outflow sebesar Rp702.6 miliar, lebih rendah jika dibandingkan



Grafik 5.9 Perkembangan Inflow - Outflow

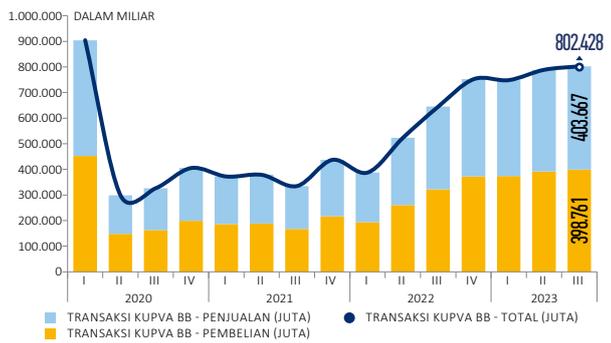
dengan triwulan II-2022 yang tercatat sebesar Rp1,4 triliun. Kondisi tersebut sesuai dengan pola tahunan arus kas pada Kas Titipan.

Jumlah uang palsu yang ditemukan melalui perbankan maupun yang dilaporkan secara langsung oleh masyarakat di Sumatera Utara selama triwulan III-2023 mengalami penurunan secara persisten. Pada triwulan III-2023, temuan uang palsu di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebanyak 742 lembar, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II-2023 yaitu sebanyak 751 lembar. Sebagai upaya pengendalian peredaran uang palsu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara secara rutin melakukan edukasi pengenalan ciri ciri keaslian uang Rupiah dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan uang palsu di masyarakat.

5.4 ALIRAN TRANSFER DANA LINTAS NEGARA TETAP KUAT

Dukungan pasar keuangan, termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat, diperlukan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah dan perekonomian. Oleh karena itu, aturan transaksi valas terhadap Rupiah antara penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dengan pihak lain diselenggarakan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.



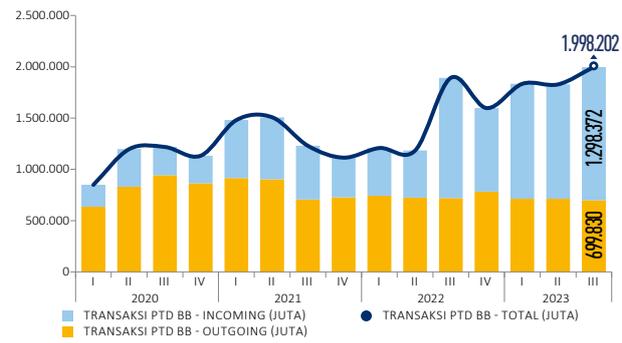


Sumber: BI, diolah

Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Pada triwulan III 2023, terdapat 36 KUPVA BB berizin di Sumatera Utara. Transaksi KUPVA BB tercatat sebesar 802,43 miliar atau tumbuh 24,44% (yoy) (Grafik 5.10). Peningkatan tersebut sejalan dengan terus menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat baik yang mendorong meningkatnya penukaran valuta asing. Adapun transaksi KUPVA masih didominasi pada beberapa mata uang ASIA seperti MYT, THB, dan SGD.

Transfer dana merupakan kegiatan pemindahbukuan sejumlah dana kepada penerima yang diawali dengan perintah pengiriman yang disebut perintah transfer dana, hingga dana diterima oleh penerima. Bank Indonesia juga mengatur proses perizinan, penyelenggaraan transfer dana, dan penyampaian laporan oleh penyelenggara. Tujuannya, menjamin



Sumber: BI, diolah

Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi PJP-LR

keamanan dan kelancaran transfer dana. Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana wajib memperoleh izin Bank Indonesia.

Pada triwulan III-2023, terdapat 8 Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP-LR) berizin di Sumatera Utara, dengan total kegiatan transaksi dana mencapai Rp1.99 triliun atau meningkat 5,57% (yoy) dengan nominal transaksi dana yang masuk sebesar Rp699,83 miliar, sementara transaksi dana yang keluar sebesar Rp1,29 triliun (Grafik 5.11). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya yang mendorong meningkatnya aktivitas transfer dana baik dari Singapura, Malaysia, dan lainnya.



Halaman ini sengaja dikosongkan



▶ BOKS 3

Perluasan Akseptasi Digital Melalui Program Medan Digifestival 2023



Medan Digifestival 2023 merupakan program yang diinisiasi KPwBI Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan *awarness* masyarakat terkait dengan keuangan digital dan perlindungan konsumen, sejalan dengan upaya strategi pencapaian target QRIS tahun 2023 yaitu 885 ribu pengguna baru dan 25

juta volume transaksi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XI Bp. H. Hidayatullah, Rektor Universitas Sumatera Utara Bp.Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, serta pimpinan perbankan wilayah Sumatera Utara.

Medan Digifestival 2023 diselenggarakan dengan berkolaborasi bersama Universitas Sumatera Utara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Musyawaran Pebankan Daerah (BMPD), Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK) Sumatera Utara, PJP Bank dan Non Bank, dalam rangka mendorong peningkatan inklusivitas dan literasi keuangan digital masyarakat. Kegiatan diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam memanfaatkan berbagai inovasi digital secara optimal dan turut berkontribusi dalam mendorong penguatan ekonomi Nasional khususnya Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan pada 25 sd 27 Agustus 2023 di Pendopo Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

Adapun bentuk kegiatan diantaranya (1) Bazaar kuliner dan craft yang menghadirkan 30 tenant UMKM dan 12 pelaku ekonomi kreatif serta pelaksanaan *workshop* disetiap harinya, (2) Digitalk Series, yang mana terdapat 3 sesi *talkshow* yang dihadiri oleh 658 peserta, (3) Berbagai perlombaan seperti Ranking 1, Sempoa, Digifest Idol, dan K-POP Dance, (4) Pojok inklusi keuangan yang Berkolaborasi bersama 11 PJP (BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, BCA, Nobu Bank, Bank Mestika, Top Remit, Ovo, Bank Sumut) baik



Gambar B3.1 Opening Ceremony Medan Digifestival 2023



Gambar B3.2 Dokumentasi Kegiatan Medan Digifestival 2023

bank maupun non bank terkait pengenalan layanan keuangan digital PJP serta pengenalan perlindungan konsumen kepada masyarakat, (5) Digimaze edu (labirin edukasi) yang merupakan edukasi interaktif kebanksentralan serta perkembangan keuangan digital di Indonesia. Media dibuat interaktif dan edukatif dengan berbagai *games* menarik didalamnya, (6) Digiradio atau media siaran seperti *live on radio*, yang mana pengunjung bisa kirim pesan atau kesan dan *request* lagu, dan menjadi media edukasi untuk bincang-bincang terkait keuangan digital dan CBP, (7) dan hiburan lainnya seperti konser musik, funwalk, *user experience* QRIS. Selama kegiatan berlangsung, Tercatat sebanyak **± 10.000 pengunjung** Medan Digifestival dengan rata-rata kunjungan **±3.000 pengunjung/hari** dengan Total transaksi menggunakan QRIS sebanyak **21.364 transaksi**.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Foto : Mesjid Rata Medan, Sumatera Utara
Sumber : Shutterstock



Bab VI

Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 menjadi 5,89% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,16%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,53% pada bulan Agustus 2022 menjadi 71,06% pada bulan Agustus 2023. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 8,15% dari 8,33% pada bulan September 2022. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini pun turut membaik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.

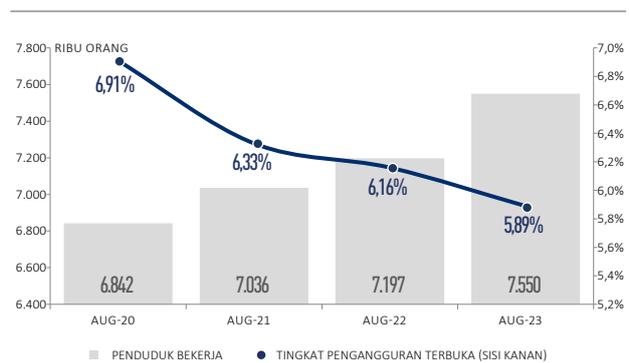


Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Utara pada Agustus 2023 mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Agustus 2023 tercatat 5,89% atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 6,16%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 71,06% pada Agustus 2023, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,53%. Peningkatan serapan tenaga kerja terbesar terjadi pada LU Perdagangan Besar Eceran, LU Akomodasi dan Makan Minum, dan LU Pengangkutan dan Pergudangan dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,97%, 0,47%, dan 0,38%.

Jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan mengalami penurunan. Angka kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 8,15% dari jumlah penduduk, menurun dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 8,33%. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang, dari 1,26 juta orang pada September 2022 menjadi 1,24 juta orang pada Maret 2023.

Ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin melalui rasio Gini mengalami penurunan. Rasio Gini Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 0,309, lebih rendah dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,326. Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan.

6.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN SUMATERA UTARA MENGALAMI PERBAIKAN



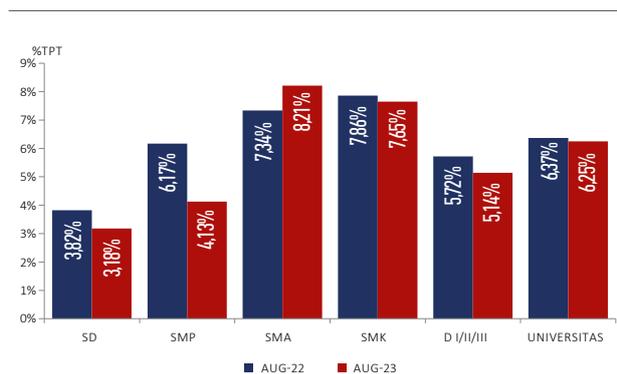
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara

Tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada Agustus 2023 menurun, tercermin dari indikator TPT yang turun dibanding tahun lalu menjadi 5,89% - (Grafik 6.1). Pada periode laporan, terdapat 472 ribu pengangguran di Sumatera Utara atau mengalami penurunan sebesar seribu pengangguran dalam satu tahun. Kondisi TPT pada periode laporan yang mengalami penurunan mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Meski demikian, angka TPT Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan angka TPT Nasional yang saat ini tercatat 5,32%. Lebih lanjut, dibandingkan provinsi lainnya, Sumatera Utara menempati posisi ke-9 persentase TPT tertinggi dari total 34 provinsi.

Penurunan TPT terjadi utamanya di wilayah perkotaan. Pada Agustus 2023, TPT di wilayah perkotaan berada pada angka 7,62%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,67%, dengan penurunan sebesar 1,05% poin. Sementara itu, TPT di wilayah perdesaan pada Agustus 2023 sebesar 3,72%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,11%, dengan kenaikan sebesar 0,61% poin.

Penurunan TPT paling besar terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) - (Grafik 6.2). Tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMP pada Agustus 2023 sebesar 4,13%, menurun dibandingkan Agustus 2022 sebesar 6,17%. Sejalan dengan perkembangan tersebut, tingkat pengangguran terbuka pada lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah

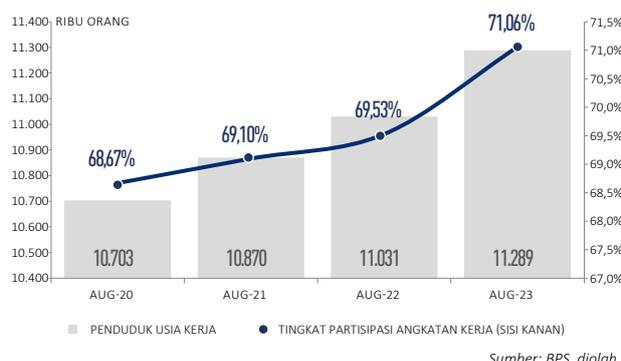


Grafik 6.2 TPT Menurut Jenjang Pendidikan

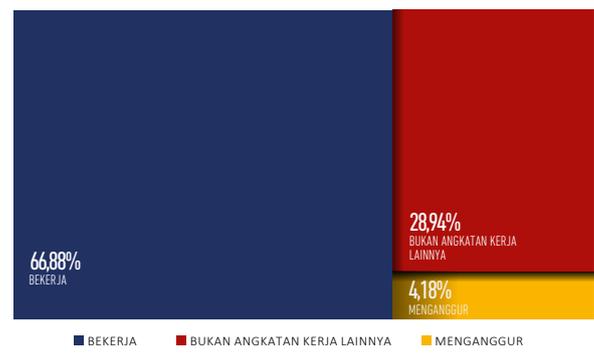
Menengah Kejuruan (SMK), Diploma, dan Universitas juga mengalami penurunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja pada Agustus 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara meningkat sebesar 352 ribu orang, dari 7,67 juta orang per Agustus 2022 menjadi 8,02 juta orang per Agustus 2023. Sama halnya dengan angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 353 ribu orang menjadi 7,55 juta orang pada Agustus 2023 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,20 juta orang. Adapun pangsa penduduk bekerja di Sumatera Utara adalah sebesar 66,68% - (Grafik 6.3).

TPAK Sumatera Utara Agustus 2023 mengalami perbaikan. Angka TPAK pada Agustus 2023 sebesar



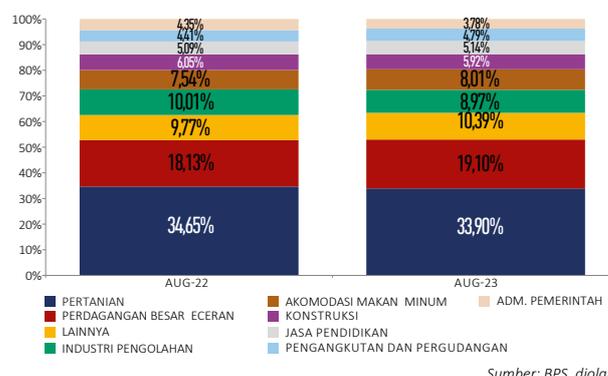
Grafik 6.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK



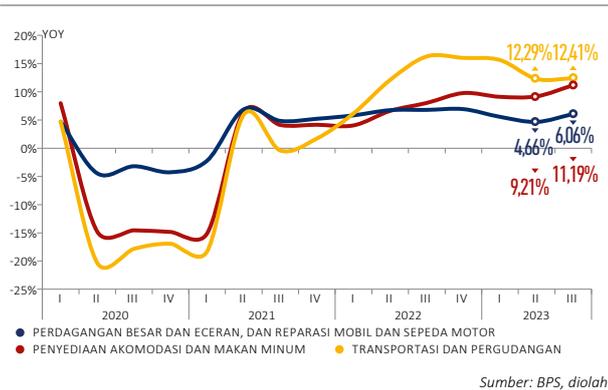
Grafik 6.3 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

71,06% meningkat dibandingkan Agustus 2022 sebesar 69,53%. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Hal serupa terjadi pada jumlah penduduk usia kerja yang juga meningkat dari 11,03 juta orang pada Agustus 2022 menjadi 11,29 juta orang pada Agustus 2023 – (Grafik 6.4). Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja diikuti pula oleh jumlah serapan tenaga kerja.

Meningkatnya kondisi perekonomian pada tahun 2023 berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja pada sebagian besar LU. Pada Agustus 2023, LU yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja dibandingkan tahun lalu di antaranya pada LU Perdagangan Besar Eceran, LU Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Pengangkutan dan Pergudangan - (Grafik 6.5). Peningkatan serapan tenaga kerja pada ketiga LU tersebut sejalan dengan



Grafik 6.5 Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha

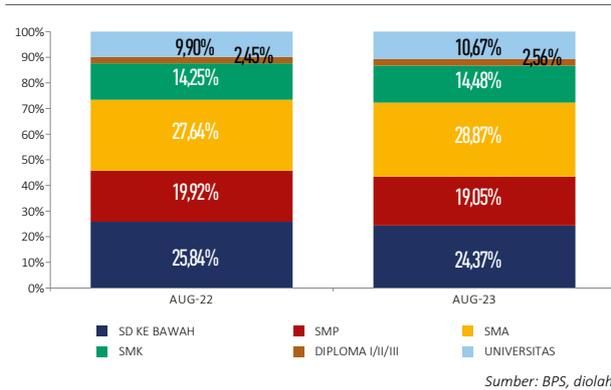


Grafik 6.6 Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III-2023 – (Grafik 6.6). Meningkatnya daya beli masyarakat dan membaiknya aktivitas perekonomian menjadi faktor pendorong pertumbuhan PDRB, yang kemudian berimplikasi pada serapan tenaga kerja yang meningkat.

Pada LU Perdagangan Besar Eceran, pangsa serapan tenaga kerja pada Agustus 2023 sebesar 19,10%, meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 18,13% seiring dengan membaiknya aktivitas perekonomian. Selanjutnya pangsa serapan tenaga kerja pada LU Akomodasi dan Makan Minum meningkat dari 7,54% pada Agustus 2022 menjadi 8,01% pada Agustus 2023. Perbaikan serapan tenaga kerja pada LU Akomodasi dan Makan Minum sejalan dengan pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan III-2023 yang didorong oleh meningkatnya aktivitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE). Lebih lanjut pada LU Pengangkutan dan Pergudangan, pangsa serapan tenaga kerja pada Agustus 2023 sebesar 4,79%, meningkat dari periode sama tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 4,41%, seiring dengan mobilitas yang meningkat dibandingkan tahun lalu sehingga mendorong kinerja LU Transportasi dan Pergudangan.

Di sisi lain, serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengalami penurunan, meski tetap menjadi dominasi serapan tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara. Pangsa serapan tenaga kerja LU



Grafik 6.7 Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

Pertanian pada Agustus 2023 sebesar 33,90%, turun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 34,65% – (Grafik 6.5). Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk bekerja di LU Pertanian pada Agustus 2023 yang menurun menjadi 2,56 juta orang dibandingkan Agustus 2022 sebanyak 2,49 juta orang. Penurunan serapan tenaga kerja pada LU Pertanian mengindikasikan penurunan minat penduduk bekerja pada LU tersebut, sehingga perlu diwaspadai.

Dari sisi tingkat pendidikan, tenaga kerja berpendidikan atas dan tinggi mendominasi struktur tenaga kerja di Sumatera Utara. Pangsa jumlah pekerja berpendidikan atas dan tinggi atau tenaga kerja yang menempuh pendidikan minimal SMA/SMK di Sumatera Utara adalah sebesar 56,58% pada Agustus 2023, meningkat dibandingkan pada Agustus 2022 sebesar 54,24%. Namun demikian, tenaga kerja jenjang pendidikan atas dan tinggi ini tidak seluruhnya mampu terserap di industri. Hal ini terkonfirmasi dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka untuk jenjang pendidikan tersebut. Sementara untuk tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah memiliki pangsa 43,42%, dengan rincian tenaga kerja berpendidikan SMP sebanyak 19,05% dan SD ke bawah sebanyak 24,37% dari total tenaga kerja – (Grafik 6.7).

Indikator lain kondisi ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja dengan jam kerja penuh yang meningkat dari 4,96 juta orang per Agustus 2022 menjadi 5,07 juta orang per Agustus 2023.



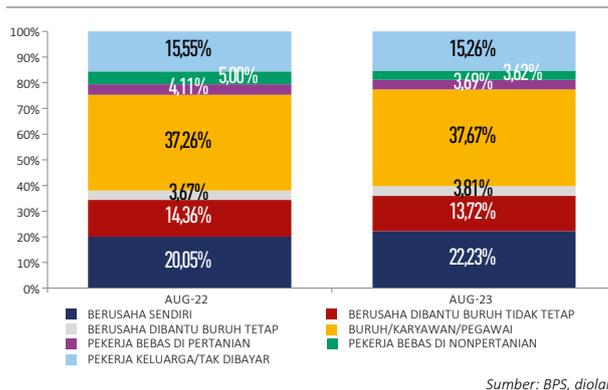
Tabel 6.1 Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh)

Klasifikasi Pekerja	Jumlah Pekerja (Ribuan Orang)					(yoy)
	Aug-20	Aug-21	Aug-22	Aug-23	Selisih	
Pekerja Penuh (≥35 jam per minggu)	4.317	4.440	4.960	5.066	106	2,14%
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam per minggu)	2.525	2.596	2.237	2.484	247	11,04%
-Setengah Penganggur	713	681	492	508	16	3,25%
-Pekerja Paruh Waktu	1.812	1.915	1.745	1.976	231	13,24%
Jumlah	6.842	7.036	7.197	7.550	353	4,90%

Sumber : BPS, diolah

Pekerja penuh adalah pekerja yang bekerja 35 jam per minggu atau lebih. Lebih lanjut, penduduk yang bekerja 1-34 jam kerja per minggu atau biasa disebut sebagai pekerja tidak penuh, pada Agustus 2023 ini mengalami kenaikan menjadi 2,48 juta orang dari tahun sebelumnya sebesar 2,24 juta orang – (Tabel 6.1). Peningkatan jumlah pekerja penuh dan jumlah pekerja tidak penuh mengindikasikan kondisi perekonomian yang membaik di mana lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja baik jam kerja penuh maupun tidak penuh semakin meningkat.

Tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mendominasi komposisi status pekerjaan utama tenaga kerja di Sumatera Utara. Dari sisi status pekerjaan utama, tenaga kerja di Sumatera Utara didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai dengan pangsa sebesar 37,67%. Namun demikian, minat berwirausaha pada tenaga kerja di Sumatera Utara juga cukup tinggi, tercermin dari pangsa tenaga kerja yang berusaha sendiri sebesar 22,23%, menempati



Grafik 6.8 Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

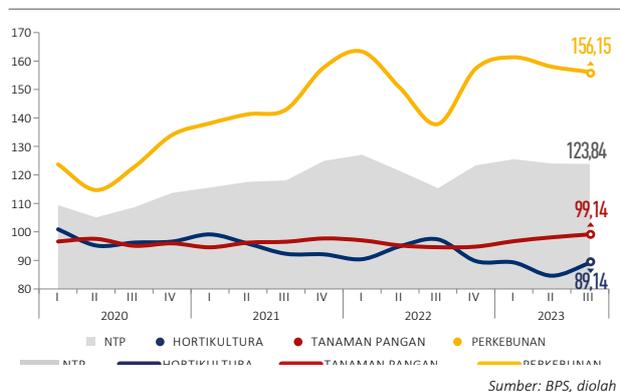
posisi kedua pangsa tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan utama terbesar di Sumatera Utara - (Grafik 6.8).

6.2 KESEJAHTERAAN

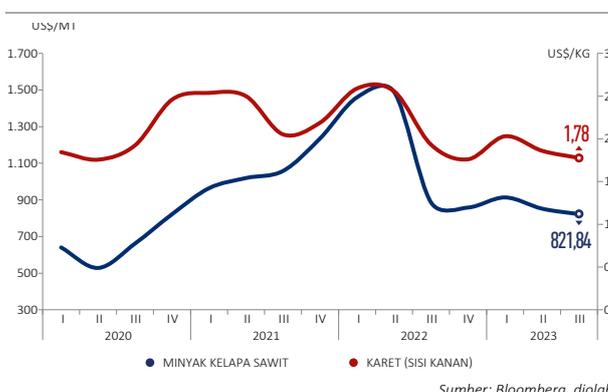
6.2.1 Nilai Tukar Petani

Pada triwulan III-2023, kesejahteraan petani di Sumatera Utara mengalami penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara pada triwulan III-2023 sebesar 123,84 atau turun 0,20 basis poin dibandingkan dengan triwulan II-2023 yang sebesar 124,04 – (Grafik 6.9).

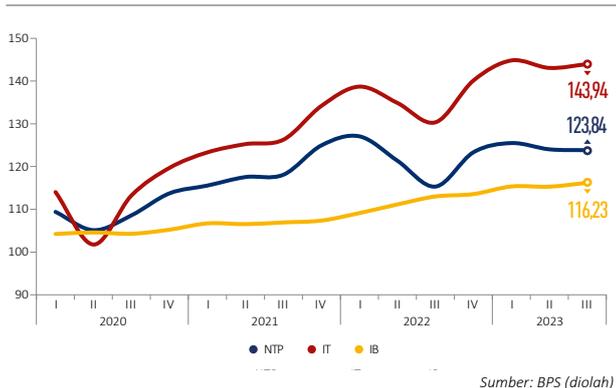
Penurunan NTP pada triwulan III-2023 didorong utamanya penurunan NTP pada subLU Perkebunan Rakyat. NTP subLU Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) Sumatera Utara pada triwulan III-2023 tercatat mengalami penurunan yang signifikan sebesar 156,15 atau turun 1,84 basis poin dari sebelumnya 157,99 di



Grafik 6.9 Perkembangan Nilai Tukar Petani



Grafik 6.10 Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan



Grafik 6.11 IT dan IB Sumatera Utara

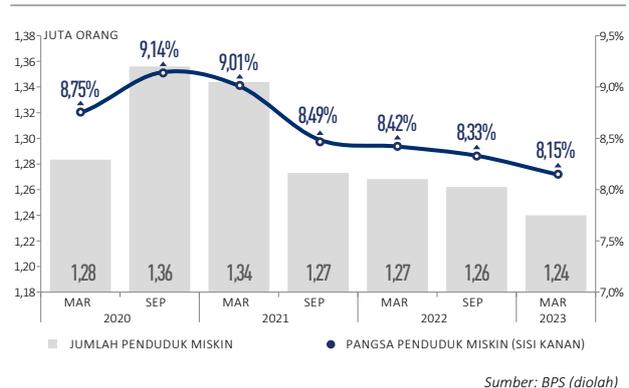
triwulan II-2023 – (Grafik 6.9). Tren penurunan harga minyak kelapa sawit dan karet selama triwulan III-2023 menjadi penyebab utama penurunan NTPR – (Grafik 6.10). Di sisi lain, NTP tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 1,02 basis poin dari 98,12 di triwulan II-2023 menjadi 99,14 di triwulan III-2023. Hal yang sama juga terjadi pada NTP subLU hortikultura yang mengalami kenaikan 4,50 basis poin menjadi 89,14 dari triwulan sebelumnya sebesar 84,64 – (Grafik 6.9).

Meski tren NTP termoderasi, tingkat penerimaan petani mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Pada triwulan III-2023, indeks yang diterima petani (IT) sebesar 143,94, sementara indeks yang dibayarkan petani (IB) sebesar 116,23, sehingga secara umum petani Sumatera Utara pada triwulan III-2023 mengalami kondisi surplus – (Grafik 6.11). Meski secara keseluruhan NTP Sumatera Utara berada di atas level 100, NTP di atas 100 hanya dialami oleh petani yang bekerja di subLU Perkebunan seiring dengan tetap tingginya permintaan CPO sejak triwulan I-2020. Sementara itu, subLU tanaman pangan dan hortikultura tetap meneruskan tren NTP di bawah 100 yang sudah berlangsung setidaknya sejak 2017.

6.2.2 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Mengalami Penurunan

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berkurang. Angka kemiskinan¹ di Sumatera Utara pada Maret 2023 sebesar 8,15% dari jumlah

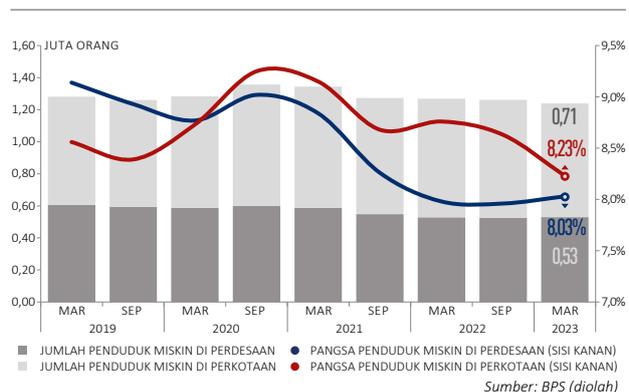
¹ Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan



Grafik 6.12 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara

penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 8,33%. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,26 juta orang pada September 2022 menjadi 1,24 juta orang pada Maret 2023 – (Grafik 6.12). Adapun angka kemiskinan di Sumatera Utara tersebut lebih rendah daripada nasional sebesar 9,36%.

Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan, sementara di pedesaan justru mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebanyak 710 ribu orang atau turun sebesar 0,4% dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 710 ribu orang atau meningkat 0,07% secara triwulanan. Tingkat kemiskinan di pedesaan yang sebesar 8,03% lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan yang sebesar 8,23% - (Grafik 6.13). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 lebih berdampak pada daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.



Grafik 6.13 Jumlah Penduduk Miskin di Pedesaan dan Perkotaan



Tabel 6.2 Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan

Perkotaan		Pedesaan	
Jenis Komoditas	Sumbangan	Jenis Komoditas	Sumbangan
Makanan	74,77%	Makanan	77,99%
Beras	20,76%	Beras	29,79%
Rokok kretek filter	12,63%	Rokok kretek filter	9,94%
Tongkol/tuna/cakalang	4,35%	Tongkol/tuna/cakalang	3,43%
Daging Ayam Ras	3,89%	Telur Ayam Ras	3,22%
Telur Ayam Ras	3,82%	Cabai Merah	2,88%
Cabai Merah	3,09%	Daging Ayam Ras	2,71%
Bukan Makanan	25,23%	Bukan Makanan	22,29%
Perumahan	6,12%	Perumahan	5,69%
Bensin	3,91%	Bensin	3,01%
Listrik	2,98%	Pendidikan	1,79%
Pendidikan	2,37%	Listrik	1,70%
Perlengkapan Mandi	1,25%	Perlengkapan Mandi	1,26%
Angkutan	1,01%	Sabun Cuci	0,91%

Sumber : BPS, diolah

Komoditas makanan menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan.

Komoditas makanan menyumbang garis kemiskinan terbesar, dengan andil 74,77% di perkotaan dan 77,99% di pedesaan. Terdapat 5 (lima) komoditas utama pada komponen makanan dengan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, yakni beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun komoditas pada kelompok bukan makanan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan Sumatera Utara adalah perumahan, bensin, pendidikan, dan listrik (Tabel 6.2).

Berkurangnya jumlah penduduk miskin sejalan dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Sepanjang September 2022 hingga Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan (P1) naik dari 1,41 menjadi 1,26. Penurunan P1 terjadi di pedesaan dan perkotaan. Di sisi lain, indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun dari 0,339 menjadi 0,324 – (Grafik 6.14). Penurunan P2 terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Turunnya P1 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mampu mengikuti peningkatan garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.14 Indeks Kedalaman dan Keparahahan Kemiskinan

Selanjutnya turunnya indeks P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran konsumsi semakin baik atau merata.

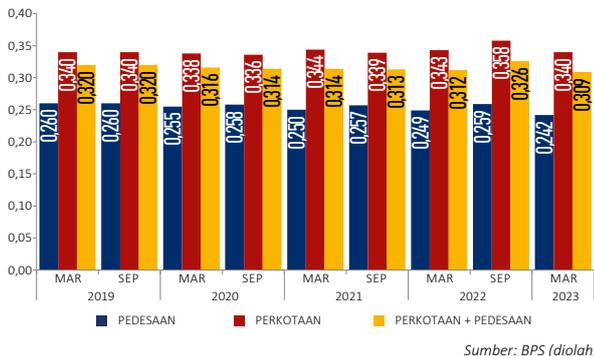
6.2.3 Ketimpangan Pendapatan Mengalami Penurunan

Ketimpangan pendapatan penduduk mengalami penurunan, sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan dinyatakan melalui rasio gini dengan interval 0 - 1. Rasio Gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam. Rasio Gini Sumatera Utara pada Maret 2023 adalah sebesar 0,309, lebih rendah daripada September 2022 yang sebesar 0,326 – (Grafik 6.15). Rasio ini menunjukkan ketimpangan di Sumatera Utara pada Maret 2023 yang sedikit lebih rendah daripada ketimpangan pada September 2022. Rasio gGini Sumatera Utara juga tercatat masih lebih rendah daripada rasio Gini nasional yang sebesar 0,388.

Ketimpangan di perkotaan lebih besar dari pedesaan. Pada Maret 2023, rasio Gini di wilayah perkotaan Sumatera Utara mencapai angka 0,340, menurun dari periode September 2022 yang sebesar 0,358 dan lebih besar dibandingkan rasio Gini di pedesaan, yakni 0,242 – (Grafik 6.15).

Berdasarkan distribusi pengeluaran, ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan di Sumatera Utara berada dalam kategori rendah. Pangsa



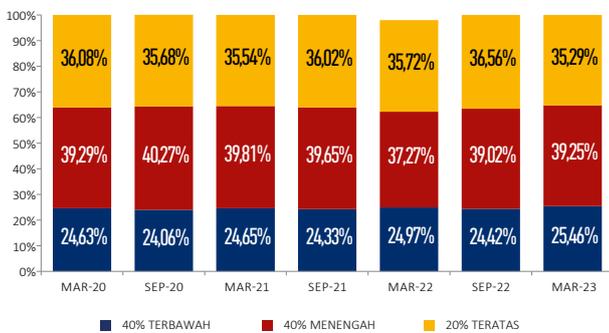


Grafik 6.15 Perkembangan Rasio Gini

Sumber: BPS (diolah)

pengeluaran kelompok 40% terbawah penduduk perkotaan di Sumatera Utara yang sebesar 20,95% menunjukkan ketimpangan yang rendah² - (Grafik 6.16). Porsi ini sedikit meningkat dari September 2022 yang sebesar 19,96%. Untuk menekan rasio Gini, pengeluaran per kapita kelompok 40% terbawah perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan bantuan pendapatan melalui program bantuan sosial kepada masyarakat ekonomi produktif, terutama untuk membangun usaha kembali pascapandemi.

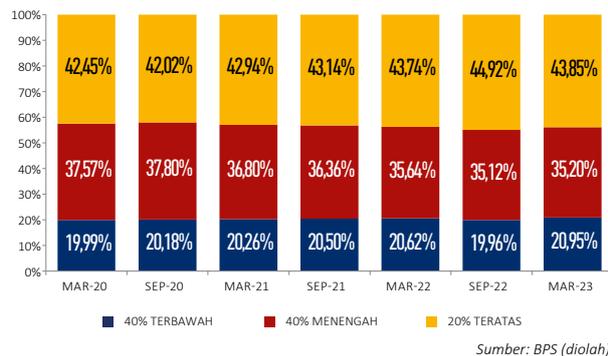
Sementara itu, ketimpangan pengeluaran penduduk perdesaan di Sumatera Utara juga masuk dalam kategori rendah, dimana pangsa 40% kelompok masyarakat dengan pendapatan terbawah mencapai 25,46% - (Grafik 6.17). Porsi ini meningkat dari September 2022 dengan pangsa sebesar 24,42%. Selanjutnya pangsa 40% kelompok



Grafik 6.17 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan

Sumber: BPS (diolah)

² Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, tingkat ketimpangan dalam kategori rendah apabila di atas 17%.



Grafik 6.16 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan

Sumber: BPS (diolah)

masyarakat berpendapatan menengah di wilayah perdesaan naik menjadi 39,25%. Sementara itu, 20% kelompok masyarakat berpendapatan teratas menurun menjadi 35,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah perdesaan Sumatera Utara semakinimbang dibandingkan penduduk di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah perdesaan yang relatif lebih serupa dibandingkan di wilayah perkotaan.

Secara umum, pembangunan modal manusia dapat mendukung pemerataan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat ditekan melalui pemberian kemudahan akses penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya adalah akses pendidikan dan akses kesehatan, yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan memberikan kemudahan akses penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka IPM yang berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia akan membaik.

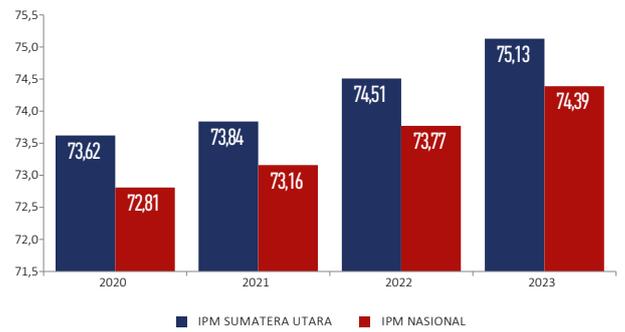
Pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara menjadi 75,13 atau meningkat dari 2022 yang sebesar 74,51 – (Tabel 6.3). Peningkatan IPM didorong oleh perbaikan seluruh komponen. Pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara berada di atas IPM Nasional yang sebesar 74,39 – (Grafik 6.18).



Tabel 6.3 IPM Sumut Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	73,00	73,10	73,39	73,67
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,31	13,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,58	9,71	9,82
Pengeluaran per Kapita	Rp Ribu	10.420,00	10.499,00	10.848,00	11.049,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	73,62	73,84	74,51	75,13
Pertumbuhan IPM (yoy)	%	3,43	0,30	0,91	0,83

Sumber: BPS (diolah)



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 6.18 Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional





Foto : Pantai Sorake, Nias Selatan, Sumatera Utara
Sumber : Shutterstock



Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah

Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat, yakni bias atas dalam kisaran 4,3-5,1% (yoy).

Permintaan masyarakat yang kembali pulih dan daya beli masyarakat yang meningkat tercermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai seperti: i) perlambatan ekonomi global yang diiringi dengan tertahannya permintaan ekspor dan koreksi harga komoditas unggulan Sumut; ii) pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respon dari ketatnya pasar tenaga kerja; serta iii) ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. Selanjutnya, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan optimalisasi anggaran pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi sesuai sasaran.

Sedangkan pada 2024, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada rentang 4,5-5,3% (yoy),

meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global, dampak kebijakan moneter, dan konflik geopolitik. Kenaikan pendapatan dan program sosial akan mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh didorong oleh Pemilu dan PON 2024. Namun, faktor-faktor ini bisa dibatasi oleh tingginya suku bunga dan ketidakpastian global. Kinerja ekspor diperkirakan melambat, sedangkan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan diperkirakan meningkat. Stabilitas inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran target $2,5\pm 1\%$, dengan fokus pada sinergi kebijakan antar pemerintah dan Bank Indonesia, serta inisiatif GNPIP dan pengendalian harga strategis.



7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

7.1.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2023

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2023 diperkirakan berada pada bias atas kisaran 4,3-5,1% (yoy). Proyeksi kisaran ini meningkat dibanding sebelumnya yang berada pada kisaran 3,9-4,7% (yoy) seiring dengan kuatnya permintaan domestik yang di atas ekspektasi sebelumnya.

Dari sisi eksternal, ekonomi global masih berada dalam ketidakpastian dengan berbagai dampak lonjakan seperti konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang terakumulasi. Dampak tersebut ditunjukkan dari munculnya *pent-up demand* setelah sebelumnya tertahan hampir 3 tahun, disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi, hingga meningkatnya tingkat inflasi yang mengarah pada pengetatan kebijakan moneter global. Meski demikian, pengetatan kebijakan moneter global dapat menahan gejolak Perbankan Amerika Serikat dan Swiss sehingga mengurangi risiko langsung gejolak sektor keuangan. Dalam publikasi terkininya, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,0% (yoy), dengan revisi 0,2% ke atas dibandingkan proyeksi pada bulan April 2023 – (Tabel 7.1).

Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75% pada bulan Agustus 2023. Bank Indonesia meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada pada kisaran $3,0\pm 1\%$ pada sisa tahun 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ pada triwulan III 2023. Pengendalian inflasi juga terus diperkuat melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Aktivitas ekonomi juga terus ditingkatkan dengan memberikan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan baik *event* internasional, nasional, maupun kedaerahan. Berlanjutnya berbagai insentif pemerintah, penyusunan aturan terkait pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, serta permintaan domestik yang tetap kuat diperkirakan mampu menjaga pemulihan ekonomi Sumatera Utara sepanjang tahun 2023.

7.1.1.1 Komponen Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan terakselerasi dari tahun sebelumnya.

Ekspektasi perekonomian domestik yang tetap kuat didukung dengan membaiknya pendapatan karena meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) di tengah berlanjutnya konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global diperkirakan dapat menjaga konsumsi rumah tangga. Masih berlanjutnya berbagai insentif pemerintah di tahun 2023, seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) / kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, dan kartu pra kerja diperkirakan dapat menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, ketidakpastian global yang diperkirakan tetap tinggi serta ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang dibayangi potensi resesi, berisiko meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan aktivitas konsumsi. Selanjutnya, prakiraan masih tingginya suku bunga di tahun 2023 diperkirakan dapat menahan permintaan kredit.

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan menguat seiring meningkatnya pagu anggaran belanja pemerintah daerah. Prospek ekonomi nasional yang lebih baik pada tahun 2023 diperkirakan mendorong optimisme Pemda untuk meningkatkan target penerimaannya, seperti pajak terkait kendaraan bermotor serta pajak terkait usaha perhotelan dan restoran. Dengan naiknya pendapatan, rencana belanja diprediksi menjadi lebih ekspansif dan tumbuh meningkat, di antaranya belanja modal, seiring dengan percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Optimalisasi



kinerja konsumsi pemerintah tecermin dari realisasi belanja daerah pada triwulan I hingga triwulan III 2023 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama didorong oleh optimalisasi pada sektor belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Sementara itu, investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2023 diperkirakan meningkat. Langkah reformasi struktural melalui penerbitan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah pada Maret 2023 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja dan implementasi aplikasi OSS-RBA yang terus dioptimalkan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas pelaku ekonomi dan meningkatkan realisasi investasi. Selain itu, belanja modal melalui pembangunan PSN yang masif di Sumatera Utara diperkirakan dapat mendorong kinerja investasi di 2023. Bank Indonesia juga turut berperan dengan stakeholder terkait yang tergabung dalam *North Sumatra Invest* terus melakukan penjangkaran proyek investasi yang *clean and clear* seperti KEK Sei Mangkei, *Airport City Kualanamu, Toba Caldera Resort*, dan sebagainya.

Meski demikian, ketidakpastian ekonomi global dan pasar keuangan global yang diperkirakan tetap tinggi serta ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang dibayangi potensi resesi, berisiko meningkatkan kehati-hatian investor dalam berinvestasi. Terlebih, *Fed Fund Rate* yang masih tetap tinggi berisiko mendorong kenaikan suku bunga investasi domestik yang dapat menahan laju kredit investasi.

Adapun kinerja ekspor diperkirakan sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat di tahun 2023. Ekspektasi berlanjutnya tensi geopolitik dunia diperkirakan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan global. Harga komoditas global yang diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya juga akan berdampak pada risiko menurunnya surplus neraca perdagangan Sumatera Utara. Biaya

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Negara	% yoy				Perubahan dari Outlook Jan 23	
	2021	2022	2023*	2024*	2023	2024
Dunia	6,3	3,5	3,0	2,9	0,0	-0,1
Negara Maju	5,4	2,6	1,5	1,4	0,0	0,0
Amerika Serikat	5,9	2,1	2,1	1,5	0,3	0,5
Kawasan Euro	5,3	3,5	0,7	1,2	-0,2	-0,3
Jepang	2,2	1,0	2,0	1,0	0,6	0,0
Britania Raya	7,6	4,1	0,5	0,6	0,1	-0,4
Negara Berkembang	6,8	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,1
Tiongkok	8,4	3,0	5,0	4,2	-0,2	-0,3
India	9,1	7,2	6,3	6,3	0,2	0,0
ASEAN	4,0	5,5	4,2	4,5	-0,4	0,0

Sumber: WEO Outlook Juli 2023, diolah; *) proyeksi;

impor barang modal diperkirakan meningkat seiring pengetatan kebijakan moneter di bank sentral sejumlah negara. *Rebound* ekonomi China yang tidak setinggi perkiraan juga melemahkan proyeksi net ekspor. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi negara mitra dagang utama seperti India dan negara ASEAN yang tetap kuat diperkirakan dapat menopang tetap solidnya kinerja ekspor ke wilayah tersebut. Selain itu, adanya penambahan kapasitas produksi di sejumlah korporasi besar di Sumatera Utara pada tahun 2021 dan 2022 juga diperkirakan dapat menjaga kinerja ekspor pada tahun 2023 tetap positif.

7.1.1.2 Komponen Lapangan Usaha

Prospek LU Pertanian pada tahun 2023 juga diperkirakan termoderasi dari tahun sebelumnya.

Kenaikan harga energi, impor bahan baku pupuk yang melambat, gangguan rantai pasok global dampak dari konflik geopolitik Rusia Ukraina, dan permasalahan struktural terkait produktivitas pertanian turut menahan kinerja LU Pertanian. Di sisi lain, perlambatan dapat ditahan lebih dalam seiring dengan ditindaklanjutinya kebijakan ketahanan pangan melalui kebijakan yang efektif seperti penambahan Sistem Resi Gudang di Kab. Dairi, pengadaan *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) di Kota Tebing Tinggi, serta program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang termasuk di dalamnya ialah pemberian bantuan alat dan bantuan mesin pertanian dan optimalisasi Kerjasama Antar Daerah. Ketahanan pangan juga



diprakirakan meningkat seiring dengan adanya Kawasan Pertanian Terpadu di Kab. Dairi. Selain itu, dampak fenomena El Nino terhadap gangguan produksi pangan tidak sebesar prakiraan sebelumnya.

Di tengah moderasi LU Pertanian, permintaan domestik yang tetap kuat diprakirakan dapat mendorong kinerja LU Industri Pengolahan.

Kondisi pandemi yang membaik dari tahun sebelumnya turut mendorong aktivitas ekonomi dan permintaan domestik. Program hilirisasi industri kelapa sawit nasional, yakni program B35 dan B40 yang terus dilakukan pemerintah diprakirakan dapat meningkatkan kinerja industri pengolahan. Sejalan dengan kondisi tersebut, *World Bank* memperkirakan harga pada level yang tetap kuat untuk komoditas CPO, karet, dan kopi meski mengalami moderasi dari tahun sebelumnya. Indikator *Purchasing Manager's Index* (PMI) negara mitra dagang utama seperti India masih berada di atas zona ekspansif pada pertengahan tahun 2023. Meski demikian, konflik geopolitik yang berkepanjangan berisiko menahan kinerja LU Industri Pengolahan karena potensi disrupti rantai pasokan sehingga impor bahan modal akan terganggu.

LU Konstruksi diprakirakan akan mengalami perbaikan kinerja pada tahun 2023. Akselerasi penyelesaian proyek infrastruktur, khususnya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas tol Indrapura-Kisaran, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Pematangsiantar, dan Binjai-Pangkalan Brandan yang ditargetkan rampung di tahun 2023, proyek pendukun PON XIII Aceh-Sumut 2023, serta pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba diprakirakan dapat turut mendorong kinerja LU Konstruksi. Namun, harga bahan baku yang diprakirakan masih tinggi di tahun 2023 berisiko menahan permintaan di LU konstruksi. Tingkat suku bunga yang diprakirakan masih tinggi juga turut menahan permintaan kredit di LU konstruksi.

Daya beli masyarakat diperkirakan tetap kuat dalam menopang kinerja LU Perdagangan meski mengalami moderasi dibandingkan tahun

sebelumnya. Berakhirnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2023 dan meningkatnya tekanan inflasi global yang tertransmisi ke harga domestik dapat berdampak pada permintaan domestik. Harga komoditas utama yang tidak setinggi tahun sebelumnya juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan luar negeri dan turut menahan kinerja LU Perdagangan. Meski demikian, tetap terjaganya permintaan komoditas utama di tengah berlanjutnya krisis geopolitik dapat menahan perlambatan yang lebih dalam. Selain itu, sejumlah *event* internasional maupun nasional yang melibatkan UMKM seperti *Formula One Power Boat* (F1H2O), Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU), Festival Ekonomi Syariah Sumatera, dan *event* lainnya dapat mendukung pemulihan industri kreatif UMKM di Sumatera Utara.

7.1.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diprakirakan meningkat pada tahun 2024 meski dibayang-bayangi risiko eksternal. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024 diprakirakan berada pada rentang kisaran 4,5-5,3% (yoy).

Dari sisi eksternal, ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Setelah rebound awal yang kuat dari kedalaman pandemi COVID-19, laju pemulihan ekonomi global cenderung melambat. Beberapa faktor menghambat pemulihan tersebut, antara lain konsekuensi jangka panjang dari pandemi, konflik geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah, dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang diperlukan untuk mengurangi inflasi, penarikan insentif fiskal di tengah utang yang tinggi, dan peristiwa cuaca ekstrem. Namun, permintaan domestik yang tetap resilien sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilu, dan berlanjutnya pembangunan PSN diprakirakan dapat menjaga kinerja lapangan usaha utama di Sumatera Utara di 2024.



7.1.2.1 Komponen Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh dari tahun sebelumnya.

Hal ini didukung dengan ekspektasi ekonomi domestik yang tetap kuat, yang terkait erat dengan peningkatan pendapatan rumah tangga akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan gaji ASN, serta berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) / kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kenaikan UMP dan gaji ASN serta program perlindungan sosial ini diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, tingkat inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

Meskipun demikian, ketidakpastian pemulihan ekonomi global dapat berdampak pada meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan aktivitas konsumsi. Pengurangan permintaan global dapat menurunkan harga komoditas ekspor Sumatera Utara dan mempengaruhi pendapatan bagi petani, pekerja industri, dan bisnis yang terkait. Hal ini berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga dan daya beli, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, prakiraan masih tingginya suku bunga di tahun 2024 diperkirakan masih menahan permintaan kredit.

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan terakselerasi seiring penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kapasitas fiskal yang lebih baik.

Prospek ekonomi nasional yang lebih baik di 2024, yang tercermin dari resiliennya permintaan domestik, memberikan optimisme bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan target penerimaannya. Pendapatan tersebut antara lain diharapkan berasal dari peningkatan pajak terkait kendaraan bermotor serta pajak dari sektor perhotelan dan restoran, yang merupakan indikator penting dari kegiatan ekonomi lokal. Dengan naiknya pendapatan ini, rencana belanja pemerintah daerah diprediksi akan menjadi lebih ekspansif.

Selain itu, perhelatan Pemilu 2024 diperkirakan turut mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, untuk berbagai keperluan, seperti logistik pemilu, pembayaran petugas pemilu, kampanye informasi dan edukasi pemilih, serta keamanan. Selain itu, penyelenggaraan PON 2024 di Sumatera Utara dapat turut menjadi penggerak konsumsi pemerintah, terutama dari sisi belanja modal. Hal ini dapat terlihat dari berlanjutnya pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara yang memiliki nilai kontrak Rp587 miliar di 2024 yang menjadi salah satu PSN di Sumatera Utara.

Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan turut meningkat pada tahun 2024.

Telah mulai berlakunya peraturan-peraturan turunan UU Cipta Kerja secara efektif di 2024 dan implementasi aplikasi OSS-RBA yang terus dioptimalkan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas pelaku ekonomi dan meningkatkan realisasi investasi. Pembangunan PSN yang masih berlanjut di 2024 diperkirakan turut menjadi katalisator kinerja investasi Sumatera Utara. Bank Indonesia juga turut berperan dengan stakeholder terkait yang tergabung dalam *North Sumatra Invest* terus melakukan kegiatan promosi investasi dan mengelola persepsi positif terkait Sumatera Utara guna mendorong dan menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara serta menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.

Walaupun demikian, situasi ekonomi global yang saat ini masih dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan dan kondisi pasar keuangan global yang diperkirakan akan tetap volatil, telah memunculkan ekspektasi akan pertumbuhan ekonomi global yang lebih lambat sehingga dapat berdampak pada kinerja investasi. Selain itu, perhelatan Pemilu 2024 berpotensi meningkatkan sikap kehati-hatian para investor dalam melakukan investasi. Lebih lanjut, tingkat Fed Fund Rate yang diperkirakan persisten di level tinggi di 2024 membawa risiko terhadap masih tingginya suku bunga investasi di dalam negeri, yang dapat berdampak pada permintaan kredit investasi dan memperlambat kinerja investasi di 2024.



Kinerja ekspor pada tahun 2024 diperkirakan melambat sejalan dengan perkiraan perlambatan permintaan dunia. Scar dari pandemi yang masih berlanjut pada perekonomian Tiongkok, masih berlanjutnya konflik geopolitik, serta masih lemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara tujuan ekspor diperkirakan berdampak pada kinerja ekspor Sumatera Utara di 2024. Lemahnya permintaan pada negara-negara tujuan ekspor tersebut diperkirakan menahan kenaikan harga komoditas-komoditas ekspor Sumatera Utara. Meski demikian, masih terdapat peluang meningkatkan kinerja ekspor, terutama pada negara-negara yang memiliki ekonomi yang juga resilien di 2024 seperti India dan negara-negara ASEAN.

7.1.2.2 Komponen Lapangan Usaha

LU Pertanian diperkirakan mengalami perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya. Walaupun masih terdapat potensi El Nino di 2024, dampaknya terhadap produksi pangan diperkirakan tidak signifikan. Selain itu, serangkaian kebijakan pemerintah yang diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diharapkan dapat mempercepat pemulihan LU Pertanian. Namun, harga komoditas di pasar internasional yang diperkirakan belum sepenuhnya pulih dan masih tingginya biaya produksi dapat berpotensi menahan laju kinerja LU Pertanian.

LU Industri Pengolahan dan Perdagangan berpotensi mengalami peningkatan kinerja seiring dengan kuatnya permintaan domestik. Implementasi program hilirisasi industri kelapa sawit untuk kebutuhan campuran bahan bakar (B35) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023 diprediksi mendorong kinerja LU Industri Pengolahan di 2024. Sedangkan pada LU Perdagangan, kombinasi konsumsi masyarakat yang kuat dan adopsi teknologi digital dalam perdagangan diperkirakan akan terus berkembang terutama pada generasi muda, membuka peluang bagi peningkatan efisiensi dan jangkauan pasar sehingga dapat berdampak positif pada kinerja LU Perdagangan. Namun, eskalasi ketegangan

geopolitik dapat memicu peningkatan harga energi dan bahan baku yang berikutnya dapat meningkatkan biaya produksi sehingga dapat memengaruhi kinerja LU Pengolahan.

Di sisi lain, pertumbuhan LU Konstruksi dan LU Pergudangan diperkirakan termoderasi di 2024. Selesainya pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON diperkirakan dapat memengaruhi kinerja LU Konstruksi. Selain itu, konflik geopolitik yang Kembali timbul di Timur Tengah pada akhir tahun 2023 diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga energi, yang dapat mendorong harga transportasi sehingga dapat berdampak pada permintaan masyarakat.

7.1.3 Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2023, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai.

Pertama, dinamika perekonomian global yang dibayangi risiko stagflasi hingga resesi dapat berdampak pada perekonomian domestik.

Ketidakpastian pasar keuangan global masih tetap tinggi, dipengaruhi oleh dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara maju. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berasal dari permintaan luar negeri sehingga perkembangan kondisi ekonomi global akan turut memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara. Terjadinya gelombang panas akibat perubahan iklim di sejumlah negara (El Nino) diperkirakan berpotensi mengganggu laju pemulihan ekonomi global dan permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan Sumatera Utara. Meski demikian, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya, dengan suku bunga diperkirakan masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023.

Dari sisi industri, kesiapan industri domestik dalam merespons permintaan menjadi perhatian utama dalam memanfaatkan momentum di tengah perlambatan ekonomi negara pesaing lainnya. Adapun konflik



geopolitik yang berkepanjangan berisiko melanjutkan gangguan rantai pasokan global sehingga berpotensi menahan impor bahan baku atau barang modal yang pada gilirannya dapat mendisrupsi industri domestik. Dalam pengembangan UMKM, aspek daya saing perlu terus didorong dalam rangka memperkuat resiliensi UMKM. Dari sisi ekonomi syariah, aspek digitalisasi, SDM dan pengembangan *halal value chain* juga masih memerlukan penguatan.

Kedua, risiko tekanan inflasi domestik yang tinggi seiring dengan masih tingginya harga energi dan pangan dan berlanjutnya gangguan rantai pasokan. Gangguan suplai pangan global diperkirakan dapat mendorong berlanjutnya kebijakan proteksionisme pangan dan ditransmisikan pada peningkatan tekanan inflasi domestik. Dari aspek konsumsi, permintaan yang kian pulih ke depan di tengah suplai yang belum stabil dapat berpengaruh pada lonjakan harga sehingga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Peningkatan produksi untuk komoditas yang belum mencapai swasembada perlu menjadi prioritas dalam pengendalian inflasi pangan. Perluasan kerja sama antardaerah dan penguatan infrastruktur diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi yang pada akhirnya turut menjaga ketersediaan pasokan. Ekspektasi masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam menjaga tingkat inflasi di tengah kondisi ekonomi yang diliputi ketidakpastian.

Ketiga, koordinasi antarprovinsi dengan kabupaten dan kota perlu didorong untuk memanfaatkan keterkaitan antardaerah dari sisi hulu ke hilir sehingga menciptakan aglomerasi industri. Pengembangan aglomerasi industri diperlukan untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah yang lebih besar. Produksi komoditas sejenis yang bersaing dari negara lain juga menuntut peningkatan kualitas produksi. Hilirisasi industri pengolahan dalam pengembangan aglomerasi industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas utama. Adapun penciptaan aglomerasi

industri memerlukan peran investor. Dengan demikian, ketentuan terkait insentif dan kemudahan investasi serta penerbitan regulasi turunan UU Cipta Kerja perlu untuk segera diselesaikan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Keempat, masih terbatasnya pengembangan infrastrukturekonomi hijau. Di tengah isu perubahan iklim yang semakin mengemuka, pembangunan yang seimbang dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di daerah yang mengandalkan sumber daya alam. Sumatera Utara sendiri masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau, seperti masih terbatasnya peluang pembiayaan hijau dan ketersediaan infrastruktur pendukung di ekonomi hijau dikarenakan biaya transisi yang tinggi untuk beralih ke industri hijau. Selain itu, pelaku usaha juga masih memiliki informasi dan pengetahuan yang terbatas mengenai taksonomi hijau dan persyaratan untuk dapat memenuhi taksonomi hijau tersebut.

7.2 PROSPEK INFLASI

7.2.1 Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2023

Dengan mencermati berbagai perkembangan indikator perekonomian terkini, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ pada tahun 2023.



Dari sisi global, tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih akan tinggi dengan berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi dunia meskipun akan berangsur berkurang dengan pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral. Inflasi dunia mengalami peningkatan dari 6,4% (yoy) pada tahun 2021 menjadi 8,7% (yoy) pada tahun 2022 dan kemudian diperkirakan turun ke 6,9% (yoy) pada 2023 dan 5,8% (yoy) pada 2024 (sumber: proyeksi IMF). Adapun angka tersebut masih berada di atas rata-rata sebelum pandemi (2017-2019) sebesar 3,5%. Secara keseluruhan dampak fragmentasi politik-ekonomi terhadap inflasi di negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs) relatif tidak setinggi di negara *Advanced Economies* (AEs), kecuali di Amerika Latin.

Berdasarkan prediksi inflasi tersebut, harga komoditas pangan dunia diperkirakan termoderasi. Namun demikian, memanasnya situasi geopolitik Timur Tengah dapat mendorong tekanan inflasi dari tingginya harga energi dan pangan dunia pada akhir tahun 2023. **Dari sisi domestik**, pencabutan subsidi sejumlah komoditas strategis sebagai bagian dari normalisasi kebijakan fiskal akan mendorong kenaikan komponen *administered prices*, serta didorong lebih jauh oleh potensi penerapan pajak karbon yang ditunda pada tahun 2022. Selain itu, gangguan produksi hortikultura masih perlu diantisipasi mengingat keberlangsungan fenomena La Nina maupun El Nino yang diperkirakan masih berlanjut hingga 2023.

Merespons hal tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah pemulihan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai sektor. Koordinasi pengendalian inflasi antarwilayah akan tetap diperkuat, di antaranya melalui sinergi yang erat dengan *stakeholders* terkait terutama dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) agar inflasi Sumatera Utara dapat terjaga di sasaran inflasi nasional 2023.

Berbagai program pengendalian harga telah dipersiapkan oleh TPID dalam mendukung GNPIP serta menghadapi prospek peningkatan inflasi tahun 2023 di antaranya dalam bentuk perluasan MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti antara Kab. Dairi dengan Kota Medan, Kab. Batubara dengan Kota Medan, Kab. Simalungun dengan Provinsi Jambi, dan Kab. Deli Serdang dengan Kota Batam untuk komoditas cabai merah. Kemudian juga akan dilakukan perluasan klaster pangan (terutama pada komoditas cabai merah dan bawang merah) serta mendorong implementasi *urban farming*.

7.3 PROSPEK INFLASI KESELURUHAN TAHUN 2024

Laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dan tetap berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk menjaga inflasi berada pada rentang sasaran. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran pengendalian inflasi yang tepat guna dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pengendalian inflasi di 2024.

Dari sisi global, tekanan inflasi pada 2024 diperkirakan akan mereda dibanding tahun 2023, meski masing-masing negara memiliki laju disinflasi yang berbeda. IMF memproyeksikan negara-negara maju diperkirakan akan mengalami penurunan inflasi rata-rata tahunan sebesar 2,7 poin persentase pada tahun 2023, sekitar dua kali lipat dari penurunan yang diproyeksikan (1,3 poin persentase) untuk negara-negara berkembang. Perbedaan ini mencerminkan paparan setiap negara yang berbeda terhadap guncangan pada harga komoditas dan nilai tukar, dimana negara-negara berkembang termasuk Indonesia lebih rentan terhadap kedua jenis guncangan tersebut. Pada saat yang sama, laju inflasi di negara maju masih di atas sasaran (2%), dipengaruhi perekonomian yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Untuk mengendalikan inflasi, diperkirakan bank sentral negara maju masih



mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi (*higher for longer*), yang mendorong pelemahan nilai tukar di negara berkembang.

Dari sisi domestik, rencana kenaikan batas atas harga tiket pesawat, peningkatan harga bahan bakar sebagai imbas konflik di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan komponen *administered prices*. Selain itu, depresiasi nilai tukar seiring dengan kebijakan suku bunga tinggi di negara maju berpotensi menimbulkan *imported inflation* yang didorong naiknya harga komoditas impor. Terkait harga komoditas, kecenderungan negara-negara produsen komoditas seperti Brazil dan India yang menutup keran ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat memberikan tekanan inflasi.

Merespons hal tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi sembari terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di berbagai sektor. Koordinasi pengendalian inflasi antarwilayah akan tetap diperkuat, di antaranya melalui sinergi yang erat dengan *stakeholders* terkait terutama dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) agar inflasi Sumatera Utara dapat terjaga di sasaran inflasi nasional 2024.

Berbagai program pengendalian harga telah dipersiapkan oleh TPID dalam mendukung GNPIP serta menghadapi prospek peningkatan inflasi tahun 2024 di antaranya dalam bentuk perluasan MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti antara Kab. Dairi dengan Kota Medan, Kab. Batubara dengan Kota Medan, Kab. Simalungun dengan Provinsi Jambi, dan Kab. Deli Serdang dengan Kota Batam untuk komoditas cabai merah. Kemudian juga akan dilakukan perluasan klaster pangan (terutama pada komoditas cabai merah dan bawang merah) serta mendorong implementasi *urban farming*. Selain itu, program pengendalian inflasi di Sumatera Utara ke depannya juga diarahkan untuk lebih preventif dengan mendeteksi secara dini fluktuasi harga-harga komoditas strategis melalui mekanisme *Early Warning System*.

7.3.1 Risiko Tekanan Inflasi Meningkat

Risiko tekanan inflasi, antara lain adalah 1) tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi sejalan dengan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, di tengah pelemahan permintaan global; 2) peningkatan permintaan domestik secara signifikan (*pent-up demand*) sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung; 3) kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antardaerah dan antarwaktu yang tidak dapat dikelola optimal; 4) kenaikan biaya saprodi impor sebesar 40%-60% yang berisiko memengaruhi biaya produksi kelompok bahan makanan, khususnya komoditas hortikultura; 5) perubahan iklim yang menyebabkan cuaca buruk yang dapat menekan jumlah produksi pangan; serta 6) kenaikan harga pakan ternak yang berisiko mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Lebih lanjut, untuk memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia tetap memperkuat sinergi baik dengan pemerintah pusat maupun daerah, juga TPID, agar inflasi dapat terjaga dalam sasaran $3 \pm 1\%$ di tahun 2023.

7.4 REKOMENDASI

Dengan berbagai tantangan yang ada, Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, berbagai strategi penguatan perlu dilakukan:

1) Pertama, perlu adanya kesiapan industri agar lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis dari negara pesaing. Upaya hilirisasi industri ini perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan ekspor komoditas yang bernilai tambah lebih tinggi. Dalam mendorong hilirisasi industri, tentu kualitas tenaga kerja lokal juga menjadi salah satu faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan hilirisasi industri agar mampu bersaing di tengah persaingan dengan tenaga kerja yang datang



dari negara lain. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal juga perlu terus didorong.

2) Kedua, penguatan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya aglomerasi industri yang memberikan peningkatan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah.

Penciptaan aglomerasi industri membutuhkan ketersediaan regulasi daerah, pemetaan potensi masing-masing daerah, investor yang mampu mendukung proses pengembangan industri, dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara itu, penguatan iklim investasi dapat dilakukan dengan mendorong kesiapan daerah dalam implementasi OSS-RBA, percepatan penerbitan Peraturan Daerah yang mendukung, dan membantu promosi investasi melalui peningkatan kolaborasi *North Sumatra Invest* (NSI) antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu, NSI akan lebih berperan dalam mendorong ketersediaan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dan mendorong proyek-proyek investasi yang ada di Sumatera menjadi *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sehingga semakin menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

3) Ketiga, mendorong pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau.

Sinergi dan kolaborasi dari para *stakeholders* di Sumatera Utara diharapkan tidak hanya mendorong sektor industri namun juga ekonomi kreatif melalui pemberian insentif pembiayaan untuk mendukung ekonomi hijau di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ketersediaan proyek berbasis hijau perlu terus didorong oleh Pemerintah Daerah bersama dengan para pengelola kawasan industri. OJK bersama dengan BEI dan lembaga pembiayaan dapat mendorong ketersediaan instrumen pembiayaan hijau sembari memetakan potensi pembiayaan hijau yang ada di Sumatera Utara. Bank Indonesia akan senantiasa mendukung dan memperkuat

kolaborasi dan sinergi antarlembaga sehingga pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau di Sumatera Utara dapat semakin terakselerasi. Penguatan aspek regulasi dan optimalisasi anggaran disertai adanya kemudahan perizinan diharapkan dapat mengakselerasi lahirnya berbagai proyek berbasis hijau di Sumatera Utara.

4) Keempat, memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam merumuskan langkah antisipatif terkait pengendalian inflasi.

Sinergi tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi 5 (lima) arahan presiden dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan kedepan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya yakni melalui perluasan kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi penyerapan anggaran belanja dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah seperti melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Sinergi dan kolaborasi melalui GNPIP serta upaya pengendalian inflasi berbasis 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) juga perlu diperkuat di seluruh daerah.

5) Kelima, sejalan dengan semakin pesatnya transformasi ekonomi dan keuangan digital ke depan, Provinsi Sumatera Utara perlu mendorong peran sektor ekonomi kreatif.

Pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Utara sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan, baik dari aspek Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas, Promosi, dan Pelaku Usaha (3A, 2P) seiring dengan relaksasi regulasi akses perjalanan dari luar ke dalam negeri. Integrasi peran UMKM di sektor pariwisata disertai peningkatan kualitas SDM dan akseptasi digital juga diharapkan dapat memperkuat sektor kinerja sektor pariwisata. Seluruh pihak juga



perlu mendukung perluasan pembukaan aktivitas pariwisata yang aman disertai akselerasi vaksinasi, serta peningkatan *quality tourism* Sumatera Utara yang performanya masih perlu ditingkatkan agar bisa mengimbangi destinasi wisata unggulan lainnya di luar Sumatera Utara.

6) Keenam, *improvement* di bidang sistem pembayaran ritel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan BI-FAST dan QRIS sebagai alternatif kanal pembayaran digital dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan pembayaran nontunai. Hal tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan akses terhadap kredit, melalui kepemilikan rekening yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), selain demi pembukuan dan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik, juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi di daerah, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Telah disusunnya peta jalan dan rencana aksi dapat menjadi *guideline* percepatan dan perluasan ETPD di daerah yang lebih terarah. Sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi harapannya dapat terus dilakukan oleh TP2DD di Sumatera Utara untuk mendukung peningkatan transaksi pemerintah daerah secara nontunai sesuai dengan kanal pembayaran yang telah disediakan sehingga memberikan kontribusi yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7) Ketujuh, peningkatan inklusi keuangan UMKM juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih jauh.

Kontribusi UMKM yang sudah tinggi dalam perekonomian, meskipun belum memiliki akses pembiayaan yang maksimal, tentunya dapat dikembangkan melalui peningkatan akses keuangan. Kolaborasi yang semakin baik dalam forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan implementasi yang lebih luas

terhadap program-program seperti UMKM Naik Kelas dan *One Village One Agent*, diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan mengakselerasi pertumbuhannya. Dari sisi perbankan, peningkatan pangsa kredit kepada pelaku UMKM produktif dengan bunga kredit terjangkau juga dinilai efektif untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM. Perbankan juga dapat turut serta membina nasabah UMKM agar semakin produktif dan naik kelas.





► BOKS 4

Gelar NSI Day 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Mendukung Kemudahan Aliran Modal Investasi Dan UMKM Go Ekspor



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui forum *North Sumatra Invest (NSI)* kembali menyelenggarakan kegiatan *NSI Day 2023 (6/11)* bertempat di Kota Medan. Pada kegiatan tersebut Pj. Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan secara resmi membuka acara *NSI Day 2023*.

Mengusung tema "*Enhancing North Sumatra Economic Growth through Sustainable Investment and Financial Inclusion*", *NSI Day 2023* turut disinergikan dengan pelaksanaan *Capacity Building* Keketuaan ASEAN *Chairmanship* Indonesia guna mendukung kemajuan inklusi keuangan dalam transisi keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kegiatan *NSI Day 2023* sekaligus merupakan acara puncak promosi investasi di Sumatera Utara dan *pilot project* bersama,



Gambar B4.1 *Launching NSI Day 2023* : Pj. Gubernur Sumatera Utara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM menuangkan air ke dalam peta Sumatera sebagai bentuk simbolis dukungan Pemerintah terhadap kemudahan aliran modal investasi Sumatera

karena untuk pertama kalinya disinergikan dengan seluruh *Regional Investor Relation Unit (RIRU)* di Kawasan Sumatera lainnya, yaitu Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, dan Lampung yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan *NSI Day 2023* turut melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait yang mencerminkan bahwa *NSI* telah menjalankan fungsi koordinasinya dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut terbukti dari pemberian Surat Dukungan kepada *NSI* oleh Kementerian Investasi/BKPM dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam hal pendampingan penguatan sektor investasi di Sumatera Utara. Di samping itu, terdapat beberapa seremoni komitmen investasi baik Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Letter of Intent (LoI)* dan/atau kesepakatan kerja sama investasi antara investor dengan proyek investasi strategis di Sumatera Utara, di antaranya Proyek Toba *Caldera Resort* dengan PT. Wahana Media Entertainment (Indonesia) serta Proyek KEK Sei Mangkei dengan i) PT. Evyap Sabun Indonesia (Turki), ii) PT. Tanimas Resources International (Indonesia), iii) PT. Simeдарby Oils Sei Mangkei Refinery (Malaysia), dan iv) PT Emery Oleochemical Indonesia (Amerika Serikat). Diharapkan penandatanganan sejumlah komitmen investasi ini dapat menyumbang realisasi investasi Sumatera Utara yang lebih tinggi lagi terhadap target investasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM, yang



Sumber: Kemerinvest/BKPM (diolah)

Grafik B4.1 Capaian Realisasi Investasi Sumatera Utara

mana per triwulan III 2023 ini telah mencapai 62,80% dari target akhir tahun 2023 sebesar Rp50 Triliun – (Grafik B4.1).

Pemerintah baik di Pusat dan Daerah terus mendukung kemudahan aliran modal investasi untuk masuk ke dalam Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menekankan komitmen tinggi dari Bank Indonesia untuk terus bersinergi baik dengan Kementerian/Lembaga di tingkat Nasional maupun dengan Pemerintah Daerah terutama melalui fungsi *Investor Relation Unit* untuk mengelola persepsi positif investor terhadap Indonesia. Dari sisi daerah, Pj. Gubernur Sumatera Utara menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif dan akses kemudahan berinvestasi, serta menyediakan proyek investasi yang siap ditawarkan. Sejalan dengan hal tersebut, dari sisi Pemerintah Pusat, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM mengapresiasi penyelenggaraan NSI Day 2023 sebagai bukti konkret komunikasi dan koordinasi Kementerian Investasi/BKPM bersama dengan Bank Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor potensial terhadap kesiapan Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk berinvestasi dan meningkatkan keyakinan investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara.

Selain promosi investasi, NSI Day 2023 juga mendorong promosi perdagangan yakni melalui peningkatan kapasitas untuk mendukung UMKM go ekspor dengan

diskusi panel bertajuk “*Small Medium Enterprises Go Export Through Financial Inclusion and Sustainable Finance*”. Narasumber pada sesi ini di antaranya adalah i) Deputi Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia yang menyampaikan *Overview* Keketuaan ASEAN *Chairmanship* Indonesia; ii) CEO Wellica Co. Ltd. dan Ketua Indonesia *Trading House* Guangzhou yang menyampaikan Peluang Ekspor Kopi di Tiongkok dan Tips Tembus Pasar Ekspor; iii) Ketua DUA DC Coffee dari Indonesia *House of Bean* United States yang menyampaikan Peluang Ekspor Kopi di Amerika Serikat dan Tips Tembus Ekspor; iv) Plt. *Branch Manager* Bank Negara Indonesia yang menyampaikan Dukungan Perbankan Menembus Pasar Ekspor; dan v) *Export Marketing Manager* Mandiri Coffee yang menyampaikan *Success Story* UMKM Sumatera Utara Berhasil Tembus Pasar Ekspor.

Kegiatan NSI Day 2023 sebagai puncak promosi investasi Sumatera Utara sekaligus *flagship* KPw BI Provinsi Sumatera Utara telah terselenggara dengan baik dan dihadiri oleh Pimpinan Daerah serta stakeholder utama di Sumatera Utara. Sinergi dan kolaborasi terus diperkuat dalam mendukung aliran modal masuk ke dalam negeri baik melalui investasi maupun perdagangan. Ke depannya, NSI akan terus mendorong kesiapan dan ketersediaan proyek investasi yang akan ditawarkan, khususnya untuk sektor yang sedang diminati seperti sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), *healthcare*, dan hilirisasi sektor komoditas, sehingga terdapat *improvement* dari sisi proyek, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya dari kegiatan NSI Day 2023, NSI bersama *project owner* juga akan menindaklanjuti sebanyak 7 (tujuh) *one-on-one meeting* yang telah terlaksana di kegiatan NSI Day 2023 baik secara luring maupun daring, di mana ketertarikan calon investor tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga Jepang dan Malaysia. NSI berkomitmen terus siap menjadi bagian atas kesuksesan bersama dan dalam menyambut investasi masuk ke Sumatera Utara melalui kemudahan dan regulasi yang menarik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif di Sumatera Utara (seputar NSI dapat diakses melalui *website northsumatrainvest.id*).



Halaman ini sengaja dikosongkan



Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

Daftar Istilah

Administered Prices

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya tembakau dan minuman beralkohol.

Barang Modal (Capital Goods)

Barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi, biasanya bernilai guna lebih dari 1 tahun.

Bahan Baku (Raw Material)

Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.

BI 7 Day Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik.

BI-RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed / gross settlement*) dan bersifat real time (*electronically processed*), di mana rekening peserta dapat didebit/ dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

CPO (Crude Palm Oil)

Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (*deposito*).

Disposable Income

Sejumlah uang yang dapat dibelanjakan dan ditabung setelah dikurangi dengan pajak penghasilan.

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah maupun valas. Terminologi FDR untuk bank syariah sementara LDR untuk bank konvensional.

Indeks Penjualan Barang Konstruksi

Indeks yang merepresentasikan nilai penjualan dari barang-barang konstruksi.

Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks yang dihasilkan oleh Survei Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian, baik saat ini maupun masa mendatang.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu indeks pembentuk Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan persepsi konsumen akan kondisi perekonomian pada saat ini.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Inflow

Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Investasi

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin.

Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.

Kredit Konsumsi

Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM memiliki prospek bisnis yang baik (*feasible*) tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (*bankable*). Dana KUR berasal dari bank pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah.

Leading Indicators

Indikator yang digunakan untuk memprediksi pergerakan atau titik balik dari suatu siklus bisnis.

Liaison

Uatu kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha.

Loan to Value (LTV)

Sebuah dasar atau metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur berdasarkan aset yang dijadikan jaminan.



Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)

Persentase kredit/pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Terminologi NPL untuk bank konvensional sementara NPF untuk bank syariah.

NTP (Nilai Tukar Petani)

Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

PDRB Riil

Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System* (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (*retail*) yaitu transaksi di bawah Rp100 juta.

Survei Konsumen

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dilakukan secara bulanan untuk mengetahui persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.

Survei Penjualan Eceran

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran dan dilakukan secara bulanan.

Uang Kartal

Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas maupun logam.

Volatile Food

Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (*volatile*).

Year on year (yoy)

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan) terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan untuk menghilangkan efek seasonal yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal bulan Ramadhan, tahun ajaran baru, dsb).



Tim Penyusun

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Utara**

Pengarah

I G P Wira Kusuma

Editor

**Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Deputi Kepala Perwakilan**

Yura Djalins

Ekonom Ahli Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Wahyu Yuwana Hidayat

Kontributor

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Aegina Siswana Surbakti

Tutut Tiana

Minda Putri Dwinanda

Komang Greggy Sridana

Juwitasari Nur Rachmawati

Adela Khairunnisa Nugraha

Annisa Amalina

Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Fungsi Implementasi Pengawasan dan SP-PUR

Siti Senorita Printaningrum

Fika Akhmad

Zulpan Riski Amanda

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Telp. 061-4150500

Fax. 061-4534760



Halaman ini sengaja dikosongkan



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Balaikota No.4, Kesawan
Kota Medan, Sumatera Utara